

MEMORANDUM AKHIR JABATAN



NADIEM ANWAR MAKARIM

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2019-2024

MEMORANDUM AKHIR JABATAN

NADIEM ANWAR MAKARIM

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2019-2024





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

**KATA PENGANTAR
MEMORANDUM AKHIR JABATAN**

Berangkat dari cita-cita untuk menghadirkan proses belajar yang jauh lebih memerdekakan bagi guru dan menyenangkan bagi murid, Merdeka Belajar lahir sebagai kebijakan yang bertujuan mentransformasi sistem pendidikan Indonesia.

Kurikulum dan asesmen pembelajaran, manajemen satuan pendidikan, kesejahteraan guru, peran teknologi digital dalam pendidikan, sampai perwujudan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan, merupakan beberapa aspek yang menjadi fokus transformasi Merdeka Belajar. Langkah-langkah berani terus kami ambil untuk mewujudkan SDM unggul melalui pendidikan yang berkualitas, memerdekakan, dan sejalan dengan marwah yang telah dikonsepsikan Ki Hadjar Dewantara.

Dalam perjalanannya yang cukup singkat, Merdeka Belajar telah berkembang menjadi suatu gerakan yang melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Dua puluh enam episode Merdeka Belajar, disertai dengan sejumlah program prioritas telah menghasilkan dampak dan manfaat yang dirasakan oleh semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan dari jenjang PAUD sampai pendidikan tinggi.

Menutup periode lima tahun kepemimpinan sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, perkenankan saya untuk menyampaikan memorandum akhir jabatan yang kami susun sebagai informasi pelaksanaan tugas. Memorandum akhir jabatan ini memuat perjalanan gerakan Merdeka Belajar serta praktik baik dan berbagai capaian yang telah dihasilkan.

Besar harapan saya memorandum ini dapat menjadi acuan bagi menteri dan jajaran pengampu kebijakan pada kabinet yang akan datang. Saya yakin bahwa komitmen dan upaya untuk mewujudkan generasi Indonesia yang cerdas berkarakter akan semakin menguat sebagai bagian dari perjalanan kita menyongsong Indonesia Emas 2045.

Semoga semangat untuk menggerakkan Merdeka Belajar terus menyala di setiap langkah kita memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, Oktober 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
BAB I	
Visi, Misi, dan Kelembagaan Kemendikbudristek	8
Visi Misi Kemendikbudristek	9
Kelembagaan	10
Struktur Organisasi	11
BAB II	
Arah Kebijakan dan Strategi Kemendikbudristek sesuai RPJMN 2020 - 2024	12
Kontribusi Kemendikbudristek pada Program Prioritas Nasional	13
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 2023	14
Peran Kemendikbudristek untuk Mendukung <i>Major Project</i> RPJMN 2020 - 2024	16
BAB III	
Program Terobosan Kemendikbudristek	20
Merdeka Belajar	21
Merdeka Belajar Episode ke-1	28
Merdeka Belajar Episode ke-2	31
Merdeka Belajar Episode ke-3	42
Merdeka Belajar Episode ke-4	45
Merdeka Belajar Episode ke-5	47
Merdeka Belajar Episode ke-6	50
Merdeka Belajar Episode ke-7	58
Merdeka Belajar Episode ke-8	61
Merdeka Belajar Episode ke-9	64
Merdeka Belajar Episode ke-10	68
Merdeka Belajar Episode ke-11	72
Merdeka Belajar Episode ke-12	78

Merdeka Belajar Episode ke-13	81
Merdeka Belajar Episode ke-14	83
Merdeka Belajar Episode ke-15	86
Merdeka Belajar Episode ke-16	89
Merdeka Belajar Episode ke-17	91
Merdeka Belajar Episode ke-18	95
Merdeka Belajar Episode ke-19	100
Merdeka Belajar Episode ke-20	105
Merdeka Belajar Episode ke-21	107
Merdeka Belajar Episode ke-22	111
Merdeka Belajar Episode ke-23	113
Merdeka Belajar Episode ke-24	119
Merdeka Belajar Episode ke-25	122
Merdeka Belajar Episode ke-26	130
BAB IV	
Program Prioritas Lainnya	136
Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan semakin Berdampak	137
Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat: Gotong Royong Pendidikan dan Kebudayaan Hadapi Pandemi	140
Rekrutmen Guru ASN Terbesar Sepanjang Sejarah	142
Manajemen Talenta Fasilitasi Karier Belajar Siswa	144
BAB V	
Tata Kelola dan Dukungan Manajemen.....	165
BAB VI	
Rencana Program dan Anggaran Kemendikbudristek Tahun 2025	172
Kata Penutup	179

BAB I

VISI, MISI, DAN KELEMBAGAAN KEMENDIKBUDRISTEK



VISI MISI KEMENDIKBUDRISTEK

Visi

“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global”.

Misi

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata, dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Prioritas Nasional

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
3. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.



KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), berikut ini tugas dan fungsi Kemendikbudristek.

Tugas

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

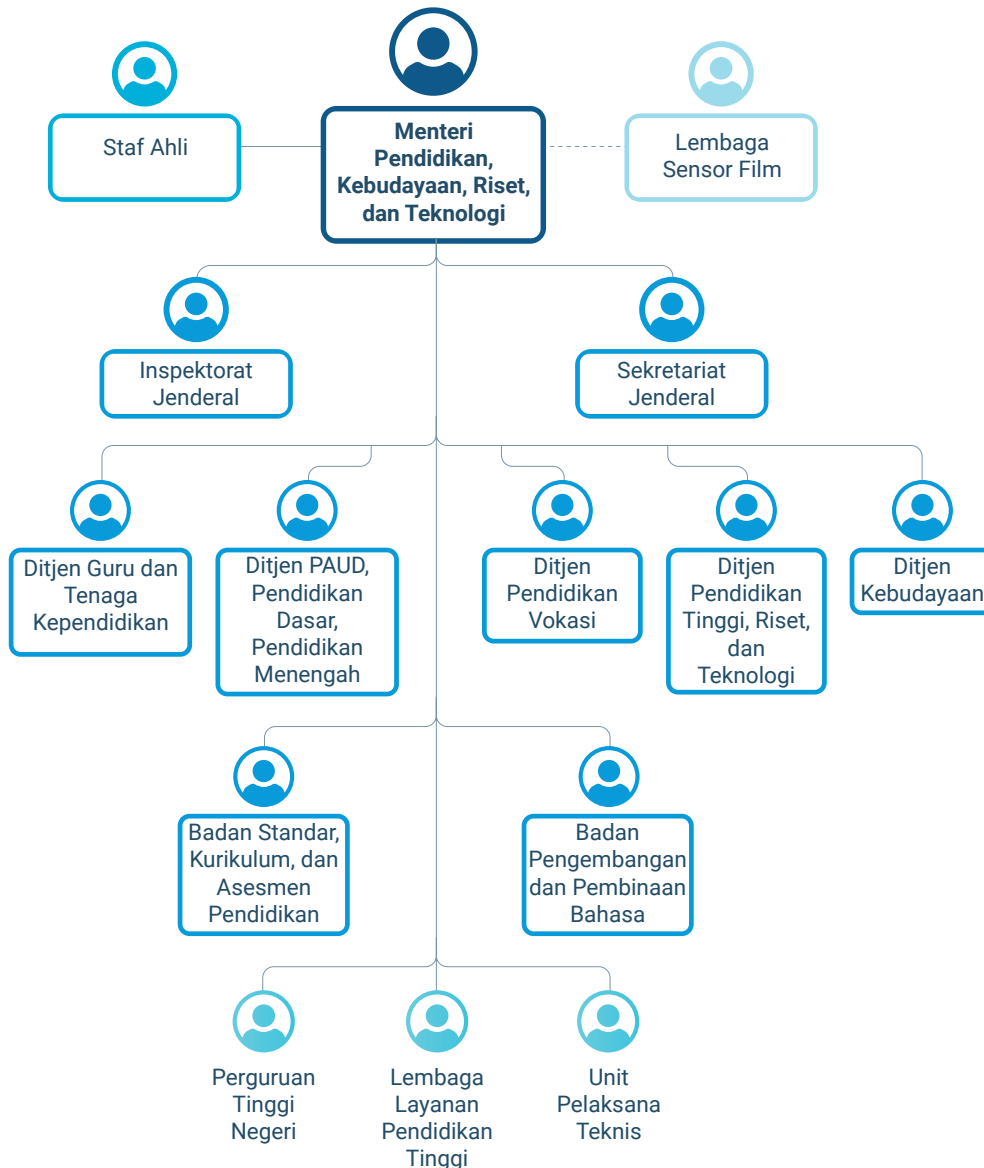
Fungsi

- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, Pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, dan kebudayaan;
- Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik, serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi;
- Penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang Pendidikan;
- Penetapan standar nasional Pendidikan dan kurikulum nasional Pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
- Pelaksanaan fasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, Pendidikan menengah, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi, riset, teknologi, dan kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perfilman nasional;
- Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- Pelaksanaan pengelolaan system perbukuan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pendidikan dan kebudayaan di daerah;
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- Pelaksanaan dukungan substantif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian.

STRUKTUR ORGANISASI KEMENDIKBUDRISTEK

Guna memastikan terlaksananya seluruh tugas, fungsi, dan pelayanan publik di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, Kemendikbudristek didukung dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Struktur Organisasi



BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENDIKBUDRISTEK SESUAI RPJMN 2020-2024



KONTRIBUSI KEMENDIKBUDRISTEK PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, melalui:

1. **Program Prioritas 4**, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Kegiatan prioritas:
 - Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - Afirmasi akses dan percepatan wajib belajar 12 tahun
 - Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan
 - Penjaminan mutu pendidikan
 - Peningkatan tata kelola pendidikan
2. **Program Prioritas 7**, peningkatan produktivitas dan daya saing. Kegiatan prioritas:
 - Penguatan pendidikan tinggi berkualitas
 - Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri

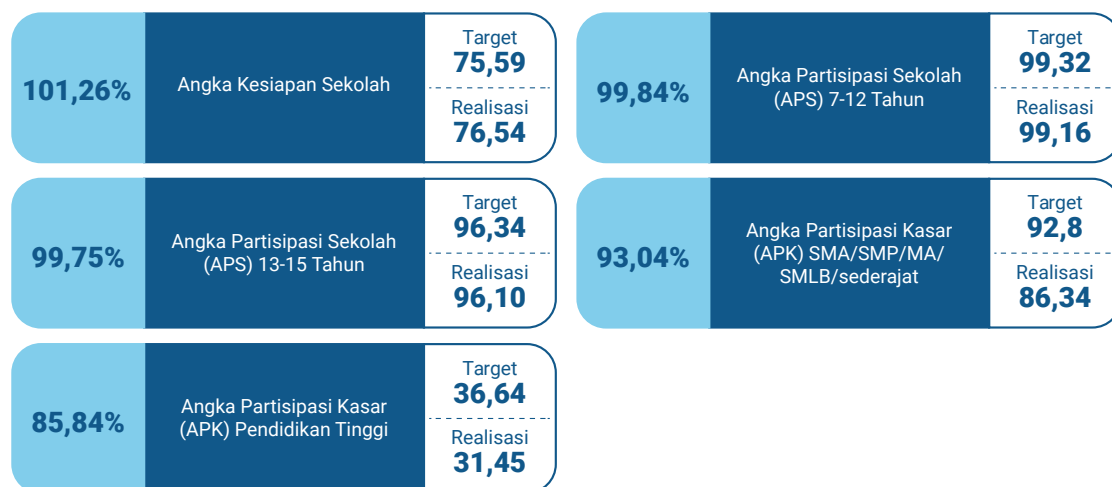
Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, melalui:

1. **Program Prioritas 2**, meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Kegiatan prioritas:
 - Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal
 - Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat
 - Pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif
 - Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia
 - Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan
2. **Program Prioritas 4**, Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan. Kegiatan prioritas:
 - Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra

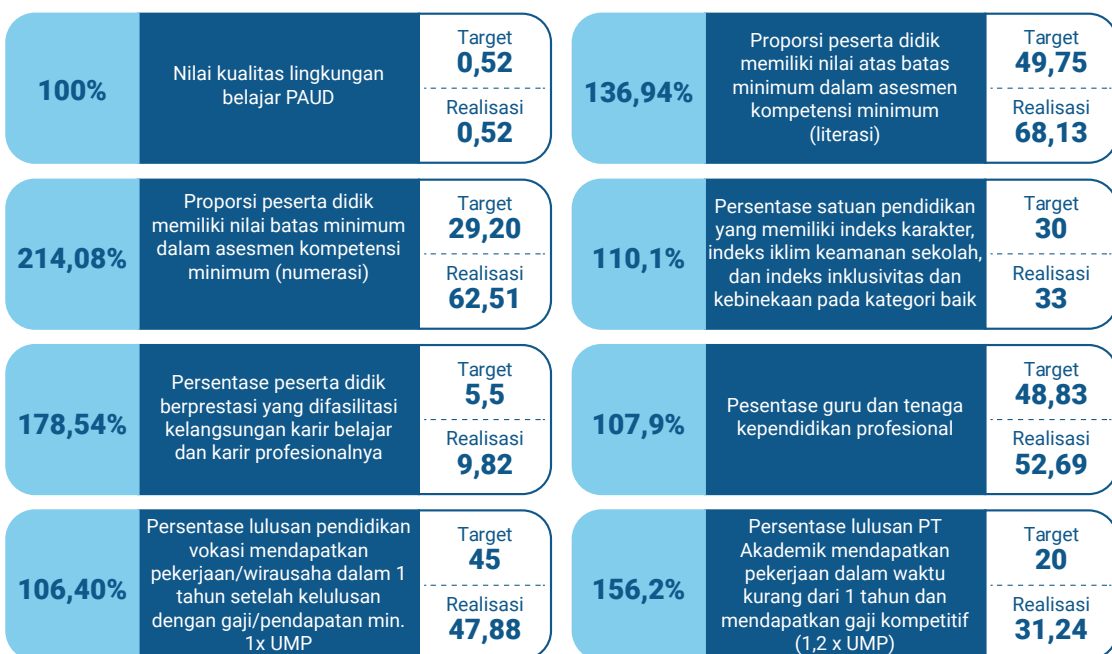
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) 2023



Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang



Meningkatnya kualitas pembelajaran (kompetensi dan karakter) dan relevansi di seluruh jenjang

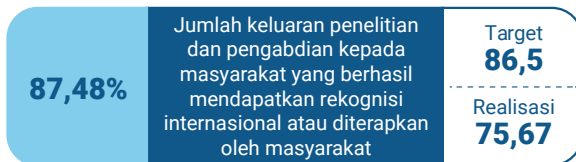




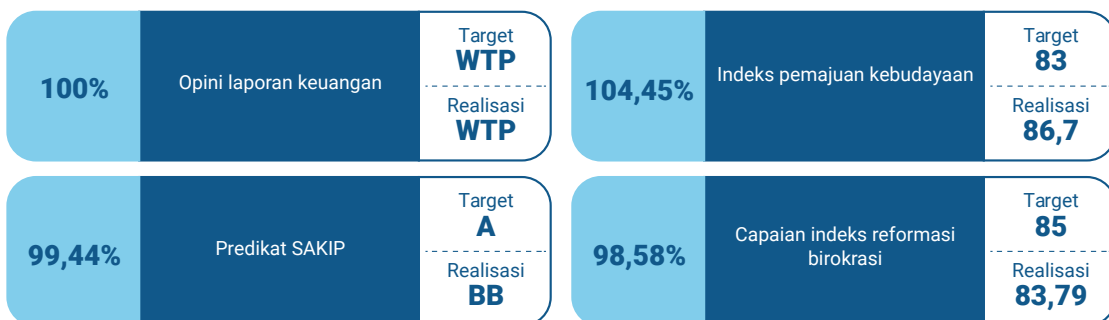
Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan Kebudayaan



Meningkatnya kontribusi Perguruan Tinggi terhadap Riset, Inovasi dan Ilmu Pengetahuan



Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel



PERAN KEMENDIKBUDRISTEK UNTUK MENDUKUNG *MAJOR PROJECT* RPJMN 2020-2024

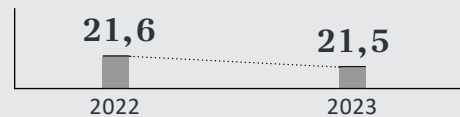
MP
15

Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

- Pelaksanaan program layanan esensial PAUD Holistik Integratif (PAUD HI).
- Kajian dan pengembangan model gizi dan pangan di kawasan Asia Tenggara.
- Pembinaan Lingkungan Sekolah Sehat melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
- Pelatihan Calon Pelatih Pemanfaatan Model bidang Pangan dan Gizi di Kawasan Asia Tenggara.
- Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Stunting bagi GTK PAUD.

Dampak

Angka prevalensi stunting nasional
menurun



(Sumber data: Survei Angkatan Kerja Nasional)

MP
17

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

- Pengembangan SMK Berbasis Industri.
- Pelaksanaan Sertifikasi dan Uji Kompetensi Profesi Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi. Kampus Merdeka Vokasi (Pengembangan Pusat Unggulan Teknologi, Hilirisasi Produk Riset Terapan, dan Startup Kampus Vokasi).
- Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi.

Dampak

Lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan
meningkat



(Sumber data: Survei Angkatan Kerja Nasional)

MP
16

Pembangunan *Science Techno Park* (Optimalisasi *Triple Helix* di 4 Major Universitas)

Pembangunan *Science Techno Park* di 4 Universitas

- Universitas Indonesia (Fokus: Rekayasa Keteknikaan, Kesehatan, dan Energi Baru Terbarukan).
- Institut Pertanian Bogor (Fokus : Pertanian Tropika, Teknologi Pangan, Biosains, Kelautan, dan Gedung Halal).
- Universitas Gajah Mada (Fokus : Kesehatan dan Farmasi, Agro Perkebunan, dan Rekayasa Digital).
- Institut Teknologi Bandung (Fokus : Kecerdasan Buatan, *Internet of Things*, *Virtual Reality*, 5G, dan *Big Data*).

Dampak

- IPB, UI dan UGM membangun gedung STP sebanyak 6 (enam) unit sepanjang periode 2021-2023 (Gedung *Innovation Park* Teknopolis ITB dalam proses pembangunan).
- Peningkatan sistem inovasi dan kemitraan STP: 16 proyek RnD di STP yang mencapai TKT 9, serta 70 produk inovasi yang dihasilkan di tahun 2023.
- Alat penunjang inovasi di STP UI dikembangkan.
- Penguatan kelembagaan STP dimana 25 peneliti.
- Selesai *post doctoral*, 60 staf memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan proyek, kontrak, dan manajemen keuangan, serta 129 staf ditingkatkan pengetahuan dan kompetensinya dalam mengelola STP menjadi *hub Triple-Helix* untuk komersialisasi produk penelitian.

MP
18

Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh



Bantuan sosial pendidikan dasar dan menengah melalui Program Indonesia Pintar (PIP).



Bantuan sosial pendidikan tinggi melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Dampak

Meningkatnya akses layanan pendidikan: APS 7-12 tahun dan 13-15 tahun, APK SMA/SMK/MA/SMLB/ Sederajat dan Perguruan Tinggi.

MP
26

Transformasi Digital



Layanan pendidikan berbasis teknologi melalui platform digital pendidikan Merdeka Belajar.



Pengembangan kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Tinggi yang adaptif, relevan, dan berbasis digital.

Dampak

Kegiatan belajar mengajar lebih optimal serta memudahkan proses administrasi sehingga menjadi lebih akuntabel:

- Tersedianya Platform Digital: Platform Merdeka Mengajar, Platform Kampus Merdeka, Platform Sumber Daya Sekolah, Platform Profil Rapor Pendidikan dan Manajemen Data serta Infrastruktur.
- Tersedianya Platform ARKAS, SIPLah dan TanyaBOS yang membantu Kepala Sekolah mengelola anggaran secara efisien dan akuntabel.
- 79.259 sekolah formal telah menerima bantuan TIK tahun 2020-2023 (Kemendikbudristek dan DAK Fisik).
- 1.382.512 perangkat TIK telah diberikan untuk mendukung program digitalisasi sekolah tahun 2020- 2023.

MP
44

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)



Pembinaan dan Pemberdayaan Inovasi Wirausaha Mahasiswa.



Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) untuk anak usia sekolah tidak sekolah.



Fasilitasi SMK yang mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan.

Dampak

- Meningkatnya lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan/ berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan gaji/ pendapatan minimum 1x UMP, tahun 2023 sebesar 47,88% meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 45,22%.
- Jumlah lulusan PKW yang berwirausaha mengalami kenaikan di tahun 2023 sebanyak 26.135 orang dibandingkan tahun 2022 sebanyak 22.063 orang.
- Pemuda yang bekerja dengan status berusaha meningkat di tahun 2023 sebesar 20,56% jika dibanding tahun 2022 sebesar 19,48%.



BAB III

PROGRAM TEROBOSAN KEMENDIKBUDRISTEK



MERDEKA BELAJAR

Merdeka Belajar merupakan filosofi kebijakan Kemendikbudristek untuk mentransformasi pendidikan guna terwujudnya SDM Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila. Hingga saat ini, sudah terbit 26 Episode Merdeka Belajar yang merupakan program-program terobosan yang informasi lengkapnya dapat diakses di laman merdekabelajar.kemdikbud.go.id.



Episode ke-1: Empat Pokok Kebijakan Merdeka Belajar

Merdeka Belajar meluncurkan 4 kebijakan baru, yaitu:

- Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN): Tahun 2020, USBN diganti dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah
- Ujian Nasional (UN): Tahun 2021, UN digantikan dengan Asesmen Nasional yang mencakup Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar
- Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Guru bebas mengembangkan format RPP
- Fleksibilitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)



Episode ke-2: Kampus Merdeka

Kampus Merdeka adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang memberikan seluruh mahasiswa kesempatan untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai langkah persiapan karier.



Episode ke-3: Perubahan Mekanisme Dana Bantuan BOS

Kemendikbudristek menerapkan arah baru: penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah, penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah, nilai satuan BOS meningkat, dan pelaporan BOS dilakukan secara daring.

Sejak 2023, dengan perubahan kebijakan transfer langsung dan penyederhanaan birokrasi, BOS bisa disalurkan dengan lebih cepat dan akuntabel. Pada awal tahun 2024, penyaluran tahap 1 bisa mencapai 96% sekolah.



Episode ke-4: Program Organisasi Penggerak

Program Organisasi Penggerak adalah program pemberdayaan masyarakat secara masif melalui dukungan pemerintah untuk peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah berdasarkan model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan peran serta Ormas bidang pendidikan yang dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar peserta didik.



Episode ke-5: Guru Penggerak

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) menjadikan kepala sekolah dan pengawas sekolah sebagai mitra Guru Penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah.



Episode ke-6: Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi

Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi bertujuan mempersiapkan perguruan tinggi di Indonesia agar dapat bersaing di tingkat dunia. Peningkatan pendanaan tersebut menysasar tiga tujuan utama:

- Lulusan lebih mudah dapat pekerjaan dan berpenghasilan layak
- Dosen lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan industri
- Kurikulum lebih mengasah keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah



Episode ke-7: Program Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa.



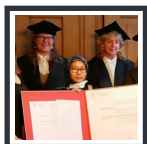
Episode ke-8: SMK Pusat Keunggulan

SMK Pusat Keunggulan (PK) merupakan terobosan komprehensif yang ditujukan untuk menjawab tantangan dalam rangka pembenahan kondisi SMK agar semakin sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Program SMK PK ditujukan untuk memperkuat aspek kepemimpinan sekolah, kualitas guru dan tenaga kependidikan, kualitas pembelajaran, dan fasilitas lingkungan belajar murid SMK.



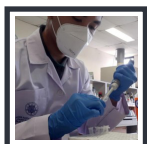
Episode ke-9: KIP Kuliah Merdeka

Program Indonesia Pintar (PIP) Pendidikan Tinggi yang disebut Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program bantuan sosial bidang pendidikan yang menjadi salah satu pendorong peningkatan mobilitas mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik di seluruh Indonesia.



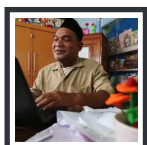
Episode ke-10: Perluasan Program Beasiswa LPDP

Kemendikbudristek dan LPDP berkolaborasi memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan untuk program yang sudah ada (beasiswa pendidikan Indonesia) maupun program-program baru 2021 (Kampus Merdeka, program vokasi, dan program prestasi, dan beasiswa kebudayaan).



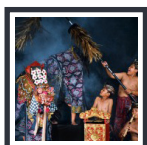
Episode ke-11: Kampus Merdeka Vokasi

Kampus Merdeka Vokasi bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja demi menghasilkan lulusan yang lebih kompeten, produktif, dan kompetitif, sehingga integrasi perguruan tinggi vokasi dengan dunia kerja dilaksanakan melalui *link and match* yang komprehensif.



Episode ke-12: Sekolah Aman Berbelanja dengan SIPLah

Layanan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan (SIPLah) merupakan ekosistem elektronik yang memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk verifikasi data pembeli (kepala satuan pendidikan) dengan para operator pasar daring Pengelola Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Secara teknis laman SIPLah adalah aplikasi berbasis *web* berupa *marketplace* yang memberikan layanan 24 jam secara daring dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun selama terkoneksi dengan internet sehingga sekolah dapat belanja dengan mudah dan aman.



Episode ke-13: Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana

Merdeka berbudaya dengan Kanal Indonesiana merupakan sebuah gerakan dan *platform* yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek untuk mewadahi, mengintegrasikan, dan mempromosikan karya serta apresiasi budaya bangsa. Kanal ini menjadi jembatan bagi para pelaku seni dan budaya untuk menunjukkan karyanya kepada khalayak yang lebih luas, sekaligus menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap budaya Indonesia di kalangan masyarakat.



Episode ke-14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual

Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi terjadi dan seringkali terlindungi karena ada relasi kuasa yang timpang serta pemegang keputusan atau otoritas yang bisa saja tidak menerima dan memproses pelaporan tentang kasus-kasus kekerasan seksual. Kemendikbudristek menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS). Permendikbudristek PPKS hadir sebagai solusi atas berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkup perguruan tinggi.



Episode ke-15: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Kurikulum Merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan Pelajar Pancasila dan menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan Kurikulum Merdeka.



Episode ke-16: Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan

Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan reformasi kebijakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan), dan bantuan Operasional Sekolah (BOS), di mana:

- Nilai satuan biaya BOP PAUD bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah
- Penyaluran BOP PAUD dan BOP Kesetaraan langsung ke satuan pendidikan
- Penggunaan BOP PAUD dan BOP Kesetaraan yang fleksibel
- Perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai aplikasi tunggal



Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah

Revitalisasi bahasa daerah secara umum diartikan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan bahasa daerah kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam komunikasi yang beragam sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut pada taraf aman dan ditransmisikan dengan baik. Kebijakan ini mencakup pengakuan atas pentingnya bahasa daerah dalam bidang pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan digitalisasi. Selain itu, peningkatan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan keluarga akan menjadi pendukung utama pelestarian bahasa daerah.



Episode ke-18: Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana

Dana Indonesiana adalah dana abadi kebudayaan dan digunakan untuk mendukung pemajuan kebudayaan secara stabil dan berkelanjutan. Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebudayaan, memacu kreativitas dan inovasi dalam pengembangan budaya Indonesia, memperkuat ekonomi kreatif melalui pemajuan budaya, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa melalui kebudayaan.



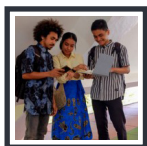
Episode ke-19: Rapor Pendidikan Indonesia

Platform Rapor Pendidikan berisi laporan hasil Asesmen Nasional dan analisis data lintas sektor untuk masing-masing satuan pendidikan dan daerah. Rapor Pendidikan mengintegrasikan berbagai data pendidikan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mengidentifikasi capaian dan akar masalah, melakukan refleksi, serta merancang langkah-langkah pembenahan yang efektif berbasis data.



Episode ke-20: Praktisi Mengajar

Praktisi Mengajar adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia agar lulusan perguruan tinggi lebih siap untuk masuk ke dunia kerja. Pada program ini melibatkan beberapa pihak yaitu Perguruan Tinggi (termasuk program studi dan dosen) dan mahasiswa sampai praktisi dan dunia kerja secara keseluruhan melalui kolaborasi kerja sama.



Episode ke-21: Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT)

Dalam program DAPT, Pemerintah menyediakan pendanaan melalui hasil pengelolaan dana abadi perguruan tinggi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI. Dana abadi perguruan tinggi digunakan untuk peningkatan kualitas dan kinerja tridharma berstandar internasional yang mendukung pengembangan *World Class University* (WCU).



Episode ke-22: Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN)

Arah baru transformasi seleksi masuk PTN dilakukan melalui lima prinsip perubahan, yaitu: mendorong pembelajaran yang menyeluruh, lebih berfokus pada kemampuan penalaran, lebih inklusif dan lebih mengakomodasi keragaman peserta didik, lebih transparan, dan lebih terintegrasi dengan mencakup bukan hanya program sarjana, tetapi juga diploma tiga dan diploma empat/sarjana terapan.



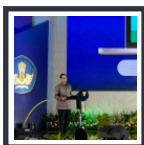
Episode ke-23: Buku Bacaan Bermutu Untuk Literasi Indonesia

Pada 2022, Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai dengan pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang paling membutuhkan. Pada 2024, jumlah ini meningkat menjadi lebih dari 21 juta buku untuk 35.785 SD di 513 kabupaten/kota.



Episode ke-24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Kebijakan Merdeka Belajar Episode 24 menghilangkan tes baca, tulis, hitung (calistung) dalam proses penerimaan peserta didik baru sekolah dasar.



Episode ke-25: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Dunia pendidikan di Indonesia sedang menghadapi banyak tantangan, data dari hasil Asesmen Nasional (AN) Kemendikburistek serta hasil laporan dari KPAI dan KPPA menunjukkan kekerasan masih terus terjadi. Pada 8 Agustus 2023, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim secara resmi meluncurkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbudristek PPKSP).



Episode ke-26: Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi

Sebelumnya, Standar Nasional PT bersifat kaku dan rinci sehingga perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi. Misalnya, syarat kelulusan yang tidak relevan dengan zaman dan alokasi waktu yang diatur sampai per menit per minggu dalam satu satuan kredit semester (sks). Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi memudahkan perguruan tinggi (PT) untuk lebih fokus dalam meningkatkan mutu Tridharma PT, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat.



MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-1

Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah

Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah menjadi substansi Merdeka Belajar episode pertama yang berisi empat program pokok kebijakan dan diluncurkan pada 11 Desember 2019. Empat pokok kebijakan tersebut meliputi ujian sekolah sebagai pengganti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Asesmen Nasional (AN) yang menggantikan Ujian Nasional (UN), Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ujian Sekolah

Dengan hadirnya Merdeka Belajar episode pertama, sejak tahun 2020, ujian sekolah dilaksanakan sebagai pengganti USBN. Ujian sekolah yang bertujuan untuk menilai kompetensi murid dapat dilakukan dalam tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan penugasan seperti tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Penggantian USBN dengan ujian sekolah didasarkan pada pertimbangan bahwa gurulah yang benar-benar mengetahui kemampuan murid. Oleh karena itu, ujian sekolah juga memerdekakan guru dan sekolah dalam mengukur capaian belajar peserta didik.

Asesmen Nasional (AN)

UN yang sebelumnya diikuti oleh peserta didik kelas terakhir di setiap jenjang pendidikan diubah menjadi AN yang terdiri dari Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) literasi dan numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. AN diikuti oleh murid yang duduk di pertengahan masa sekolah (misalnya kelas 5, 8, dan 11) sehingga tidak menentukan ketuntasan belajar. Program ini dirancang untuk menilai kualitas input, proses, dan hasil belajar, yang mencerminkan kinerja satuan pendidikan dan memberikan umpan balik secara objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, pemerintah daerah, dan pusat. Hasil belajar peserta didik mencakup aspek kognitif dan nonkognitif.

Hasil AN juga tidak menjadi persyaratan penerimaan peserta didik di jenjang selanjutnya. Adapun hasil AN digunakan sebagai landasan penentuan kebijakan dan prioritas penanganan sekolah. Sistem asesmen yang baru ini tidak membebani sekolah, peserta didik, maupun orang tua. Sistem AN mengacu pada praktik baik di tingkat internasional yang ditunjukkan melalui pelaksanaan *Program for International Student Assessment (PISA)* dan *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*. Pada tahun 2021, pelaksanaan AN terealisasi di 283.609 satuan pendidikan, dengan rincian 174.698 SD/MI sederajat, 65.676 SMP/MTs sederajat, 23.617 SMA/MA sederajat, dan 19.618 SMK/MAK sederajat.

Peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah menjadi substansi Merdeka Belajar episode pertama yang berisi empat program pokok kebijakan dan diluncurkan pada 11 Desember 2019. Empat pokok kebijakan tersebut meliputi ujian sekolah sebagai pengganti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Asesmen Nasional (AN) yang menggantikan Ujian Nasional (UN), Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Asesmen Nasional, yang diterapkan sejak 2021, menunjukkan tren positif yang ditunjukkan dengan meningkatnya persentase murid yang mencapai kompetensi minimum pada literasi membaca dan numerasi.

Peningkatan ini berkaitan dengan masifnya upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui program Merdeka Belajar meliputi, implementasi Kurikulum Merdeka, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, Merdeka Mengajar, Kampus Mengajar, serta SMK-Pusat Keunggulan. Selain itu, perencanaan program pembelajaran berbasis data hasil asesmen nasional sebelumnya juga berperan penting dalam

meningkatkan kemampuan literasi membaca dan numerasi peserta didik. Penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan penerapan evaluasi yang berkelanjutan membantu guru dalam menyesuaikan pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.

AN telah menjadi indikator pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada literasi membaca, numerasi, karakter, dan lingkungan belajar peserta didik. Selain itu juga bertujuan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan di sektor pendidikan dan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas.

Penyederhanaan RPP

Merdeka Belajar episode pertama juga menyederhanakan RPP sebagai pedoman proses belajar mengajar. Dengan kebijakan baru tersebut, guru memiliki kemerdekaan untuk memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP sesuai dengan kebutuhan. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Sekarang, RPP dapat hanya terdiri dari satu halaman, tidak seperti sebelumnya yang bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Oleh karena itu, kebijakan penyederhanaan RPP ini meringankan beban administrasi para guru dan mendorong guru lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan murid.

Fleksibilitas Kebijakan PPDB

Kemendikbudristek tetap menggunakan sistem zonasi untuk PPDB dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah. Komposisi PPDB jalur zonasi dalam kebijakan baru ini memungkinkan sekolah untuk menerima siswa minimal 50 persen melalui jalur zonasi, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Sementara sisa 0–30 persen untuk jalur prestasi atau disesuaikan dengan kondisi daerah.





MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-2

Kampus Merdeka

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) resmi diluncurkan pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 sebagai terobosan transformasi pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan program-program Kampus Merdeka yang dirintis dan dikelola oleh Kemendikbudristek (*flagship*). Berbagai program diselenggarakan untuk membuka jalan bagi mahasiswa belajar tanpa batas dalam rangka mempersiapkan mereka menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tangguh dan berkontribusi sebagai talenta unggul untuk siap terjun bersaing di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun internasional. Upaya transformasi ini dilakukan dalam rangka merespons tantangan global dan mempersiapkan pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Tahun 2021 merupakan awal perjalanan penyelenggaraan 4 (empat) program *flagship*: Kampus Mengajar (KM), Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM), dan *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA).

Kampus Mengajar

Kampus Mengajar hadir pada tahun 2020 melalui Kampus Mengajar Perintis untuk mengatasi fenomena *learning loss* di Indonesia akibat adanya pandemi

Covid-19. Selanjutnya pada tahun 2021 Kampus Mengajar mulai menerjunkan mahasiswa ke sekolah-sekolah dasar dan menengah, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Kampus Mengajar merupakan program yang memungkinkan mahasiswa menjadi rekan guru dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah. Target peserta program ini adalah mahasiswa dengan latar belakang pendidikan akademik maupun vokasi dari berbagai Perguruan Tinggi tanpa batasan jurusan tertentu.

Selama penugasan mahasiswa ditempatkan di sekolah-sekolah terpilih berdasarkan tingkat literasi dan numerasi yang berasal dari hasil Asesmen Nasional (AN). Kebermanfaatan Kampus Mengajar berfokus pada dua hal. Pertama, keikutsertaan mahasiswa dalam program ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi umum dan kompetensi khusus (*employability skills*), di antaranya aspek kepemimpinan, inisiatif mahasiswa, pemikiran analitis, pemecahan masalah, kreativitas dan inovasi, adaptasi, serta kolaborasi. Kedua, penyelenggaraan program Kampus Mengajar di sekolah juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran terutama pada penguatan literasi dan numerasi siswa di sekolah sasaran. Lepas dari kedua aspek yang telah disebutkan sebelumnya, program Kampus Mengajar



juga membuka ruang-ruang kolaborasi antar pihak dan institusi yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB)

Program ini merupakan salah satu program *flagship* yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara ketersediaan SDM berkualitas dengan permintaan industri. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa jenjang akademik dan vokasi dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada dibawah koordinasi Kemendikbudristek. Selama melaksanakan program MSIB, mahasiswa diberikan ruang untuk melakukan eksplorasi, melengkapi teori yang telah diperoleh dan dikuasai di kelas dengan pengalaman praktik di tempat kerja yang komprehensif antara teori dan praktik, sehingga secara nyata dapat meningkatkan daya saing alumni MSIB.

Kebermanfaatan Program MSIB mampu memberikan gambaran tentang Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) sehingga mahasiswa berkesempatan langsung pengalaman dalam berkontribusi di dunia kerja. Luaran dari program ini diharapkan mampu membantu meningkatkan kesiapan dan keterserapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja, menjadi medium bagi DUDI dan organisasi untuk memperoleh talenta yang sesuai dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan budaya organisasi, serta terbentuknya jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi.

Pertukaran Mahasiswa Merdeka

Melalui jargon “Bertukar Sementara, Bermakna Selamanya”, program ini berhasil memacu semangat para peserta mahasiswa untuk menorehkan berbagai cerita baik tentang keunikan proses pertukaran budaya serta diseminasi nilai-nilai toleransi yang dipelajari dan dimaknai selama mengikuti program. Melalui PMM, mahasiswa akademik dan vokasi dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan geografis diberikan kesempatan yang sama untuk mengalami kualitas pendidikan yang lebih tinggi dengan memungkinkan mereka untuk mendaftar di perguruan tinggi terbaik

yang berlokasi di luar pulau asal mereka. Selain tujuan akademik, Pertukaran Mahasiswa Merdeka juga menekankan pada keterlibatan dan pertukaran budaya antar peserta dengan mahasiswa di Perguruan Tinggi Penerima (PTP), yang mengarah pada pluralisme dan penanaman nasionalisme.

Melalui mata kuliah Modul Nusantara, mahasiswa diarahkan untuk dapat mempelajari budaya lokal di PTP, dan juga mengajarkan budaya asli mereka ke rekan-rekan barunya melalui berbagai aktivitas Kebinekaan, Inspirasi, Refleksi, dan Kontribusi Sosial. Keberadaan Pertukaran Mahasiswa Merdeka dalam jajaran program *flagship* Kampus Merdeka berusaha untuk mengadvokasi dua tujuan penting pendidikan Indonesia, yakni: (1) mengupayakan kesetaraan pendidikan, dan (2) menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda Indonesia. Terbangunnya kerja sama antar-perguruan tinggi dalam negeri juga menjadi implikasi positif dari penyelenggaraan program.



Program Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)

Program IISMA bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan bagi mahasiswa Sarjana semester 4—6 untuk menempuh perkuliahan di perguruan tinggi terkemuka di luar negeri yang menjadi mitra Kemendikbudristek, dalam bentuk beasiswa. Program IISMA memberikan kesempatan bagi mahasiswa belajar dan memperoleh pengalaman bekerja dalam industri di mitra luar negeri sekaligus meningkatkan jejaring sosial mahasiswa dalam kancah internasional. Mahasiswa juga melaksanakan peran penting sebagai duta bangsa yang memperkenalkan nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia ke seluruh penjuru dunia.

Wirausaha Merdeka (WMK)

Memasuki tahun 2022, program *flagship* semakin berkembang dengan bertambahnya 2 program baru yaitu Wirausaha Merdeka (WMK) dan Praktisi Mengajar (PM). PM menjadi bagian dari program Merdeka Belajar Episode ke-20. Program Wirausaha

Merdeka adalah inisiatif strategis yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Program ini tidak hanya mencetak lulusan yang siap kerja, tetapi juga lulusan yang siap menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, Program WMK dirancang untuk memberikan pengalaman praktis dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengembangkan usaha mandiri.

Ragam aktivitas pembelajaran dalam program WMK memberikan pengalaman empiris pada mahasiswa dalam berwirausaha, di antaranya melalui kegiatan pembelajaran berwirausaha mulai dari *idea generation, mentoring, onboarding* di UKM, *bootcamp, produk prototipe, investment summit* sampai dengan melakukan pemasaran dan menjual produk kepada masyarakat umum melalui *Expo WMK*. Selain mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja secara komprehensif, program WMK juga mampu mendorong daya kerja mahasiswa. Harapannya, setelah mengikuti rangkaian aktivitas tersebut, pola pikir dan kompetensi dasar mahasiswa dalam bidang kewirausahaan semakin terbentuk.

Kampus Merdeka Mandiri (KMM)

Dari tahun ke tahun, program-program Kampus Merdeka terus berkembang. Pada tahun 2023, Program Kampus Merdeka Mandiri (KMM) dibentuk dan didorong sebagai upaya bagi Perguruan Tinggi untuk melaksanakan inisiatif mandiri dalam menjalankan program-program yang selaras dengan semangat Kampus Merdeka. KMM bertujuan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih fleksibel, inovatif, dan mandiri bagi mahasiswa, dosen, serta institusi pendidikan tinggi.

Melalui KMM, diharapkan program ini dapat tumbuh secara organik dan mandiri secara berkelanjutan, juga mampu menjawab tuntutan akan penyiapan SDM bidang Wirausaha yang unggul dan siap bersaing di tingkat global semakin tinggi. Selain berkembang secara mandiri, program *flagship* yang



juga turut melakukan inovasi penerimaan peserta adalah program IISMA melalui IISMA Afirmasi. Meski proses penerimaan peserta IISMA Afirmasi tetap menjadi bagian dari jalur penerimaan IISMA Reguler, namun skema ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berada di wilayah 3T untuk dapat merasakan pengalaman pendidikan di kampus-kampus di luar negeri, sehingga dapat bersaing secara global.

Pengembangan Lainnya

Pada 2024, pengembangan program Kampus Merdeka semakin membuka pintu bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan wirausaha di tingkat global melalui Program IISMA Entrepreneur (IISMA-E). Skema beasiswa mobilitas internasional ini secara khusus ditujukan bagi mahasiswa sarjana dan vokasi yang berjiwa wirausaha, sehingga memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu selama enam minggu hingga dua bulan di sekolah bisnis terbaik di seluruh dunia.

Bukan hanya itu, program IISMA Mandiri juga dihadirkan untuk memenuhi tingginya animo peserta program IISMA. Dengan semua pencapaian dan pengembangan yang dilakukan sampai dengan tahun 2024 ini, MBKM sebagai pendorong keberhasilan transformasi pendidikan tinggi di Indonesia telah terbukti secara nyata memberikan dampak signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan. Kampus Merdeka telah berhasil memberikan dampak bagi lebih dari 1,3 juta mahasiswa, lebih dari 1.000 perguruan tinggi, dan 5.200 mitra dunia usaha dan dunia industri. Implementasi MBKM telah nyata memberikan dampak positif di berbagai aspek.

Capaian

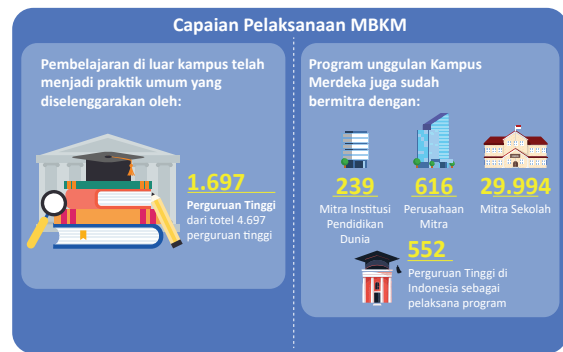
a. Kesempatan Belajar di Luar Kampus

Untuk pertama kali, semua mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta diberikan hak untuk belajar di luar kampus selama 2 semester. Jenis kegiatan belajar yang dapat dilakukan adalah magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar di

satuan pendidikan, penelitian, wirausaha, proyek kemanusiaan, membangun desa, dan kegiatan studi independen lainnya.

b. Perluasan Praktik Pembelajaran di Luar Kampus dan Kemitraan Kampus Merdeka

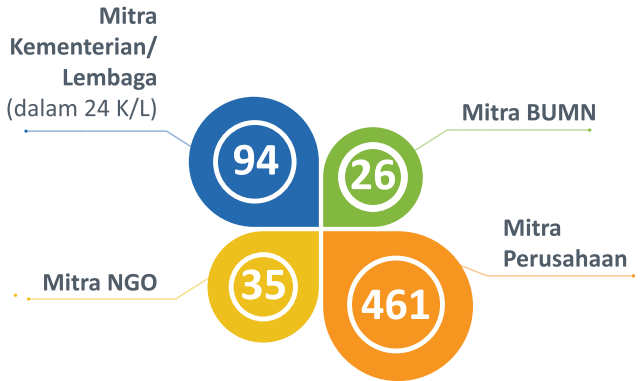
Pembelajaran di luar kampus telah menjadi praktik umum yang diselenggarakan oleh 1.697 dari total 4.697 perguruan tinggi. Sebelumnya, praktik ini hanya diselenggarakan oleh perguruan tinggi besar. Selain itu, program unggulan Kampus Merdeka juga sudah bermitra dengan 239 Institusi Pendidikan Dunia, 616 Perusahaan Mitra, 29.994 Mitra Sekolah, dan 552 Perguruan Tinggi di Indonesia sebagai pelaksana program.



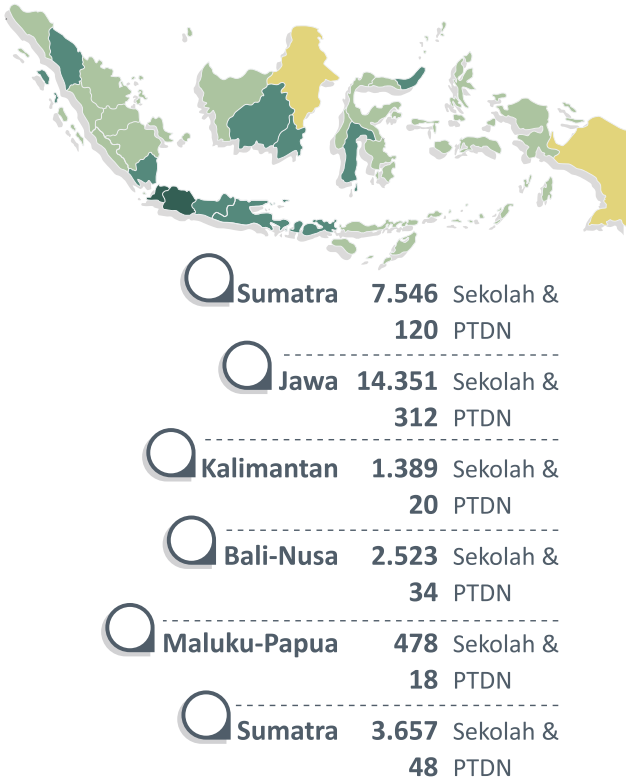
Sebaran jenis Luar Negeri



Sebaran jenis mitra industri



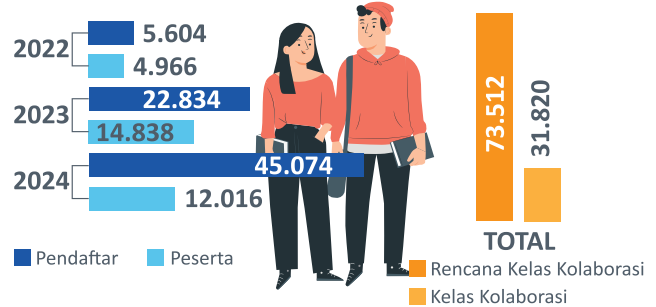
Sebaran jenis mitra Dalam Negeri



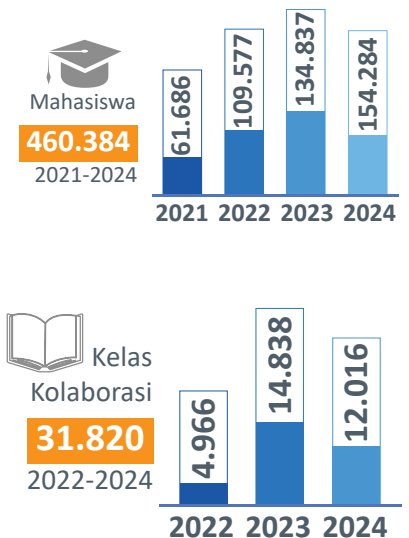
c. Diminati Kalangan Mahasiswa

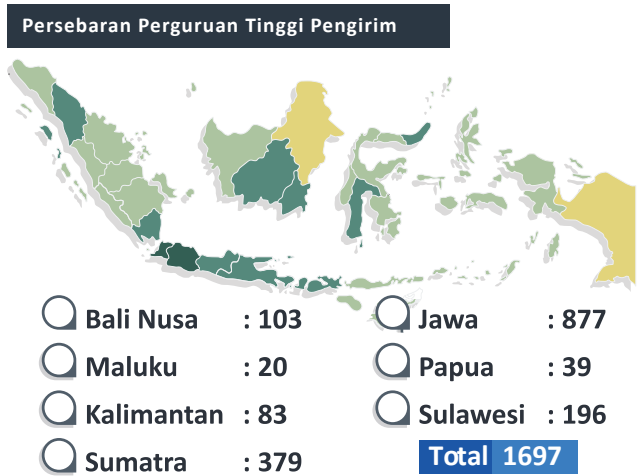
Pembelajaran di luar kampus terbukti sangat populer di kalangan mahasiswa. Sejak 2020 sudah lebih dari 1,3 juta mahasiswa yang mendaftar di program-program yang disubsidi Kemendikbudristek. Dan sudah ada lebih dari 1,55 juta mahasiswa yang mengikuti program-program yang tidak disubsidi Kemendikbudristek (program mandiri). Kemendikbudristek juga senantiasa memastikan bahwa program Kampus Merdeka dapat diakses oleh mahasiswa dan perguruan tinggi di seluruh penjuru negeri dengan persebaran asal perguruan tinggi mahasiswa di luar Jawa mencapai 49%.

Jumlah rencana kelas kolaborasi yang diminati oleh praktisi dan jumlah kelas kolaborasi yang terealisasi



Capaian Penerima Manfaat MBKM 2021-2024





d. Peroleh Pekerjaan Lebih Cepat dan Upah Lebih Tinggi

Banyak mahasiswa dengan pengalaman belajar di luar kampus berhasil memperoleh pekerjaan lebih cepat dan upah lebih tinggi. Lulusan yang pernah mengikuti program belajar di luar kampus yang disubsidi Kemendikbudristek mengalami waktu tunggu kerja 2,36 bulan lebih cepat dibandingkan yang tidak mengikuti program. Hal tersebut mengindikasikan bahwa mereka lebih mendapatkan apresiasi dari dunia kerja. Dalam perspektif lainnya, rata-rata gaji utama dari alumni yang pernah mengikuti program belajar di luar kampus yang disubsidi oleh Kemendikbudristek mencapai 73,9% lebih tinggi jika dibandingkan dengan data Sakernas.

e. Peluang Magang di Perusahaan Terbaik Terbuka

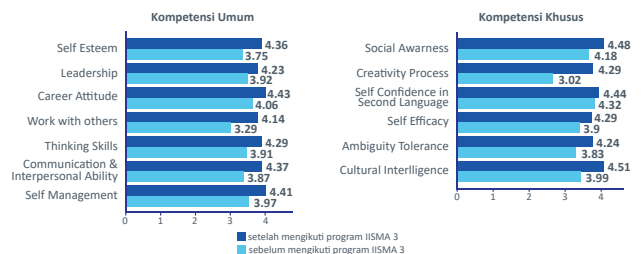
Setiap tahunnya, program MSIB terus berkembang dengan peningkatan jumlah peserta dan pendaftar yang signifikan. Pada 2024, jumlah pendaftar mengalami lonjakan drastis sebesar 89% dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan minat yang semakin tinggi dari mahasiswa untuk bergabung dalam program ini. Selain itu, tingkat penerimaan peserta MSIB, khususnya untuk mahasiswa afirmasi dan mahasiswa tidak mampu juga telah meningkat hingga 5 kali lipat dibandingkan pada awal pelaksanaan program. Program MSIB merupakan program yang berpotensi memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan

mobilitas vertikal. Melalui program MSIB mahasiswa mendapat kesempatan belajar di dunia kerja dalam supervisi mentor berpengalaman. Mahasiswa jadi memiliki kesempatan untuk melanjutkan karir setelah lulus di perusahaan dimana mereka magang (golden ticket). Jejaring kemitraan magang Kemendikbudristek terus meningkat hingga ada lebih dari 360+ perusahaan yang aktif membuka kesempatan magang dalam satu semester.

f. Terbukanya Akses ke Perguruan Tinggi Terbaik Dunia

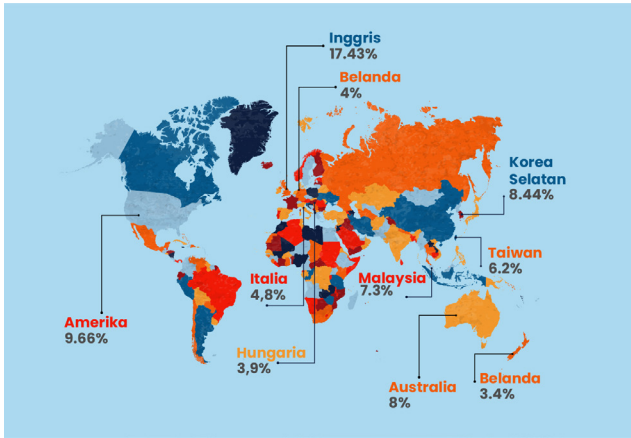
Akses ke perguruan tinggi terbaik di dunia menjadi lebih terbuka karena program IISMA. Kemitraan Kemendikbudristek dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) yang termasuk dalam *QS 100 World University Rankings* terus meningkat dari 19 PTLN pada IISMA angkatan pertama di tahun 2021 hingga 43 PTLN pada tahun 2024, termasuk terjalannya kerja sama dengan Yale University, University of Chicago, University College London (UCL) dan PTLN top lainnya. Sampai saat ini, 7.317 mahasiswa dari 233 Perguruan Tinggi Dalam Negeri telah belajar di 239 Perguruan Tinggi Luar Negeri yang tersebar di 36 negara dan 5 benua. Ketika selesai program, mahasiswa telah mendapatkan *international exposure* sehingga mampu mendorong peningkatan *self-value* mahasiswa dan menumbuhkan keinginan untuk berkontribusi dalam negeri, terutama di daerah asal. Selain itu, bagi perguruan tinggi program IISMA dapat meningkatkan reputasi dan jejaring di kancah internasional.

Peningkatan Kompetensi Mahasiswa & Probabilitas Kontribusi ke Daerah Asal Berdasarkan Survei

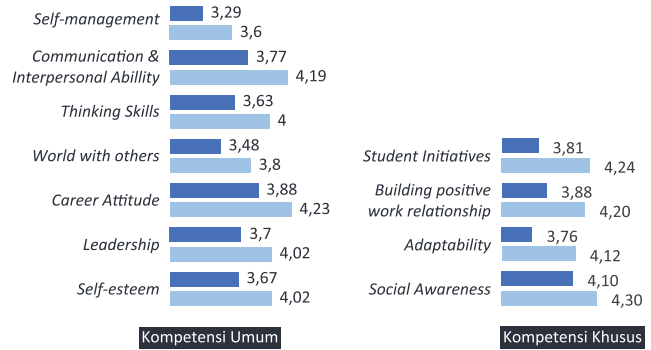


Individu yang merasakan dampak sosial dan ekonomi dari IISMA, terutama dari keluarga kurang mampu, cenderung memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi pada daerah asal mereka

Sebaran Mahasiswa IISMA 2023



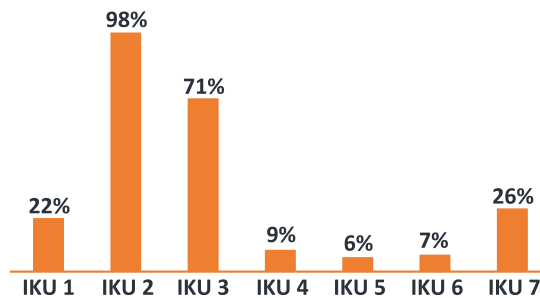
Peningkatan Kompetensi Mahasiswa



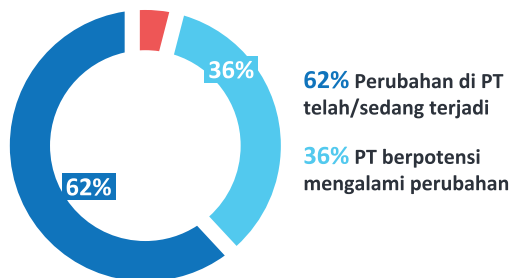
g. Peluang Berperan sebagai Mitra Guru

Program Kampus Mengajar telah memberikan peluang kepada lebih dari 154.000 mahasiswa untuk berperan sebagai mitra guru di lebih dari 31.000+ sekolah, mulai dari SD hingga SMK, dengan 52% dari sekolah-sekolah tersebut berada di luar pulau Jawa. Program ini juga memprioritaskan mahasiswa dari luar pulau Jawa, dimana 49,24% pesertanya berasal dari wilayah luar pulau Jawa dan 75% dari program studi Kependidikan. Kepesertaan program KM yang melibatkan mahasiswa dari berbagai elemen latar belakang sosio-ekonomi menunjukkan sisi inklusivitas program. Program KM memiliki dampak sosial yang paling luas bagi seluruh pihak (*multitude beneficiaries*). Mahasiswa KM mampu berperan untuk mempercepat penyaluran ilmu dan inovasi pembelajaran yang berdampak pada peningkatan motivasi belajar siswa dan peningkatan kompetensi guru di sekolah penempatan.

Manfaat Kampus Merdeka dalam Ketercapaian IKU



Dampak Kelembagaan Terkait Penyesuaian Tata Kelola di Perguruan Tinggi (PT)



Nilai Kebermanfaatn Kampus Mengajar

Kerja sama/MoU	Perguruan Tinggi	Rp55.395.275.000
Peningkatan Kompetensi Sekolah	Sekolah Penugasan	Rp290.048.520.424
Peningkatan Kompetensi Mahasiswa	Mahasiswa	Rp30.142.195.020
TOTAL		Rp320.190.715.444

h. Pengalaman Belajar dan Kolaborasi Lintas Disiplin

Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka memberikan pengalaman belajar dan berkolaborasi lintas disiplin dan kultur bagi mahasiswa dari seluruh penjuru negeri. Hingga tahun 2024, lebih dari 55.000 mahasiswa dari lebih dari

750 perguruan tinggi di seluruh Indonesia telah mengikuti program pertukaran antar pulau, dengan 70% mahasiswa peserta program berasal dari luar pulau Jawa. Pada kepesertaan PMM 4 tahun 2024, 16,74% atau sebanyak 2000 lebih mahasiswa melakukan mobilitas menuju Universitas Top 10 Indonesia (QS WUR 2025). Inklusivitas program juga terlihat dari 49,2% mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu, dan 28,5% peserta merupakan penerima beasiswa. Dalam hal ini program PMM berpengaruh terhadap peningkatan rasa nasionalisme mahasiswa dengan adanya dorongan untuk bermigrasi dan berinteraksi dengan budaya daerah lain.

i. Pantik Minat dan Semangat Berwirausaha

Program Wirausaha Merdeka berfokus pada pemberian pengalaman wirausaha bagi mahasiswa melalui pembekalan dan pendampingan oleh mentor dari UMKM atau industri untuk memantik minat dan semangat mahasiswa dalam berwirausaha, menanamkan *mindset* dan kompetensi dasar bidang wirausaha, serta membantu meningkatkan daya kerja dan kualitas lulusan. Mahasiswa peserta program Wirausaha Merdeka akan mendapatkan materi pembelajaran kewirausahaan, membuat ide bisnis, melakukan *prototyping*, dan inkubasi bisnis yang terdiri dari *coaching* pengembangan produk dan *market analysis*. Hingga tahun 2024, sebanyak 36.438 mahasiswa dari 700+ perguruan tinggi telah mengikuti kegiatan pelatihan wirausaha bersama 44 perguruan tinggi penyelenggara kegiatan wirausaha terbaik, praktisi wirausaha, dan UKM.

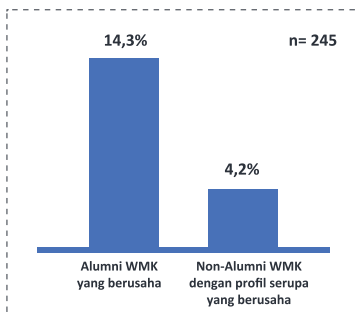
Pelaksanaan seluruh program *flagship* MBKM secara signifikan memberikan dampak yang luar biasa pada seluruh aspek, baik dari dampak sosial ekonomi, dampak kelembagaan baik bagi pihak perguruan tinggi maupun stakeholders yang terlibat, hingga dampak kompetensi peserta program. Adapun capaian dampak dan kebermanfaatan program *flagship* MBKM adalah sebagai berikut.

Nilai potensi kebermanfaatan program

Indikator Kebermanfaatan	Rincian	Nilai Kebermanfaatan
Kebermanfaatan pelatihan kewirausahaan	Secara rata-rata dari 4,189 peserta <i>willingness to pay</i> program WMK2 sebesar Rp9,8 juta	Rp41,2 miliar
Kebermanfaatan lapangan kerja dan kenaikan aktivitas ekonomi	32,2% dari 4.189 peserta WMK berniat untuk berwirausaha setelah lulus.	Total lapangan kerja tercipta: 24.161 (rata-rata ~27lapangan kerja tiap wirausahawan) Total output tahunan setelah 5 tahun: Rp350,8 miliar (rata-rata ~Rp284 juta tiap wirausahawan)

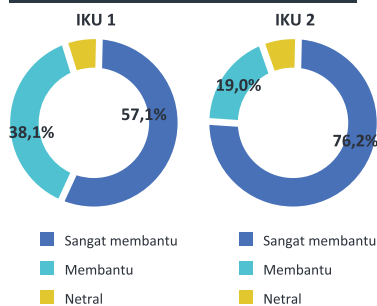
Keterangan: Nilai kebermanfaatan langsung dari WMK2 yang dirasakan oleh peserta sebesar Rp41,2 miliar, secara rata-rata kebermanfaatan sebesar Rp9,8 juta tiap mahasiswa. Ini lebih besar dari *unit cost* yang dikeluarkan sebesar Rp7,5 juta (maksimum).

Peluang Berwirausaha



Alumni WMK 3,4 kali lebih berpeluang untuk berwirausaha setelah lulus dibandingkan dengan lulusan non-MBKM dengan profil serupa.

Manfaat ketercapaian IKU



Mayoritas Ketua Tim pengelola PTP menyatakan bahwa program WMK membantu mencapai IKU 1 (95,2%) dan IKU 2 (95,2%). Menurutny program WMK layak direkomendasikan untuk diikuti mahasiswa (80,9%)

j. Lebih dari Satu Juta Mahasiswa Ikuti MBKM Mandiri

Sejak implementasi MBKM Mandiri di tahun 2021 sebanyak 1.004.277 mahasiswa telah mengikuti kegiatan kampus merdeka yang dikelola oleh perguruan tingginya sendiri dengan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran (BKP), seperti pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar, riset/penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, proyek/studi independen, membangun desa/KKN tematik dan pembinaan kesadaran bela negara. Mahasiswa tersebut berasal dari 1.166 Perguruan tinggi di seluruh Indonesia dan 6.165 program studi.

Capaian pelaksanaan MBKM Mandiri

Sejak 2021



sebanyak 1.004.277

mahasiswa telah mengikuti MBKM Mandiri

Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP)



Pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar, riset/penelitian, proyek kemanusiaan, kewirausahaan, proyek/studi independen, membangun desa/KKN tematik dan pembinaan kesadaran bela negara






1.166
Perguruan Tinggi






6.165
Program Studi



Penyelenggaraan MBKM terbukti mampu mendorong terjadinya tata kelola perguruan tinggi, bersifat inklusif, dan berdampak untuk seluruh pihak

			
Dampak Ekonomi Sosial	<p>Mobilitas vertikal: 41.0% mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu dan 80,5% peserta merupakan penerima beasiswa.</p> <p>Peluang untuk melanjutkan karir di perusahaan/instansi mitra MSIB: 7,2% mahasiswa menerima tawaran untuk mengerjakan proyek, 9,7% untuk mengikuti seleksi pegawai, dan 6,6% mendapat penawaran bekerja langsung tanpa seleksi</p> <p>Nilai potensi kebermanfaatn program mencapai Rp 264,5 miliar, dengan perhitungan nilai manfaat pada inovasi berdampak, pengganti program MT, peningkatan kompetensi hardskill dan softskill, kerjasama/MoU, serta kenaikan gaji</p>	<p>Inklusivitas: 56,11% mahasiswa berasal dari keluarga berpendapatan rendah, dan 26,4% mahasiswa merupakan penerima beasiswa</p> <p>Nilai potensi kebermanfaatn program mencapai Rp 320 Miliar, dengan perhitungan nilai manfaat pada kerjasama/Mou, peningkatan kompetensi guru di sekolah, dan peningkatan kompetensi mahasiswa.</p> <p>Dampak sosial yang paling luas (bagi siswa, guru, kepala sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah)</p>	<p>IISMA berkontribusi memberikan international exposure bagi mahasiswa Indonesia sehingga mampu mendorong peningkatan <i>self-value</i> mahasiswa, dan menumbuhkan keinginan untuk berkontribusi di dalam negeri, terutama di daerah asal.</p>
Dampak Kelembagaan	<p>Bagi Perguruan Tinggi: Ketercapaian IKU 1, IKU 2, dan IKU 3; Penyesuaian kurikulum, kepegawaian, dan kemahasiswaan pada PT/prodi; Kerja sama dengan mitra DUDI; Sarana branding/promosi Perguruan Tinggi ke masyarakat/public</p> <p>Bagi Mitra: Inovasi berdampak peserta Program MSIB dengan rata-rata valuasi mencapai Rp 4,2 juta setiap mahasiswa (total valuasi mencapai Rp 4,3 Miliar); meningkatkan <i>value added</i></p>	<p>Bagi Perguruan Tinggi: Ketercapaian IKU 2 dan IKU 3; Kerjasama yang terjalin antara PT dan sekolah, maupun dengan Pemda; Penyesuaian kurikulum, kepegawaian, dan kemahasiswaan pada PT/prodi; Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengabdian masyarakat)</p> <p>Bagi Sekolah: peningkatan capaian pembelajaran, terjadi perubahan, perbaikan, dan/atau inovasi kurikulum; peningkatan motivasi siswa</p>	<p>Bagi Perguruan Tinggi Pengirim: Potensi Kerjasama dengan <i>host university</i>; Meningkatkan reputasi PT/Prodi; Pencapaian IKU 2 dan IKU 6; Memperluas jejaring</p> <p>Bagi Host University: Potensi kolaborasi akademik; kolaborasi jangka Panjang; visitasi</p>
Dampak Kompetensi	<p>Kompetensi <i>employability</i> mahasiswa meningkat, terutama kemampuan teknis (<i>hardskill</i>), etika profesional (<i>professional ethics</i>), dan <i>problem solving</i></p>	<p>Peningkatan <i>employability skills</i> dan kompetensi khusus terutama <i>student Initiatives</i>, kerjasama, kemampuan adaptasi, dan <i>social awareness</i></p>	<p>Peningkatan <i>employability skills</i> dan kompetensi khusus, yaitu kompetensi efikasi diri, kepekaan sosial, kecerdasan budaya, toleransi terhadap ambiguitas, keterlibatan proses kreatif, dan kepercayaan diri dalam bahasa asing</p>

Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

		
<p>Inklusivitas dan mobilitas vertikal: 49,2% Mahasiswa berasal dari keluarga kurang mampu, dan 28,5% peserta merupakan penerima beasiswa.</p> <p>Kesempatan berkuliah di PT luar pulau menunjang kesetaraan pendidikan. 16,74% mahasiswa melakukan mobilitas menuju Universitas Top 10 Indonesia (QS WUR 2025).</p> <p>Potensi adanya penyebaran tenaga kerja high skilled yang lebih merata, dengan munculnya keinginan untuk berkontribusi di daerah asal</p> <p>Menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda</p> <p>Nilai potensi kebermanfaatan program mencapai Rp 24,3 miliar, dengan perhitungan nilai manfaat pada kerjasama/MoU dan peningkatan kompetensi mahasiswa</p>	<p>Mobilitas vertikal: 47,8% mahasiswa peserta WMK berasal dari keluarga kurang mampu</p> <p>Terciptanya lapangan pekerjaan dan naiknya aktivitas ekonomi</p> <p>Kenaikan intensi orang di sekitar mahasiswa peserta (peer group) untuk ikut berwirausaha</p>	<p>Potensi adanya mobilitas vertikal</p> <p>Nilai potensi kebermanfaatan program mencapai Rp 236,4 miliar, dengan perhitungan nilai manfaat pada kerjasama/Mou, dan peningkatan kompetensi mahasiswa</p> <p>Mempertemukan mahasiswa dengan calon pemberi kerja dalam pangkalan bakat (talent pool), dimana 69,0% mahasiswa mendapatkan tawaran magang, dan 72,0% mendapatkan tawaran pekerjaan di perusahaan asal praktisi.</p>
<p>Bagi Perguruan Tinggi: Ketercapaian IKU 2, IKU 3, dan IKU 7 Perguruan Tinggi; Penyesuaian kurikulum, kepegawaian, dan kemahasiswaan pada PT/prodi; Terjadinya kerjasama antara Perguruan Tinggi Pengirim dengan Perguruan Tinggi Penerima, dan potensi bertambahnya kerjasama yang terjalin.</p>	<p>Bagi Perguruan Tinggi: Ketercapaian IKU 1 (pekerjaan layak, menjadi wirausaha) dan IKU 2 (pengalaman di luar kampus)</p>	<p>Bagi Perguruan Tinggi: ketercapaian IKU 1, IKU 4, dan IKU 7; Penyesuaian kurikulum, kepegawaian, dan kemahasiswaan pada PT/prodi; peningkatan <i>link & match</i> perguruan tinggi dan dunia industri</p> <p>Bagi Mitra: potensi praktisi merekrut mahasiswa PM ke perusahaan/ institusi dan potensi kerja sama dengan perguruan tinggi</p>
<p>Peningkatan <i>employability skills</i> (terutama <i>communication and interpersonal ability, Self management, Self esteem</i>) dan kompetensi khusus terutama manajemen waktu, <i>system thinking, social awareness</i>, dan nasionalisme.</p>	<p>Peningkatan kompetensi mahasiswa terkait dengan <i>employability skills</i> (kompetensi umum) dan kompetensi khusus (perilaku wirausaha, niat berwirausaha, efikasi diri wirausaha, kemampuan dan mindset wirausaha).</p>	<p>Program PM berhasil meningkatkan indeks kompetensi umum dan indeks kompetensi khusus mahasiswa, terutama pada aspek <i>problem solving</i> dan <i>creative process engagement</i>.</p>

MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-3

Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS

Kebijakan Merdeka Belajar Episode 3 menjadi salah satu tonggak penting dalam upaya mereformasi kebijakan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Indonesia. Latar belakang dari reformasi ini didasari oleh berbagai kondisi yang selama bertahun-tahun menghambat efektivitas penggunaan dana BOS di sekolah-sekolah, terutama dalam hal penyaluran dan penggunaannya. Ada sejumlah kondisi yang melatarbelakangi kebijakan ini.

Pertama, penyaluran Dana BOS yang sering kali terlambat, hingga Maret atau April setiap tahunnya. Akibatnya, banyak sekolah mengalami kekosongan anggaran selama tiga hingga empat bulan di awal tahun ajaran. Kedua, keterlambatan ini memaksa banyak kepala sekolah untuk menalangi biaya operasional sekolah dari dana pribadi mereka atau sumber lain yang kurang stabil. Kondisi ini jelas memengaruhi kinerja sekolah, karena ketidakpastian anggaran awal tahun menjadi penghalang bagi keberlangsungan operasional sekolah secara efektif. Ketiga, keterlambatan dana BOS juga berdampak langsung pada proses pembelajaran siswa. Keterbatasan anggaran menyebabkan terganggunya berbagai program pembelajaran, terutama di sekolah-sekolah yang mengandalkan dana BOS sebagai sumber utama untuk operasional harian.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Kebijakan Merdeka Belajar Episode 3 menginisiasi empat reformasi penting terkait pengelolaan Dana BOS. Pertama, penyaluran Dana BOS kini dilakukan langsung ke rekening satuan pendidikan, tanpa melalui perantara pemerintah daerah, sehingga mempercepat proses pencairan. Kedua, satuan biaya Dana BOS ditingkatkan untuk lebih menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah-sekolah di berbagai wilayah. Ketiga, penggunaan Dana BOS menjadi lebih fleksibel, memungkinkan sekolah untuk memanfaatkan dana



tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing, selama tetap berada dalam koridor regulasi yang ada. Keempat, pelaporan penggunaan Dana BOS diperketat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Capaian

Sejak implementasi kebijakan ini, berbagai capaian dan inovasi telah dicatat. Berdasarkan hasil penelitian dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak) pada tahun 2020, kebijakan baru ini telah berhasil mengurangi keterlambatan penyaluran Dana BOS sebesar 32%, atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2019. Penyaluran langsung ke rekening sekolah juga mendapatkan

respons positif dari para penerima manfaat. Sebanyak 85,5% responden dari sekolah dan 96,1% responden dari pemerintah daerah menyatakan bahwa kebijakan ini sangat memudahkan mereka. Selain itu, fleksibilitas

Kebijakan ini terus mengalami akselerasi, termasuk peningkatan satuan biaya BOS yang kini majemuk sesuai dengan karakteristik daerah. Sebagai contoh, rata-rata peningkatan satuan biaya mencapai 12%-

13% pada tahun 2021, 14%-15% pada tahun 2022, dan untuk daerah khusus seperti daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T), peningkatan satuan biaya mencapai 12%-27% pada tahun 2025 untuk jenjang SD hingga SMA.

Capaian-capaian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar Episode 3 telah menjadi terobosan signifikan dalam memperbaiki pengelolaan Dana BOS. Keberhasilan ini berkat kolaborasi Kementerian

Selama tahun 2020-2024, Kemendikbudristek melakukan transformasi kebijakan program Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang lebih berkeadilan dan berpihak pada satuan pendidikan





	Penyaluran Dana BOSP langsung ke rekening satuan pendidikan	Puslitjak (2020) <ul style="list-style-type: none"> Mengurangi keterlambatan sebesar 32% atau sekitar tiga minggu lebih cepat dibandingkan tahun 2019 85,5% responden sekolah dan 96,1% responden pemerintah daerah memandang penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah memudahkan atau sangat memudahkan
	Nilai Satuan Biaya Dana BOSP bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah	Litbang Kompas (2021) <ul style="list-style-type: none"> 84,1% responden sekolah setuju dengan kebijakan satuan biaya BOS bervariasi
	Penggunaan Dana BOSP yang lebih fleksibel	Puslitjak (2020) <ul style="list-style-type: none"> 81,4% responden sekolah dan 92,9% responden pemerintah daerah memandang fleksibilitas penggunaan BOS memudahkan atau sangat memudahkan
	Penerapan sistem teknologi yang terintegrasi dengan sistem Pemerintahan Daerah	Oliver Wyman (2023) <ul style="list-style-type: none"> 75% responden dari seluruh wilayah mengakui kemampuan platform ARKAS dalam menyederhanakan proses dan menghemat waktu 67% responden mengakui platform ARKAS telah memberikan pengalaman positif berupa rasa aman

penggunaan Dana BOS juga dinilai membantu oleh 81,4% sekolah dan 92,9% pemerintah daerah, yang merasa bahwa dana tersebut kini dapat digunakan secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan spesifik di lapangan.

Tidak hanya itu, pada tahun 2024, penyaluran Dana BOS mencapai capaian terbaik sepanjang sejarah dengan 96% satuan pendidikan menerima Dana BOS pada bulan Januari, memastikan sekolah-sekolah dapat memulai tahun ajaran baru tanpa hambatan anggaran.

Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan reformasi ini, Kemendikbudristek tidak hanya berhasil mempercepat penyaluran dana dan meningkatkan fleksibilitas penggunaan, tetapi juga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Melalui kebijakan ini, diharapkan setiap sekolah di seluruh Indonesia dapat menjalankan fungsinya secara optimal, mendukung proses pembelajaran siswa dengan lebih baik, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Dampaknya, setiap tahunnya, kualitas pengelolaan Dana BOSP mengalami peningkatan

	2020	2021	2022	2023	2024
 Penerimaan Dana BOSP di satuan pendidikan semakin cepat	Paling cepat diterima bulan Februari	Paling cepat diterima bulan Maret	Paling cepat diterima bulan Februari	Paling cepat diterima bulan Februari	Paling cepat diterima bulan Januari
 Realisasi anggaran meningkat terhadap alokasi Perpres	96,29%	98,83%	95,15%	99,29%	97,76% * <small>prediksi 98,97%</small>
 Retur semakin menurun	3.681	1.826	1.291	1.446	1.417 **
 Nilai sisa dana yang diperhitungkan semakin menurun			846,85 M	270,06 M	250,79 M ***

*penyaluran s.d. 9 Sept 2024 **jumlah retur s.d. 9 Sept 2024 ***potensi angka sisa dana yang diperhitungkan pada penyaluran tahap II'24

Tantangan dan Urgensi Keberlanjutan

Meskipun reformasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui Kebijakan Merdeka Belajar Episode 3 telah menunjukkan sejumlah kemajuan penting, pemerintah masih menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar berpihak pada kebutuhan satuan pendidikan.

Peningkatan satuan biaya Dana BOS melalui penerapan indeks yang mencerminkan karakteristik daerah adalah langkah maju yang signifikan. Indeks ini memungkinkan penyesuaian alokasi dana sesuai dengan kondisi spesifik di setiap daerah, terutama daerah-daerah dengan karakteristik khusus seperti daerah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T).

Namun, meskipun upaya peningkatan ini telah dilakukan, kenyataannya masih belum cukup untuk sepenuhnya membiayai kebutuhan operasional satuan pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjak), kontribusi dana BOS dari pemerintah pusat saat ini hanya mencakup 46,5% dari total biaya operasional di tingkat sekolah dasar (SD), dan 41,5% di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Dengan kata lain, hampir setengah dari kebutuhan operasional sekolah masih harus ditanggung melalui sumber lain, baik itu dari pemerintah daerah, masyarakat, maupun inisiatif kepala sekolah.

Kondisi ini menimbulkan urgensi yang mendalam untuk terus meningkatkan satuan biaya Dana BOS agar lebih adil dan mampu mencakup seluruh kebutuhan operasional satuan pendidikan, terutama

di sekolah-sekolah yang paling bergantung pada dana ini. Kebijakan Dana BOS yang lebih berpihak akan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi sekolah-sekolah, tidak hanya untuk menjalankan operasional harian mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mereka tawarkan kepada siswa.

Selain itu, keadilan dalam alokasi Dana BOS harus dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkecil kesenjangan pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah di daerah terpencil atau kurang berkembang sering kali menghadapi tantangan operasional yang jauh lebih besar dibandingkan sekolah-sekolah di kota besar, mulai dari infrastruktur yang terbatas hingga sumber daya manusia yang kurang memadai. Peningkatan satuan biaya Dana BOS yang lebih mencerminkan realitas kebutuhan di lapangan akan membantu menjawab tantangan-tantangan tersebut, dan pada akhirnya menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan merata di seluruh negeri.

Sejak tahun 2021, Kemendikbudristek melakukan transformasi satuan biaya Dana BOSP secara bertahap untuk memberikan keberpihakan dan menekan ketimpangan biaya pendidikan antar wilayah, terutama pada daerah afirmatif



Dalam survei Litbang Kompas (2021), 84,1% responden sekolah setuju dengan kebijakan satuan biaya BOS bervariasi

MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-4

Program Organisasi Penggerak

Program Organisasi Penggerak merupakan upaya Kemendikbudristek untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengajak keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan. Program yang diluncurkan pada 10 Maret 2020 sebagai Merdeka Belajar episode keempat ini mengajak organisasi masyarakat untuk membantu menginisiasi Sekolah Penggerak. Organisasi kemasyarakatan (Ormas) pendidikan yang terlibat adalah yang memiliki rekam jejak baik dalam implementasi program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta memiliki model-model pelatihan yang sudah terbukti efektif dalam meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik.

Sekolah Penggerak memiliki empat komponen utama. Pertama, kepala sekolah yang memahami proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar. Kedua, guru yang berpihak kepada anak dan mengajar sesuai tahap perkembangan siswa. Ketiga, siswa yang senang belajar, berakhlak mulia, kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan kolaboratif. Keempat, komunitas penggerak yang terdiri dari orang tua, tokoh, serta organisasi kemasyarakatan yang menyokong sekolah dalam meningkatkan kualitas belajar siswa.

Program Organisasi Penggerak memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah menggunakan model-model pelatihan yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Program ini melibatkan organisasi kemasyarakatan dan relawan pendidikan dengan rekam jejak baik yang diseleksi berdasarkan praktik baik dalam implementasi program pelatihan guru dan kepala sekolah. Pada tahun 2020–2022, organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam program ini menerima dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala

sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD/SD/SMP/TKLB/SDLB/SMPLB.

Program intervensi ini dilaksanakan selama 2 tahun ajaran dan diharapkan selama program berjalan, ormas yang menjadi mitra POP dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan PAUD, satuan jenjang SD dan satuan jenjang SMP. Sampai dengan tahun 2023, terdapat 131 ormas yang melaksanakan 155 intervensi, dengan sasaran 100 satuan pendidikan (Kategori I: “Gajah”); dan/ atau 21 sampai 100 satuan pendidikan (Kategori II: “Macan”); dan/atau 5 sampai 20 satuan pendidikan (Kategori III: “Kijang”). Pembiayaan POP adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun dari pembiayaan mandiri, selama 3 tahun anggaran yaitu 2021, 2022, dan 2023.

Capaian

Sejumlah kegiatan pelatihan guru telah dilaksanakan, mendorong terbentuknya Sekolah Penggerak di berbagai daerah di Indonesia. Pada tahun 2021, sebanyak 159 organisasi mitra telah menggerakkan 7.499 Sekolah Penggerak di 33 provinsi. Sementara, satuan PAUD yang mengikuti Program Organisasi Penggerak sebanyak 1.180 satuan dengan 5.845 orang GTK PAUD (Tahun 2021-2023).

Inovasi

Pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) di bidang pendidikan secara masif untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi PTK dan kualitas pembelajaran khususnya di bidang literasi, numerasi, dan pengembangan karakter.

Tantangan

Intervensi Ormas yang dilaksanakan secara daring atau terkait dengan aplikasi pemanfaatan TIK bagi beberapa sekolah sasaran cukup memberatkan. Selain ketiadaan

Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

atau buruknya koneksi internet, kepemilikan gawai/laptop di kalangan PTK di daerah tertentu pun menjadi kendala utama.

Urgensi Keberlanjutan

Keberhasilan organisasi dalam memberikan penguatan dan peningkatan kompetensi PTK maupun terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik dapat

menjadi pertimbangan bagi Kemendikbudristek dalam penyusunan kebijakan selanjutnya terkait program lainnya yang melibatkan ormas. Peran ormas juga penting dalam menjangkau satuan pendidikan yang mungkin sebelumnya tidak terjangkau, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.





MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-5

Guru Penggerak

Pendidikan Guru Penggerak (PGP) yang diluncurkan pada 3 Juli 2020 ini merupakan program strategis yang dirancang untuk membentuk guru-guru di Indonesia menjadi pemimpin pembelajaran yang berkualitas. Program ini bertujuan untuk membekali guru dengan keterampilan kepemimpinan yang kuat, sehingga mereka tidak hanya menjadi pengajar yang baik, tetapi juga mampu memimpin perubahan dan inovasi di sekolah. Sebagai pelatihan utama dalam mempersiapkan kepala sekolah dan pengawas yang kompeten, PGP berfokus pada pengembangan kemampuan guru dalam memahami kebutuhan siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta menginspirasi rekan sejawat dan lingkungan sekolahnya.

Program PGP terdiri atas beberapa jenis, yaitu PGP Reguler, Daerah Khusus, Intensif, dan Rekognisi. PGP Reguler dirancang untuk guru di wilayah dengan akses internet yang baik. Pembelajaran dilakukan secara daring dan luring, didampingi fasilitator dan pengajar praktik, dan pesertanya berasal dari satu

daerah. Sementara PGP Daerah Khusus dan Intensif dirancang untuk menjangkau guru di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis dan infrastruktur yang lebih berat, seperti daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. PGP Rekognisi untuk guru yang berperan sebagai fasilitator dan calon guru penggerak yang menggunakan pembelajaran daring dan peserta berasal dari berbagai daerah, didampingi fasilitator pemandu.

Setiap jenis program memiliki pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Secara umum, PGP diawali dengan tahapan seleksi yang ketat untuk memastikan calon peserta memiliki potensi kepemimpinan yang kuat. Setelah lulus seleksi, para peserta mengikuti rangkaian pendidikan intensif selama enam bulan, di mana mereka dilatih untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang tangguh dan berdedikasi.

Hingga tahun 2024, PGP telah sukses menysasar 514 kabupaten/kota di 38 provinsi di seluruh Indonesia,

Perjalanan & Lulusan Pendidikan Guru Penggerak



termasuk 52 daerah khusus dan 18 daerah intensif. Program ini telah melibatkan 36.195 aktor pendukung, yang terdiri dari 29.333 Pengajar Praktik, 6.005 Fasilitator, dan 857 Instruktur. Kehadiran aktor-aktor pendukung ini menjadi elemen kunci yang memastikan kualitas pelatihan yang diterima oleh para Guru Penggerak tetap tinggi dan relevan dengan kebutuhan sekolah-sekolah di lapangan.

Capaian Pendidikan Guru Penggerak



Pendidikan Guru Penggerak telah menjangkau 514 kab/kota di 38 Provinsi termasuk 52 daerah khusus dan 18 daerah intensif

Sampai dengan bulan September 2024, Program PGP telah meluluskan 92.887 Guru Penggerak. Dari jumlah tersebut, 13.205 orang telah diangkat menjadi kepala sekolah, sementara 753 lainnya menduduki posisi sebagai pengawas sekolah. Angka-angka ini mencerminkan keberhasilan PGP dalam mencetak pemimpin-pemimpin baru di dunia pendidikan

Indonesia. Para lulusan ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah mereka masing-masing, tetapi juga berkontribusi pada transformasi sistem pendidikan secara keseluruhan, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.

Evaluasi program PGP menunjukkan hasil yang

sangat positif, terutama dalam hal perubahan perilaku para guru. Guru-guru yang telah mengikuti program ini kini lebih berfokus pada siswa, menjadikan kebutuhan dan perkembangan siswa sebagai pusat dari segala aktivitas pembelajaran. Selain itu, mereka juga mulai menunjukkan keterlibatan yang lebih besar dalam mengembangkan rekan sejawat di sekolah. Guru Penggerak tidak hanya bertanggung jawab atas keberhasilan siswa mereka sendiri, tetapi juga membantu guru-guru lain untuk terus berkembang dan meningkatkan kompetensi mereka. Kolaborasi yang terjalin antar guru dalam pengembangan program-program sekolah menjadi bukti bahwa para Guru Penggerak telah memahami pentingnya kerja sama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik.

Meskipun telah banyak pencapaian yang diraih, evaluasi juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan di masa depan. Salah satu tantangan yang masih harus dihadapi adalah penguatan

kepemimpinan dan kemampuan pendampingan di tingkat sekolah. Meskipun banyak guru yang telah berhasil mempraktikkan apa yang mereka pelajari dari PGP, peningkatan kapasitas dalam hal manajemen dan kepemimpinan di sekolah masih perlu mendapatkan perhatian lebih. Hal ini penting agar para Guru Penggerak tidak hanya berfokus pada peran mereka sebagai pengajar, tetapi juga mampu menjadi pemimpin yang efektif, yang dapat mempengaruhi perubahan di tingkat institusi secara keseluruhan.

Capaian Program Guru Penggerak



Jumlah GP	92.887	GP MSKS	60.387
GP Menjadi KS	13.205	Jumlah CGP	59.208
CGP MSKS	26.691	CGP Menjadi KS	4.207
Jumlah GP Menjadi Pengawas Sekolah			753

Informasi Data :

- Jumlah GP saat ini adalah Angkatan 1-9
- Jumlah CGP adalah Angkatan 10-11
- GP: Guru Penggerak; CGP : Calon Guru Penggerak
- GP MSKS : Guru Penggerak Memenuhi Syarat Kepala Sekolah
- CGP MSKS : Calon Guru Penggerak Memenuhi Syarat Kepala Sekolah

Sumber Data

- BI SIMPKB September 2024
- Data plt KS dan Sekolah Tanpa KS dari Satudata *cut off* per Mei 2024

Hasil Evaluasi Dampak Pendidikan Guru Penggerak

PGP telah melaksanakan evaluasi dampak dengan dukungan mitra pembangunan

- Evaluasi Bank Dunia pada 350 guru SD yang mengikuti seleksi PGP angkatan 5 di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
- Studi kualitatif dukungan inovasi pada 31 sekolah (2002) dan 24 sekolah (2023) di 11 Provinsi pada angkatan 1 - 5

Hasil evaluasi menggambarkan bahwa lulusan Guru Penggerak bertumbuh menjadi Pemimpin Pembelajaran yang berpusat pada murid



Diri dan Ruang Kelas

Melakukan praktik reflektif untuk meningkatkan pembelajaran, inovasi dan Kreativitas. GP mampu mendorong siswa untuk aktif belajar.



Rekan Sejawat

Lulusan GP mengimbaskan pembelajaran dan mampu mendorong guru lain untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid.



Perkembangan Sekolah

Pemimpin berbasis aset dan kolaboratif yang bertanggung jawab menuju akselerasi perubahan di sekolah.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya lulusan PGP untuk terus belajar mengembangkan kompetensinya agar:

- Pembelajaran semakin berpusat kepada murid
- Memimpin pengembangan sekolah secara efektif



MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-6

Transformasi Dana Pemerintah untuk Perguruan Tinggi (*Matching Fund* dan *Competitive Fund*)

Transformasi Dana Pemerintah untuk Pendidikan Tinggi bertujuan mempersiapkan perguruan tinggi di Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Diluncurkan pada 3 November 2020 melalui Merdeka Belajar Episode Keenam, Kemendikbudristek meningkatkan anggaran yang disalurkan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk mendukung pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia.

Transformasi ini menghadirkan tiga skema pendanaan utama: *matching fund* atau dana padanan, *competitive fund* atau program kompetisi Kampus Merdeka, serta tambahan dana BOPTN (Biaya Operasional

PTN), BPPTNBH (Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum), dan insentif berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuan dari pendanaan ini adalah untuk meningkatkan keterhubungan pendidikan tinggi dengan kebutuhan industri dan masyarakat, mendorong lulusan agar lebih mudah mendapatkan

Sebaran Mitra Pelaksanaan MF/PDP 2023 & 2024



pekerjaan, serta mengarahkan kurikulum ke arah pengembangan keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah.

Program Dana Padanan (Matching Fund)

Salah satu skema unggulan adalah dana padanan, yang dirancang untuk mempercepat kontribusi industri dalam pendidikan dan penelitian melalui platform Kedaireka. Platform ini menjadi wadah kolaborasi antara perguruan tinggi dan pelaku usaha, membuka peluang terjadinya kerja sama strategis.

Capaian

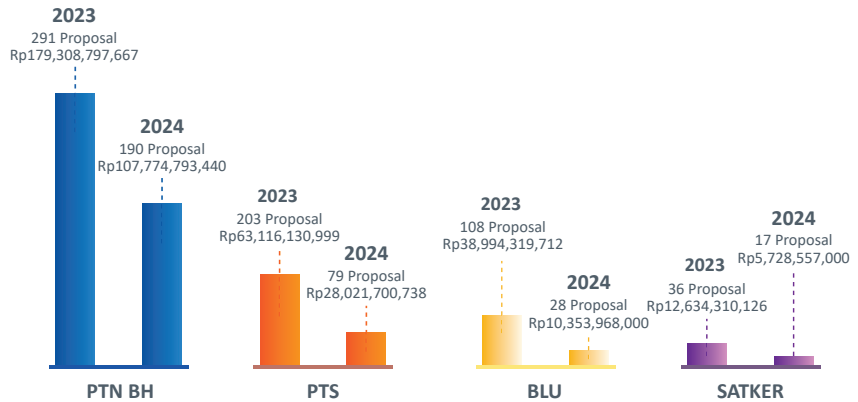
Sejak diluncurkan, skema pendanaan melalui matching fund telah meningkatkan keterlibatan dunia industri dalam pengembangan pendidikan tinggi. Platform Kedaireka, sebagai medium utama, telah menjembatani ribuan proyek kolaboratif antara perguruan tinggi dan mitra-mitra industri. Program ini mendorong hilirisasi hasil penelitian dari perguruan tinggi, memperkuat dampak riset terhadap masyarakat dan sektor industri.

Program Dana Padanan (PDP) juga telah menghasilkan peningkatan relevansi penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat dan mitra industri. Ada lima prioritas rekacipta dalam program ini, yaitu: ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi digital, penguatan pariwisata, dan kemandirian kesehatan. Dua skema kemitraan yang dihadirkan, yakni Skema A (Hilirisasi Inovasi Hasil Riset) dan Skema B (Inovasi Pemberdayaan Masyarakat), telah memberikan hasil positif dalam kolaborasi riset dan inovasi.

Inovasi

Inovasi terbesar dari transformasi ini adalah kehadiran Kedaireka, sebuah platform digital yang mempertemukan perguruan tinggi dengan pelaku

Sebaran Perguruan Tinggi MF/PDP 2023 & 2024



usaha dan mitra industri. Platform ini memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif dalam riset dan inovasi, menjembatani kesenjangan antara dunia akademik dan industri. Selain itu, penyediaan dana padanan menjadi katalis dalam menciptakan sinergi antara perguruan tinggi dan mitra, dengan mendorong hilirisasi hasil penelitian dan peningkatan daya guna riset yang lebih aplikatif.

Tantangan

Meski program ini telah menunjukkan banyak capaian positif, tantangan utama yang dihadapi adalah membangun kepercayaan (trust) antara perguruan tinggi dengan mitra industri. Ekosistem kolaborasi yang kuat diperlukan agar hubungan antara perguruan tinggi dan industri dapat berjalan optimal. Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan bahwa kolaborasi ini dapat tumbuh secara mandiri, tanpa selalu mengandalkan pendanaan dari pemerintah, dan memperluas dampak inovasi terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Urgensi Keberlanjutan

Keberlanjutan transformasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa perguruan tinggi Indonesia terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan global. Penguatan ekosistem kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri harus terus didorong, dengan tujuan membangun sinergi jangka panjang



ini, pengelolaan PKKM diamanahkan kepada Direktorat Kelembagaan.

PKKM merupakan program bantuan pemerintah yang ditujukan kepada perguruan tinggi yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang dilaksanakan dengan skema kompetisi terbuka untuk pengembangan institusi dengan sistem seleksi berkelompok (*tiered system*). PKKM mencakup pendanaan bagi program studi dan/atau sistem pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di tingkat Institusi atau disebut *Institutional Support System (ISS) - MBKM*.

PKKM ditujukan untuk memfasilitasi inisiasi transformasi pendidikan tinggi agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui kerjasama erat dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan *top world class universities (QS100 by subject)*. Program ini juga ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi dengan memfasilitasi aspirasi, inovasi, dan semangat sivitas akademika dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika kehidupan masyarakat yang terjadi.

yang mandiri. Selain itu, upaya peningkatan daya guna hasil riset harus menjadi prioritas, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara langsung di masyarakat dan dunia usaha. Dengan mempertahankan momentum transformasi ini, perguruan tinggi Indonesia akan semakin siap bersaing di tingkat internasional.

Program Kompetisi Kampus Merdeka (Competitive Fund)



Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) mulai dilaksanakan pada tahun 2021 di bawah pengelolaan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. Mulai tahun 2022 hingga 2024

Secara khusus PKKM di tingkat program studi bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi dan inovasi pendidikan tinggi untuk merespon dan mengantisipasi perkembangan IPTEK di masa depan sesuai dengan keunggulan program studi dan meningkatkan kerjasama dengan DUDI dan *top world class universities* dalam rangka transformasi pendidikan tinggi untuk mendapatkan pengakuan internasional dan meningkatkan daya saing bangsa. PKKM ISS-MBKM secara khusus ditujukan untuk memperkuat tata kelola MBKM dan memfasilitasi implementasi kampus merdeka untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi yang dilaksanakan di seluruh program studi.

PKKM dirancang untuk dua tahun sehingga pengusulan program harus dilakukan untuk dua tahun dengan usulan rinci per tahun. Keberlanjutan pendanaan untuk tahun ke-2 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi keberhasilan tahun pertama.

Dampak program komperisi Kampus Merdeka (*Competitive Fund*)

Program Studi ISS - MBKM

 <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan/perubahan kurikulum • Inovasi pembelajaran: <i>Case method, project-based learning</i> • Peningkatan pengalaman industri dosen atau dosen berkegiatan di kampus lain • Peningkatan jumlah dosen praktisi dengan kemampuan pedagogik yang lebih baik • Peningkatan implementasi MBKM di prodi 	 <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem/unit pelaksana MBKM • Implementasi MBKM di tingkat institusi (MBKM Mandiri) untuk seluruh prodi di PT terkait (tidak terbatas pada <i>awardee</i> PKKM)
--	---

Penerima PKKM

	2021	2022	2023	2024
Perguruan Tinggi	142	184	306	223
Prodi/ISS-MBKM	345	496	546	569

PKKM pada Perguruan Tinggi Vokasi (PTV)

Program *Competitive Fund* di Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) adalah inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Program ini mendukung pengembangan program studi (prodi) vokasi melalui skema pendanaan berbasis kompetisi. Terdapat empat skema pendanaan utama: transformasi Diploma Tiga menjadi Sarjana Terapan, pembukaan Diploma Dua Jalur Cepat, penguatan program studi yang ada, dan pendanaan untuk prodi yang terakreditasi minimal B. Seleksi pendanaan bersifat kompetitif dan dilakukan melalui proses evaluasi proposal yang mencakup tiga

tahap: administrasi, substansi, dan kelayakan. Kriteria seleksi meliputi kesiapan infrastruktur, relevansi kurikulum, dan potensi menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja.

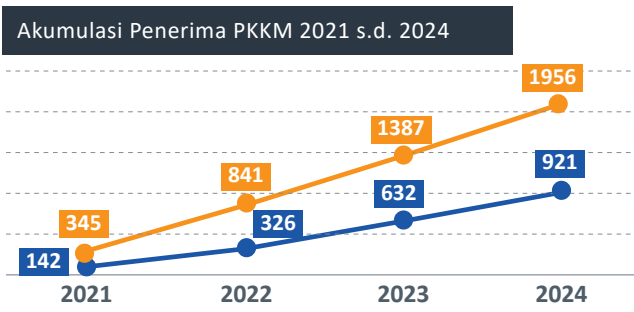
Capaian

Sejak 2021 hingga semester pertama 2024, *Competitive Fund* telah mendukung peningkatan kualitas berbagai program studi di PTV. Pada 2021, sebanyak 116 prodi menerima pendanaan, dan jumlah ini meningkat menjadi 151 prodi pada 2022. Namun, pada 2023 terjadi penurunan jumlah penerima menjadi 119 prodi, dan hingga pertengahan 2024, sebanyak 90 prodi telah didanai. Penurunan penerima di 2023 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterlambatan laporan, perubahan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perpindahan sumber dana dari DIPA ke LPDP, yang memerlukan penyesuaian dengan prosedur baru.

Anggaran *Competitive Fund* Vokasi dari 2021 hingga semester pertama 2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan perubahan prioritas pendanaan. Pada 2021, alokasi dana mencapai Rp 82 miliar untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Namun, pada 2022, anggaran menurun drastis menjadi Rp 40 miliar, karena perubahan kebijakan atau prioritas. Pada 2023, anggaran kembali naik menjadi Rp 73 miliar, menunjukkan komitmen baru untuk mendukung pendidikan vokasi, dan pada semester pertama 2024, anggaran mencapai puncaknya di Rp 84,8 miliar.

Inovasi

Program *Competitive Fund* memungkinkan pengembangan kurikulum berbasis standar industri, peningkatan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi, serta penerapan metode *project-based learning* yang melibatkan kolaborasi dengan industri. Pendanaan ini juga digunakan untuk memperkuat fasilitas pembelajaran, seperti peningkatan laboratorium dan teknologi yang mendukung proses pembelajaran berbasis praktik. Skema ini memberikan ruang untuk pengembangan inovasi pendidikan vokasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.



Tantangan

- Aspek penguatan dan penyesuaian kelembagaan pada Perguruan Tinggi Vokasi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program *Competitive Fund*. Hal ini berdampak pada kebutuhan waktu, dan SDM yang tinggi untuk menyelenggarakan program. Perubahan kebijakan berkaitan dengan pengadaan dan penyesuaian sumber pendanaan program juga berkontribusi pada pengunduran linimasa pelaksanaan dan pelaporan program secara keseluruhan.
- Perkembangan tren pembelajaran dan dinamisnya perkembangan dunia kerja merupakan tantangan bagi program *Competitive Fund* Vokasi dalam upaya penguatan kelembagaan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi. Tantangan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi perguruan tinggi dan mitra dunia kerja dari wilayah Indonesia Timur serta minimnya inovasi program yang dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pendidikan vokasi bagi keberlanjutan *Competitive Fund* Vokasi di masa depan

Urgensi Keberlanjutan

Keberlanjutan program *Competitive Fund* sangat penting untuk menjaga momentum peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Dukungan pendanaan harus terus difokuskan pada pengembangan kurikulum yang relevan dengan industri, peningkatan kompetensi dosen, dan fasilitas pembelajaran. Di samping itu, sinergi antara PTV dan industri perlu diperkuat agar pendidikan vokasi lebih responsif terhadap kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Dengan terus mendorong inovasi

Peta Sebaran Penerima Berdasarkan

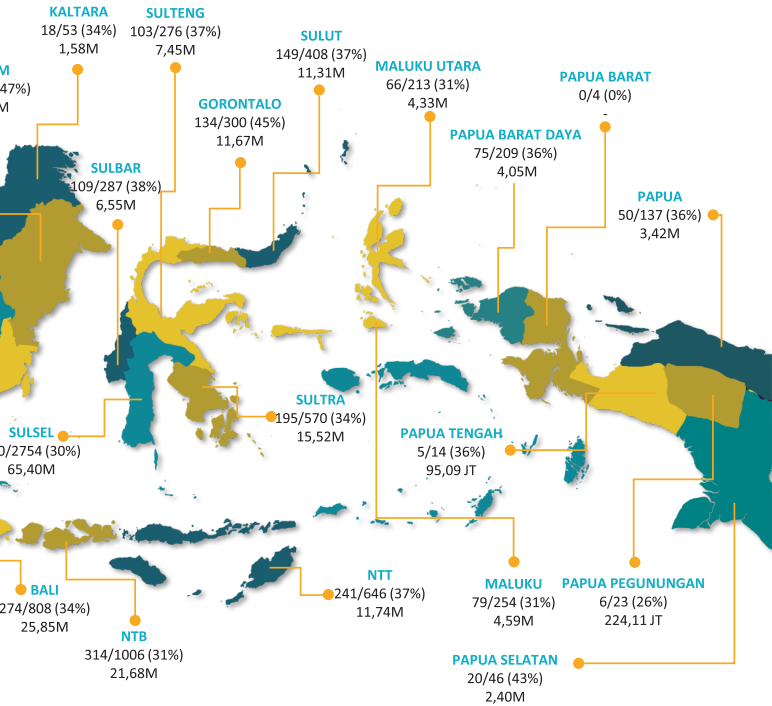


dan kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, program ini dapat memastikan lulusan PTV lebih siap dan kompetitif di dunia kerja.

Program ini juga memiliki dampak positif program ini meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Kurikulum: Kurikulum vokasi kini lebih relevan dengan kebutuhan industri.
2. Pengembangan Kompetensi Dosen: Dosen mendapatkan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan metode pengajaran.
3. Daya Saing Lulusan: Lulusan dari program studi yang menerima *Competitive Fund* lebih kompetitif di pasar kerja karena memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri.
4. Peningkatan Infrastruktur: Dukungan fasilitas dan peralatan modern meningkatkan efektivitas pembelajaran.

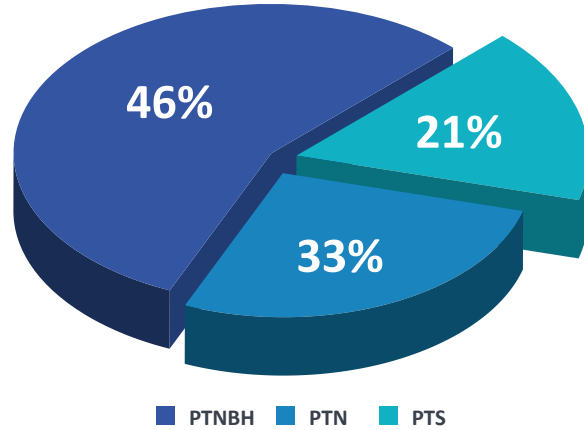
Pendanaan Penelitian 2024 per Provinsi



Bantuan Operasional PTN - Penelitian (BOPTN Penelitian)

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pada tahun 2024 ditargetkan setidaknya 1 (satu) PT masuk ke Top 200 dunia versi QS *World University Rankings* (WUR), meningkatnya jumlah sitasi di jurnal internasional hingga 59.770, meningkatnya jumlah prototipe (laik industri) menjadi 304 prototipe, dan jumlah KI yang didaftarkan dari hasil penelitian dan pengembangan Perguruan Tinggi menjadi 1.812 KI. Menjawab tantangan tersebut, Kemendikbudristek melalui Ditjen Diktiristek mengelola dan menyalurkan dana BOPTN Penelitian guna memfasilitasi kegiatan penelitian para dosen yang berada di lingkungan Kemendikbudristek. Program pendanaan penelitian ini terdiri dari skema-skema yang beragam, inklusif, memperhatikan aspek peningkatan kompetensi dan kepakaran, serta perhatian khusus untuk daerah-daerah prioritas.

Sebaran Alokasi Dana Penelitian Baru TA 2024 Berdasarkan Kategori Institusi



Kategori Institusi	Dana Penelitian Baru (Rp)
PTN	225,705,370,000
PTNBH	353,415,660,000
PTS	480,576,840,000
Total	1,059,697,870,000

Skema-skema ini juga diharapkan dapat mendorong kolaborasi penelitian antar instansi dan lintas disiplin ilmu untuk membangun jejaring dan ekosistem penelitian yang lebih produktif dan tangkas dalam menghadapi tantangan global.

Program pendanaan penelitian tahun 2024 dibagi menjadi 3 induk skema pendanaan yaitu Skema Penelitian Dasar, Skema Penelitian Terapan, dan Skema Penelitian Kerja Sama Luar Negeri. Skema Penelitian dasar diharapkan mampu meningkatkan kapasitas peneliti serta membangun rekam jejak yang mengarah kepada budaya riset yang unggul.

Luaran dari skema penelitian dasar didorong untuk menjadi daya ungkit menuju skema penelitian terapan maupun pengembangan, serta memperkuat jejaring antar perguruan tinggi. Skema Penelitian Terapan

diharapkan menjadi wahana inkubasi teknologi atau inovasi untuk dapat dihilirkan/diaplikasikan serta mewadahi peningkatan kepakaran peneliti di bidang keahliannya sehingga dapat menjadi rujukan internasional. Skema Penelitian Kerja Sama Luar Negeri diharapkan dapat mendorong penelitian yang lebih komprehensif untuk mengimbangi cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0.

Program Kosabangsa (Kolaborasi Sosial Membangun Masyarakat)

Program Kosabangsa adalah inisiatif dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM). Program ini bertujuan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya guna mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, prioritas kemiskinan ekstrem, serta rawan bencana.

Dengan semangat gotong royong sebagai implementasi nilai luhur Pancasila, Kosabangsa berfokus pada pengembangan kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui kolaborasi perguruan tinggi dengan mitra dan pemangku kepentingan. Program ini mendorong sinergi antarperguruan tinggi, baik dari klaster mandiri dan utama yang memiliki teknologi serta inovasi, dengan perguruan tinggi di klaster madya, pratama, dan binaan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat wilayah tertinggal.

Manfaat utama Program Kosabangsa meliputi:

1. Meningkatkan daya saing bangsa dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui penerapan teknologi untuk menyelesaikan masalah masyarakat.
2. Memfasilitasi pendampingan perguruan tinggi di wilayah prioritas oleh perguruan tinggi berklaster lebih tinggi.
3. Mengaplikasikan hasil riset yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Membangun jejaring kerja sama antarperguruan tinggi dan mitra untuk memperkuat pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Meningkatkan kemandirian masyarakat di sektor ketahanan pangan, kesehatan, energi terbarukan, ekonomi, dan pariwisata.
6. Mendukung ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) serta pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Capaian

Capaian Program Kosabangsa tahun 2024 menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengembangan wilayah dengan dukungan perguruan tinggi melalui program pengabdian kepada masyarakat. Fokus utama pendanaan ditujukan kepada tiga kategori wilayah:



Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

- Sebanyak 67 wilayah prioritas menjadi target utama. Wilayah-wilayah ini mencakup daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi atau akses terbatas terhadap pembangunan. Dengan memprioritaskan wilayah-wilayah ini, program Kosabangsa berupaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui penerapan teknologi, inovasi, serta pengembangan potensi sumber daya alam dan manusia setempat.
- 37 wilayah rawan bencana juga menjadi bagian penting dari program ini. Indonesia sebagai negara yang rawan gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi, memerlukan pendekatan khusus dalam menghadapi dampak bencana. Program Kosabangsa melalui dukungan perguruan tinggi membantu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi risiko bencana dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan solusi bagi masyarakat di daerah-daerah yang sering terdampak bencana.

- Selain itu, sebanyak 18 wilayah lainnya, yang tergolong dalam kategori umum, turut mendapatkan pendanaan. Meskipun tidak termasuk wilayah prioritas kemiskinan atau rawan bencana, wilayah-wilayah ini tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas penerapan hasil riset dan inovasi perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia.

Secara keseluruhan, pada 2024, sebanyak 420 dari 541 kabupaten/kota di Indonesia atau sekitar 81 persen dari total kabupaten/kota telah dijadikan mitra sasaran dalam program Pengabdian kepada Masyarakat, termasuk dalam skema *Competitive Fund* dan Kosabangsa. Ini menandakan cakupan program yang luas dan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi perguruan tinggi dan mitra lainnya.



MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-7

Program Sekolah Penggerak

Transformasi pendidikan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim pada episode 7 Merdeka Belajar adalah Program Sekolah Penggerak (PSP). PSP berfokus pada pengembangan Profil Pelajar Pancasila guna menciptakan sumber daya manusia unggul, baik kepala sekolah maupun guru, serta lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menyenangkan sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

PSP merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. PSP menghadirkan penyempurnaan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Pemerintah Daerah. Kolaborasi ini menempatkan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) sebagai kunci utama keberhasilan program. Tanpa adanya dukungan penuh dari Pemda, sulit bagi Sekolah Penggerak untuk mencapai tujuan transformasinya, karena Pemda memiliki peran vital dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah di wilayahnya.

Intervensi yang dilakukan pada Sekolah Penggerak bersifat holistik dan menyeluruh. Dimulai dari peningkatan kualitas SDM sekolah seperti kepala sekolah dan guru, yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin pembelajaran yang mampu mentransformasi sekolah secara efektif. Selain itu, intervensi mencakup aspek pembelajaran, dengan penekanan pada implementasi Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada siswa.



Peningkatan kapasitas perencanaan berbasis data juga menjadi fokus penting dalam program ini, di mana sekolah diajak untuk membuat perencanaan strategis yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak kalah pentingnya, digitalisasi sekolah menjadi bagian dari intervensi, membantu sekolah-sekolah untuk memanfaatkan teknologi dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Seluruh proses intervensi ini dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem pendidikan, hingga pada akhirnya seluruh sekolah di Indonesia dapat menjadi bagian dari Sekolah Penggerak.

Angkatan	SD	SMP	SMA	SLB	Grand Total
PSP Angkatan 1	1111	573	381	82	2147
PSP Angkatan 2	3073	1229	629	123	5054
PSP Angkatan 3	1844	1166	311	55	3376
Grand Total	6028	2968	1321	260	10577

Terdapat **10.577*** satuan Pendidikan pelaksana PSP jenjang Dasar dan Menengah yang tersebar dalam 3 angkatan.

*berdasarkan data per 5 April 2024

Sejak pertama kali diluncurkan, Program Sekolah Penggerak telah dilaksanakan di 10.577 satuan pendidikan, yang tersebar dari angkatan pertama hingga angkatan ketiga. Angka ini menunjukkan adanya penerimaan yang positif dari sekolah-sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Program ini juga mengandalkan mekanisme pendanaan yang solid, dengan intervensi pendanaan dilakukan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja, yang telah dimulai sejak tahun 2021. Dana BOS Kinerja ini dirancang untuk mendukung sekolah-sekolah penggerak dalam menjalankan program-program unggulannya, termasuk peningkatan kualitas SDM dan fasilitas penunjang pembelajaran.

Keberhasilan Program Sekolah Penggerak tidak terlepas dari peran penting yang dimainkan oleh berbagai pihak. Adapun pihak-pihak yang berperan dalam PSP, di antaranya fasilitator SP, pengawas, penilik, kepala sekolah, komite pembelajaran guru, guru, murid, mitra, komite orang tua, pemerintah daerah. Semua pihak yang berperan bermitra dengan perguruan tinggi, industri, lembaga sosial, kepala desa, dan berkolaborasi dengan komite orang tua selaku pemangku kepentingan, dan didukung oleh platform teknologi.

Daerah pedalaman Papua menjadi salah satu contoh keberhasilan PSP di daerah terpencil di Indonesia. PSP telah mendorong sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang berakar pada kearifan lokal, Akan tetapi dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan dalam melaksanakan program pendidikan di wilayah 3T, salah satunya terkait mengubah pola pikir guru untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan demikian dibutuhkan inovasi dan kemampuan pendidik dalam penggunaan teknologi informasi.

Program Pengimbasan

Memasuki tahun 2024, Program Sekolah Penggerak telah memasuki tahun keempat pelaksanaannya. Pada tahap ini, Sekolah Penggerak angkatan pertama diharapkan dapat menjalankan tugas penting, yaitu melakukan “pengimbasan” kepada satuan pendidikan lainnya. Pengimbasan ini merupakan bentuk keberlanjutan dari Program Sekolah Penggerak, di mana sekolah-sekolah yang telah sukses menerapkan program ini berbagi pengalaman dan praktik baik kepada sekolah-sekolah lain yang belum menjadi Sekolah Penggerak. Program pengimbasan ini menjadi

inovasi penting dalam sistem pendidikan Indonesia, karena berfungsi sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kapasitas bagi sekolah-sekolah lain yang belum mendapatkan intervensi langsung dari Program Sekolah Penggerak.

Dalam pelaksanaannya, Program Pengimbasan berfokus pada beberapa aspek utama. Pertama, pengembangan sumber daya manusia di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran pengimbasan. Pengembangan ini mencakup pelatihan bagi kepala sekolah dan guru, dengan tujuan agar mereka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah masing-masing. Kedua, Program Pengimbasan juga menekankan pada implementasi Kurikulum Merdeka, di mana sekolah-sekolah diajak untuk menerapkan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan

siswa. Selain itu, digitalisasi sekolah menjadi salah satu aspek penting dalam pengimbasan, di mana sekolah-sekolah diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses belajar mengajar. Terakhir, pengimbasan juga mencakup perencanaan berbasis data, yang bertujuan agar sekolah-sekolah dapat membuat perencanaan yang lebih efektif dan terukur, berbasis pada data yang akurat.

Program Pengimbasan ini didukung oleh beberapa kegiatan utama, seperti pelatihan, penguatan komunitas belajar, serta pendampingan secara

langsung. Semua kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem belajar yang sehat dan produktif, di mana semua satuan pendidikan dapat saling berbagi pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara

keseluruhan. Program ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 63 Tahun 2023, yang menjelaskan secara rinci tentang mekanisme dan tujuan dari Program Pengimbasan ini.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari Program Pengimbasan adalah mendorong peningkatan mutu pembelajaran yang berkualitas di seluruh satuan pendidikan. Program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem belajar yang lebih inklusif dan kolaboratif, di mana setiap sekolah

dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, dengan adanya pengimbasan, dampak dari Program Sekolah Penggerak dapat diperluas secara lebih cepat dan efektif, sehingga transformasi pendidikan dapat dirasakan oleh semua sekolah di Indonesia, tidak terbatas pada sekolah-sekolah yang telah ditetapkan sebagai Sekolah Penggerak.



MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-8

SMK Pusat Keunggulan

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pusat Keunggulan merupakan terobosan komprehensif yang bertujuan untuk membenahi kondisi SMK saat ini agar semakin sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Program yang diluncurkan pada 17 Maret 2021 sebagai Merdeka Belajar episode kedelapan ini merupakan salah satu perwujudan visi Presiden Joko Widodo terkait pembenahan pendidikan vokasi sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Pada 2021, SMK Pusat Keunggulan diprioritaskan untuk 901 SMK dengan tujuh sektor prioritas, yaitu ekonomi kreatif, pemesinan dan konstruksi, *hospitality*, *care services*, maritim, pertanian, dan kerja sama luar negeri.

Upaya meningkatkan kualitas SMK dilakukan dengan mewujudkan keselarasan antara SMK dengan dunia kerja. Hal tersebut dapat ditempuh melalui pemenuhan *link and match* 8+i penerapan 8 standar nasional pendidikan yang dilengkapi penyelarasan industri. Pertama, kurikulum disusun bersama sejalan dengan penguatan aspek *soft skills*, *hard skills*, dan karakter kebecerjaan sesuai kebutuhan dunia kerja. Kedua, pembelajaran diupayakan berbasis *project riil* dari dunia kerja (*project-based learning*) untuk memastikan *hard skills*, *soft skills*, dan karakter yang kuat. Ketiga, peningkatan jumlah dan peran guru/instruktur dari industri maupun pakar dari dunia kerja.

Keempat, praktik kerja lapangan/industri minimal satu semester. Kelima, bagi lulusan dan bagi guru/instruktur sertifikasi kompetensi harus sesuai dengan standar dan kebutuhan dunia kerja. Keenam, bagi guru/instruktur perlu ditekankan untuk memperbarui teknologi melalui pelatihan secara rutin. Ketujuh, dilakukannya kerja sama dengan industri untuk



mendukung *teaching factory* berdasarkan kebutuhan riil industri. Kedelapan, komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja.

Sejak diperkenalkan, SMK PK telah memainkan peran penting dalam memajukan pendidikan kejuruan dengan melibatkan dunia industri secara langsung,

Industri sudah sangat terlibat pada SMK PK (sejak 2022)



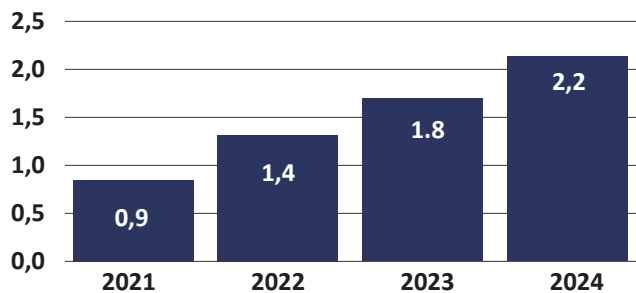
976
Mitra Industri dan konsorsium (baru/berulang)



Rp 844,1 miliar
Kontribusi Industri untuk pelaksanaan program SMK PK

SMP PK dapat mengubah kualitas pembelajaran 2,2 juta siswa

Jumlah siswa SMK di program SMK PK, (juta siswa)



% dari total siswa SMK	18%	27%	35%	43%
Jumlah SMK PK	901	1401	1851	2310
Realisasi Nilai Pematangan dari APBN, (Rp miliar)		416	196	198

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Sekolah Menengah

mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, dan meningkatkan kompetensi kepala sekolah serta guru melalui pelatihan intensif. Lebih dari itu, kolaborasi yang erat dengan perguruan tinggi vokasi dan Balai Vokasi juga menjadi bagian integral dalam memastikan program ini berjalan dengan sukses.

Capaian

Persentase lulusan SMK yang bekerja dan berwirausaha satu tahun setelah kelulusan meningkat 3,74% dari tahun 2023 sebesar 46,28% dibanding tahun 2022 sebesar 42,54%. Sejak tahun 2022, keterlibatan industri dalam Program SMK PK mengalami peningkatan yang signifikan. Data menunjukkan bahwa 976 mitra industri telah berpartisipasi dalam mendukung proses pembelajaran di SMK PK. Tidak hanya sebatas partisipasi, kontribusi dari sektor industri ini mencapai Rp 844,1 miliar, sebuah angka yang mencerminkan komitmen besar dari sektor swasta dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Melalui

kemitraan ini, sekolah-sekolah SMK PK mendapatkan akses langsung terhadap teknologi, standar operasional, serta kebutuhan nyata dari dunia kerja, sehingga lulusan yang dihasilkan menjadi lebih siap dan kompeten di pasar tenaga kerja.

Seiring dengan berjalannya waktu, dampak positif Program SMK PK semakin nyata. Pada tahun 2024, program ini telah menjangkau 1,86 juta siswa, meningkat hampir dua kali lipat dari 0,9 juta siswa pada tahun 2021. Saat ini, sebanyak 2.276 SMK di seluruh Indonesia telah mengadopsi model pembelajaran unggul yang ditawarkan oleh SMK PK, mencakup sekitar 37% dari total siswa SMK di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga mampu memperluas dampaknya secara signifikan.

Keberhasilan program ini tidak hanya terukur dari sisi jumlah sekolah dan siswa, tetapi juga dari peningkatan kualitas pembelajaran. Rata-rata nilai



AN pada aspek *link and match* dengan dunia kerja untuk SMK pelaksana program SMK PK lebih tinggi 10,13 dibandingkan SMK Non-PK yang setara. Hal ini berdasarkan pada analisis PSKP tahun 2023 menggunakan data AN 2022. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan industri. Selain itu, keterlibatan instruktur tamu dari industri serta penyusunan modul ajar yang relevan dengan dunia kerja semakin menguatkan keyakinan bahwa lulusan SMK PK memiliki kompetensi yang lebih siap untuk berkompetisi di dunia kerja.

Evaluasi Program SMK PK Angkatan I pada tahun 2021 yang didasarkan pada data tahun 2022 dan 2023 memperlihatkan adanya kemajuan yang signifikan dalam kerja sama antara sekolah dengan dunia kerja. Beberapa daerah, seperti Samarinda, Maros, NTB, Surabaya, Semarang, Bantul, Bandung, Serang, Padang, dan Lubuk Pakam, menjadi contoh nyata bagaimana kemitraan dengan industri berhasil diimplementasikan melalui perjanjian kerjasama (MoU) yang semakin meningkat. Kerja sama ini tidak hanya memperkuat kualitas pembelajaran siswa, tetapi juga membuka peluang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan kerja nyata.

Secara keseluruhan, data dari AN menunjukkan bahwa Program SMK PK telah memberikan dampak besar dalam menyelaraskan pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja. Peningkatan nilai AN sebesar 10,13 poin menjadi bukti nyata keberhasilan program ini. Ini menunjukkan bahwa Program SMK PK telah berhasil menciptakan kurikulum yang lebih relevan, serta melibatkan dunia usaha dan industri secara lebih mendalam dalam proses pendidikan.

MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-9

KIP Kuliah Merdeka

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka yang diluncurkan pada 26 Maret 2021 sebagai Merdeka Belajar episode kesembilan merupakan beasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas. KIP Kuliah Merdeka merupakan salah satu upaya signifikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memperluas jangkauan dan menyempurnakan implementasi program bantuan pendidikan. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing global. Program KIP Kuliah Merdeka menjadi alat penting dalam meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi masyarakat yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, agar mereka dapat mengenyam pendidikan di program studi unggulan di berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia.

Sebagai bagian dari Program Indonesia Pintar (PIP) di jenjang pendidikan tinggi, KIP Kuliah Merdeka memberikan bantuan kepada mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi lemah. Ini adalah salah satu langkah konkret Kemendikbudristek untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tidak hanya dapat diakses oleh kelompok yang mampu secara finansial, tetapi juga oleh mereka yang kurang beruntung secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang tinggi. KIP Kuliah Merdeka berupaya menciptakan keadilan sosial dengan memberikan kesempatan kepada seluruh anak bangsa, terlepas dari status ekonomi mereka, untuk mengubah nasib melalui pendidikan.

Program ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, meningkatkan akses masyarakat tidak mampu untuk meraih pendidikan tinggi yang lebih merata dan berkualitas. Pendidikan tinggi di Indonesia sering kali terjangkau oleh kelompok ekonomi menengah ke

atas, tetapi dengan KIP Kuliah Merdeka, kesenjangan akses tersebut dapat dikurangi. Kedua, program ini bertujuan untuk meningkatkan keadilan sosial dan mobilitas sosial. Dengan memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang berprestasi, mereka tidak hanya dapat meraih pendidikan tinggi, tetapi juga memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka di masa depan. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan dapat memotong rantai kemiskinan antar-generasi dan



memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi penerus dari keluarga miskin.

Peningkatan Bantuan Biaya

Komitmen Kemendikbudristek dalam program KIP Kuliah Merdeka terlihat dari skema bantuan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain memberikan bantuan biaya pendidikan yang mencakup uang kuliah, program ini juga memberikan bantuan biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan skema sebelumnya. Perubahan ini berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah Merdeka pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah Merdeka meningkat signifikan dari Rp1,3 triliun pada 2020 menjadi sebesar Rp2,5 triliun pada 2021.

Perubahan ini menunjukkan peningkatan alokasi anggaran yang signifikan, yang dirancang untuk mendorong mahasiswa dari keluarga kurang mampu namun berprestasi agar lebih percaya diri dalam melamar ke program studi unggulan di universitas terbaik di seluruh Indonesia, baik di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS).

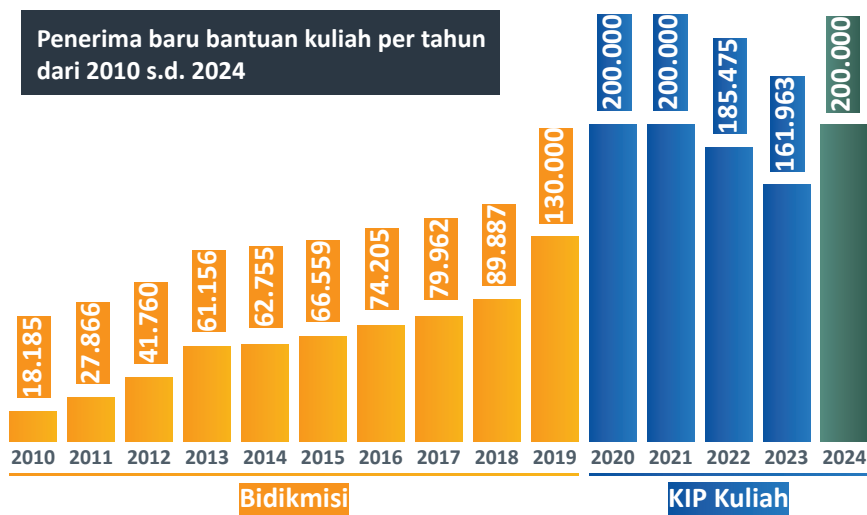
Dengan adanya peningkatan anggaran, besaran dukungan biaya pendidikan kini disesuaikan dengan akreditasi prodi. Untuk prodi berakreditasi A, mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka mendapatkan dukungan biaya kuliah maksimal Rp12 juta. Kemudian, prodi berakreditasi B mendapatkan maksimal Rp4 juta. Sementara mahasiswa yang berkuliah di prodi berakreditasi C mendapatkan biaya kuliah maksimal Rp2,4 juta.

Berbeda dengan skema pada tahun sebelumnya, biaya hidup bagi penerima KIP Kuliah Merdeka Tahun 2021

disesuaikan dengan indeks harga daerah. Indeks ini disesuaikan dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) tahun 2019. Besaran biaya hidup yang diterima mahasiswa pemegang KIP Kuliah Merdeka ini dibagi ke dalam lima klaster daerah. Klaster pertama sebesar Rp800 ribu, klaster kedua sebesar Rp950 ribu, klaster ketiga sebesar Rp1,1 juta. Sedangkan untuk klaster keempat sebesar Rp1.250.000, dan klaster kelima sebesar Rp1,4 juta.

Capain

- Rata-rata IPK Mahasiswa penerima KIP Kuliah terus berada pada kisaran 3,3.
- Setelah peluncuran KIP Kuliah Merdeka di tahun 2021, penerima KIP Kuliah yang masuk Prodi dengan Akreditasi A meningkat menjadi 23%, sementara sebelum KIP Kuliah Merdeka diluncurkan maksimal di 20%. Sebaliknya penerima KIP Kuliah yang masuk Prodi dengan Akreditasi C berkurang menjadi 20%, sementara sebelum KIP Kuliah Merdeka diluncurkan dapat mencapai 23% - 24%.
- Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia di akhir tahun 2021, Program KIP kuliah dinilai positif dan mendapatkan apresiasi yang tinggi, baik dari segi kemanfaatannya maupun prosesnya. Peningkatan



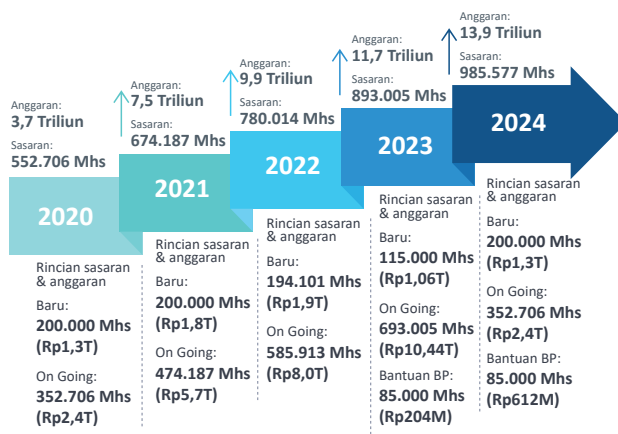
Tahun	Total Penerima
2020	689.478
2021	846.946
2022	941.169
2023	1.065.293
2024*	975.229

*2024 data per 30 September 2024, masih akan bertambah sampai akhir tahun

besaran biaya hidup dinilai sudah memadai dan sudah memperhatikan dengan baik keadilan antar-wilayah.

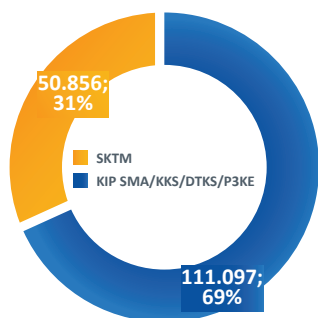
- Total penerima manfaat KIP Kuliah sampai akhir 2023 mencapai 747.438 dan pada akhir 2024 akan ada tambahan 200 ribu penerima baru, sehingga total penerima mencapai 947.438 mahasiswa.
- Jumlah pendaftar KIP Kuliah setiap tahun terus meningkat.
- Anggaran yang dialokasikan meningkat setiap tahun
- Ketepatan sasaran penerima dalam aspek ekonomi

Peningkatan alokasi anggaran per tahun

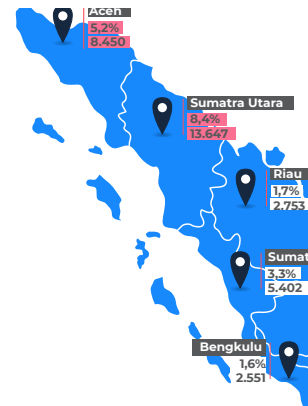


di 2023, 69% sudah berdasarkan basis data ekonomi yang berasal dari penerima PIP SMA, DTKS, dan penerima bantuan sosial lain seperti PPKE. Sementara 31% penerima lainnya masih berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang divalidasi dengan pendapatan orang tua.

Ketepatan sasaran penerima



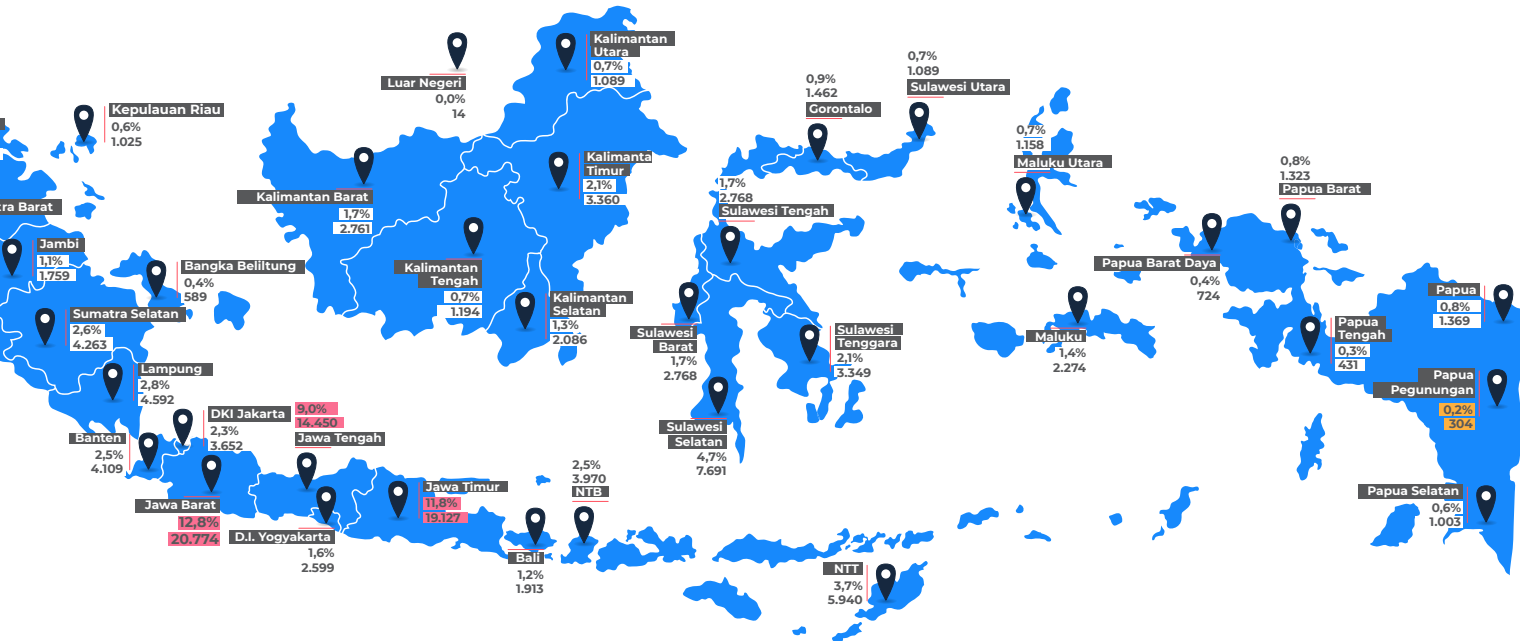
- Program KIP Kuliah menjangkau anak bangsa dari seluruh wilayah di Indonesia untuk kuliah di perguruan tinggi.



Inovasi

- KIP Kuliah Merdeka memberikan kesempatan mahasiswa untuk kuliah para program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik.
- Bidikmisi dan KIP Kuliah di tahun 2020 hanya membayarkan biaya pendidikan sebesar Rp2.400.000 untuk semua Prodi apapun akreditasinya. Hal ini menyebabkan banyak universitas yang menolak peserta KIP Kuliah masuk ke prodi unggulan akibat biaya bantuan pendidikan KIP Kuliah yang kecil, sehingga banyak mahasiswa berprestasi penerima KIP Kuliah yang akhirnya masuk ke prodi yang tidak populer. KIP Kuliah Merdeka memberikan peningkatan biaya pendidikan mulai tahun akademik 2021/2022 ditentukan berdasarkan nilai akreditasi keunggulan program studi dan perguruan tinggi di mana:
 - Prodi dengan nilai akreditasi A atau Unggul besaran biaya pendidikan maksimal Rp.12.000.000 (Prodi Kedokteran) dan Rp8.000.000 (Prodi Non Kedokteran);
 - Prodi dengan akreditasi B atau Sangat Baik besaran biaya pendidikan maksimal Rp4.000.000;
 - Prodi dengan nilai akreditasi C atau Baik besaran biaya pendidikan maksimal sebesar Rp2.400.000.
- KIP Kuliah Merdeka memberikan peningkatan biaya hidup bagi penerima berdasarkan lima klaster wilayah sebagai berikut; (1) Biaya hidup Rp800.000,00 (437 kabupaten/kota); (2) Biaya hidup Rp950.000,00 (54 kabupaten/kota); (3) Biaya hidup Rp1.100.000,00 (10 kabupaten/kota); (4) Biaya hidup Rp1.250.000,00 (6 kabupaten/kota), dan; (5) Biaya hidup Rp1.400.000,00 (7 kota).
- Peningkatan ketepatan sasaran penerima secara

Sebaran asal daerah mahasiswa yang baru menerima KIP Kuliah di tahun 2023



ekonomi dan akademik, sebagai berikut:

- Menambah basis data PPKE sebagai syarat calon penerima.
- Kewajiban penerima baru KIP Kuliah harus terdata di PDDikti sebelum penetapan penerima baru dan pencairan, sedangkan bagi penerima on going harus terdata di PDDikti untuk proses pencairan.
- Penggunaan jenis rekening khusus Bansos KIP Kuliah yang disediakan oleh seluruh Bank Himbara sebagai mitra bank penyalur.
- Informasi proses pencairan pada SIMP KIP Kuliah dapat dilihat langsung oleh penerima KIP Kuliah.

Tantangan

- Kebutuhan anggaran yang setiap tahun semakin besar dengan rata-rata unit cost mencapai Rp9.300.000 per mahasiswa per semester sehingga untuk 200.000 penerima baru dibutuhkan anggaran mencapai Rp3,72 Triyun per tahun (2 semester) belum termasuk anggaran untuk yang on going.
- Masih ada Perguruan Tinggi yang terlambat melakukan pendataan atau pemutakhiran data mahasiswanya di PDDikti sehingga proses

penetapan penerima baru atau pencairan mengalami keterlambatan.

- Masih ada oknum atau pihak ketiga yang melakukan pungutan terhadap penerima KIP Kuliah

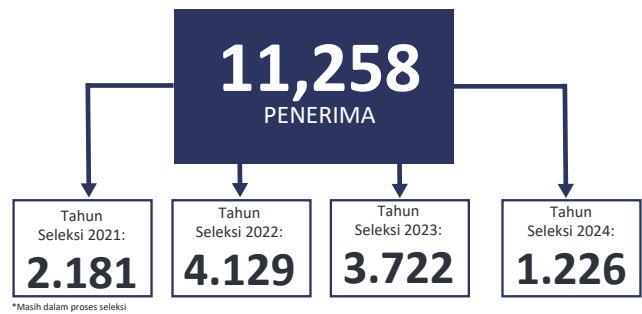
Urgensi Keberlanjutan

- Merupakan program prioritas nasional di bidang pendidikan.
- Memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa pintar dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk berani kuliah pada program studi unggulan di perguruan tinggi terbaik yang umumnya berada pada kota-kota besar dengan biaya hidup tinggi.

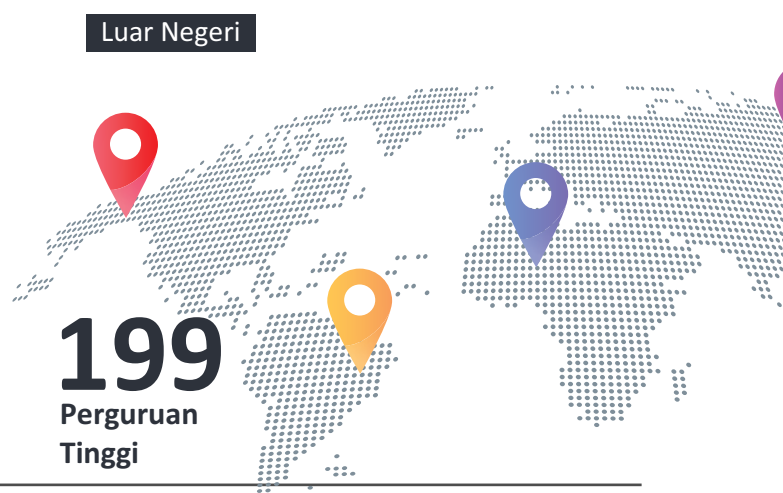
MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-10

Perluasan Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Abadi Pendidikan

Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI Kemendikbudristek) diluncurkan pada 22 April 2021 sebagai episode ke-10 dari Merdeka Belajar. Program unggulan ini dikelola oleh Kemendikbudristek bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan, mencakup beasiswa bergelar (*degree*) dan non-gelar (*non-degree*).



BPI Kemendikbudristek bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemberian beasiswa untuk target khusus pada jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar negeri. Target tersebut meliputi calon guru, guru, calon dosen Perguruan Tinggi Negeri baru, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pelaku budaya. Selain itu, BPI Kemendikbudristek juga ditujukan untuk membantu Peserta Didik berprestasi dan mahasiswa penghuni Asrama Mahasiswa Nusantara untuk mendapatkan gelar pendidikan tinggi.



Rincian Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemendikbudristek 2021 s.d. 2024

No	Skema	Jenjang	Jumlah Penerima				Grand Total
			2021	2022	2023	2024	
1	Asrama Mahasiswa Nusantara AMN (S1)	S1	0	407	27	300	734
2	Beasiswa Indonesia Maju (BIM) S1	S1	223	493	648	457	1821
3	Beasiswa Indonesia Maju (BIM) S2	S2	47	115	0	0	162
4	Beasiswa Kedokteran Kerjasama Oxford S2	S2	0	3	0	0	3
5	Beasiswa Kedokteran Kerjasama Oxford S3	S3	6	1	0	0	7
6	Beasiswa Penyelesaian Studi S3	S3	0	0	280	0	280
7	Calon Dosen Perguruan Tinggi Akademik (PTA) S2	S2	128	118	0	0	246
8	Calon Guru SMK S1	S1	115	48	2135	0	2298
9	Stipendium Hungaricum		0	0	162	0	162
10	Darmasiswa	non Gelar	0	0	282	236	518
11	Dosen LPTK/Pendidikan Profesi Guru	S3	0	3	0	24	27
12	Dosen LPTK/Pendidikan Profesi Guru (Pathway)	S3	0	0	0	0	0
13	Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) S2	S2	23	19	0	0	42
14	Dosen Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) S3	S3	96	139	0	34	269
15	Dosen Perguruan Tinggi Akademik (PTA) S3	S3	1323	2082	6	170	3581
16	Dosen Perguruan Tinggi Akademik (PTA) S3 - JD/DD	S3	0	5	0	0	5
17	Pelaku Budaya S1	S1	35	36	182	0	253
18	Pelaku Budaya S2	S2	66	189	0	4	259
19	Pelaku Budaya S3	S3	16	69	0	1	86
20	Pendidik dan Tenaga Kependidikan S2	S2	71	336	0	0	407
21	Pendidik dan Tenaga Kependidikan S3	S3	32	66	0	0	98
Grand Total			2.181	4.129	3.722	1.226	11.258



Dasar pelaksanaan program BPI Kemendikbudristek merupakan program pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 yang dipetakan sebagai Indikator Kinerja Strategis Kemendikbudristek. Penugasan terkait ini terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan 20% dosen S3, pemenuhan SDM unggul berdaya saing internasional, Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Papua, Peraturan Presiden tentang Asrama Mahasiswa Nasional, dan pemenuhan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sejak diluncurkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, BPI Kemendikbudristek telah berhasil memberikan beasiswa bagi 11.258 penerima.

Inovasi

- Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) berkolaborasi dengan USAID telah menginisiasi program *pathway* pada tahun 2023 sampai dengan 2024 yang ditujukan bagi Dosen Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang akan melanjutkan studi ke jenjang Doktoral di luar negeri. Sasaran utama program ini adalah untuk meningkatkan jumlah dosen yg bersekolah di luar negeri dari LPTK dan daerah yg jarang mengirimkan dosen ke luar negeri.
- Perluasan skema beasiswa untuk calon Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) untuk merespon kekurangan guru di daerah-daerah target.
- Penerapan skema *co-funding* dengan model pembebasan atau penurunan biaya pendidikan, bantuan dana kedatangan (*settlement allowance*), dan kolaborasi dana riset dengan perguruan tinggi tujuan studi.
- Dalam menghitung kebutuhan anggaran, BPPT mulai menggunakan data kertas kerja per individu penerima beasiswa sehingga alokasi anggaran lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan.
- Penambahan fitur layanan bantuan (*helpdesk*) yang terintegrasi dengan sistem monitoring dan evaluasi (*monev*) sehingga memudahkan penerima beasiswa untuk mendapatkan informasi terkait kendala yang dialami.
- Penyederhanaan komposisi *reviewer* pelaksanaan seleksi wawancara. Sebelum tahun 2024, setiap peserta diwawancara oleh tiga *reviewer*, yaitu *reviewer* akademik, *reviewer* psikologis, dan *reviewer* profesional. Namun, mulai tahun 2024, komposisi ini disederhanakan menjadi dua *reviewer*, yaitu *reviewer* akademik dan *reviewer* non-akademik. *Reviewer* akademik bertugas menilai kemampuan substansi peserta sesuai dengan bidang studinya, sementara *reviewer* non-akademik



Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

mencakup penilaian *soft skills*, kesiapan mental, dan potensi kontribusi peserta di luar aspek akademik. Penyederhanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses seleksi sekaligus tetap menjaga kualitas penilaian komprehensif terhadap setiap peserta.

- BPPT mengembangkan *dashboard* fasilitator wawancara untuk mempermudah koordinasi teknis selama proses wawancara. *Dashboard* ini dilengkapi dengan fitur “wa.me”, yang memungkinkan fasilitator untuk langsung menghubungi peserta melalui WhatsApp dengan satu klik, mempercepat proses komunikasi dan memastikan kelancaran teknis pelaksanaan seleksi wawancara.

Tantangan

- Pelaksanaan BPI Kemendikbudristek telah mencapai tahun keempat pada 2024. Pada tahun ini, BPI Kemendikbudristek mulai menuai alumni yang perlu untuk segera diwadahi agar ilmu yang telah didapatkan mampu digunakan secara optimal untuk pengembangan pendidikan di Indonesia.
- Tantangan lain yang dihadapi adalah sebaran penerima BPI Kemendikbudristek yang belum merata. Berdasarkan sebaran penerima sampai pada tahun 2023, penerima BPI Kemendikbudristek masih terfokus pada wilayah Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara. Diperlukan upaya dan sosialisasi yang dapat menjangkau wilayah

lain khususnya daerah timur Indonesia untuk mendukung target pemenuhan kebutuhan guru dan dosen di wilayah timur Indonesia.

Urgensi Keberlanjutan

- BPI Kemendikbudristek perlu tetap dilaksanakan sebagai upaya Kemendikbudristek dalam meningkatkan kualifikasi calon guru, guru, calon dosen Perguruan Tinggi Negeri baru, Dosen, Tenaga Kependidikan, pelaku budaya, serta membantu Peserta Didik berprestasi dan mahasiswa penghuni Asrama Mahasiswa Nusantara untuk mendapatkan gelar pendidikan tinggi.
- Sejak resmi dibentuknya Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT), telah disiapkan dokumen yang diperlukan untuk diajukan menjadi balai yang menerapkan Badan Layanan Umum (BLU). Untuk itu perlu terus ditindaklanjuti, sehingga dapat terealisasi. Dengan demikian dana yang dialokasikan oleh LPDP untuk pembiayaan BPI Kemendikbudristek dapat dikelola langsung oleh BPPT. Selanjutnya pengelolaan BPI Kemendikbudristek mulai dari proses rekrutmen hingga pelaporan perkembangan studi, serta proses pembayaran untuk para penerima beasiswa dapat dilakukan oleh BPPT dan akan menjadikan layanan BPI Kemendikbudristek dapat berjalan lebih cepat dan efisien.



MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-11

Kampus Merdeka Vokasi

Kampus Merdeka Vokasi, yang resmi diluncurkan pada 25 Mei 2021, adalah langkah revolusioner dalam mewujudkan pendidikan tinggi vokasi yang benar-benar terhubung dengan dunia kerja. Program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga produktif dan memiliki daya saing global. Sebagai bagian penting dari transformasi pendidikan vokasi, Kampus Merdeka Vokasi mendorong pendidikan tinggi vokasi untuk dapat menjalin kemitraan yang erat dan mendalam

usaha rintisan berbasis kampus vokasi yang melibatkan kolaborasi intensif dengan industri.

Dalam 4 tahun, kedua program ini semakin diperkuat dalam memenuhi kebutuhan spesifik pendidikan vokasi yang berbasis terapan. Program *Competitive Fund* kini menawarkan lebih banyak opsi untuk perguruan tinggi vokasi, memberikan fleksibilitas dalam memilih fokus penguatan kelembagaan dan tata kelola kemitraan. Penyesuaian strategis ini diharapkan



dengan industri melalui implementasi nyata dari konsep *link and match* dengan dunia kerja.

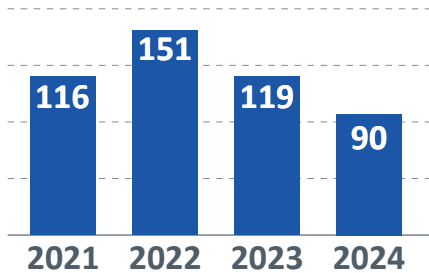
Kampus Merdeka Vokasi ini memiliki dua pilar utama: *Competitive Fund Vokasi* dan *Matching Fund Vokasi*. *Competitive Fund Vokasi* ditujukan untuk mempercepat transformasi pendidikan tinggi vokasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia, sementara *Matching Fund Vokasi* fokus pada pengembangan Pusat Unggulan Teknologi, hilirisasi produk riset terapan, serta pengembangan

dapat memberi ruang lebih besar bagi perguruan tinggi vokasi untuk bertransformasi menjadi institusi yang lebih kuat, adaptif, dan relevan dalam mencetak lulusan yang siap berkontribusi di pasar kerja domestik maupun global.

Competitive Fund Vokasi

Program *Competitive Fund Vokasi* hadir sebagai inisiatif strategis untuk mengakselerasi pengembangan perguruan tinggi vokasi dan program studinya agar semakin relevan dengan perkembangan dunia kerja.

Berhasil membantu 386 Prodi penerima *Competitive Fund*



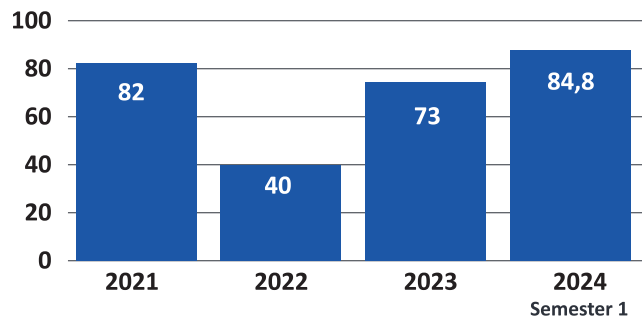
Program ini bertujuan memberikan intervensi dalam sumber daya manusia (SDM) yaitu mahasiswa dan dosen. Namun, pengembangan SDM tidak akan optimal tanpa adanya perubahan mendasar pada lembaga pendidikan tinggi vokasi itu sendiri. Oleh karena itu, *Competitive Fund* Vokasi memberikan peluang bagi perguruan tinggi vokasi untuk melakukan reformasi menyeluruh yang akan memperkuat kapasitas mereka dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dan kompetitif di tingkat global.

Diluncurkan sejak 2021, *Competitive Fund* Vokasi telah berhasil meningkatkan relevansi pendidikan tinggi vokasi dengan kebutuhan dunia kerja. Program ini secara aktif mendorong terjalinnya kemitraan strategis antara perguruan tinggi vokasi dan mitra industri, serta mendukung penciptaan inovasi dalam metode pembelajaran. *Competitive Fund* Vokasi ini digunakan oleh perguruan tinggi vokasi untuk mengembangkan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan industri, meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi, serta mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) yang menghubungkan mahasiswa langsung dengan tantangan dunia industri. Tidak hanya itu, *Competitive Fund* Vokasi juga berperan penting dalam memperkuat infrastruktur pembelajaran, termasuk pengadaan laboratorium dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri yang menjadi mitra perguruan tinggi vokasi tersebut.

Hingga tahun 2024, *Competitive Fund* Vokasi telah

memberikan manfaat bagi 79 perguruan tinggi vokasi, baik negeri maupun swasta, dengan total 386 program studi penerima bantuan. Alokasi anggaran program ini mengalami dinamika dari tahun ke tahun, mencerminkan prioritas pendanaan yang berubah sesuai kebutuhan nasional. Pada 2021, dana yang dialokasikan mencapai Rp 82 miliar untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Pada 2022, alokasi turun menjadi Rp 40 miliar seiring dengan kebijakan pemerintah yang fokus pada pemulihan pasca-pandemi COVID-19. Namun, di tahun 2023, alokasi dana kembali naik menjadi Rp 73 miliar, menandakan komitmen pemerintah untuk mendukung pendidikan vokasi. Pada semester pertama 2024, anggaran mencapai puncaknya sebesar Rp 84,8 miliar. Peningkatan ini secara langsung diarahkan untuk memperkuat kompetensi dosen melalui pelatihan dan sertifikasi, serta untuk mendorong inovasi kurikulum yang lebih selaras dengan tuntutan industri.

Anggaran competitive fund vokasi (Rp miliar)



Manfaat program ini terlihat nyata dalam kualitas lulusan yang dihasilkan. Dengan dukungan *Competitive Fund* Vokasi, lulusan dari program studi yang menerima dana menjadi lebih kompetitif di pasar kerja karena mereka dibekali keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dinamika industri. Pendidikan tinggi vokasi juga menjadi lebih adaptif dalam menanggapi perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja global.

Secara umum, *Competitive Fund* Vokasi telah

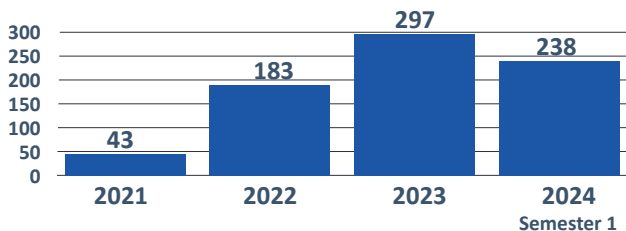
menciptakan berbagai dampak positif yang signifikan, di antaranya:

1. Meningkatkan relevansi kurikulum Pendidikan tinggi vokasi dengan tuntutan industri melalui integrasi standar industri dalam proses pembelajaran.
2. Meningkatkan kompetensi dosen vokasi dengan menyediakan pelatihan dan sertifikasi yang meningkatkan kualitas pengajaran.
3. Menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dan mampu bersaing di pasar global, karena keterampilan yang mereka pelajari sesuai dengan kebutuhan industri terkini.
4. Memperkuat kapasitas perguruan tinggi vokasi dengan meningkatkan fasilitas pembelajaran, seperti laboratorium dan peralatan teknologi canggih.

Selain itu, *Competitive Fund* Vokasi telah berhasil memfasilitasi pembentukan *teaching factory* di banyak program studi penerima manfaat. *Teaching factory* ini tidak hanya menjadi wujud kemitraan yang erat antara pendidikan vokasi dan industri, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pendidikan vokasi yang ideal, di mana pembelajaran praktik langsung dengan

Industri berkontribusi besar dalam perkembangan penelitian Perguruan Tinggi Vokasi

Jumlah penelitian yang didanai oleh industri



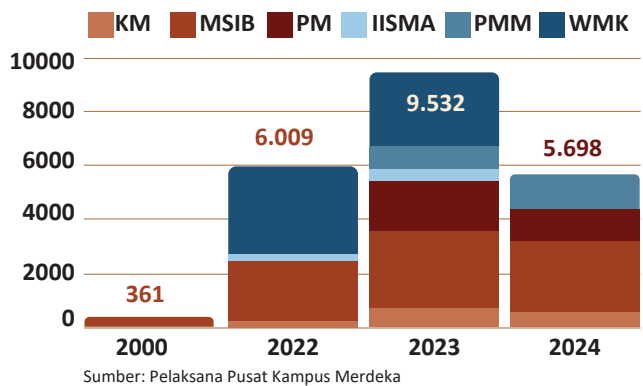
standar industri menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Program *Competitive Fund* Vokasi terus berkomitmen untuk memperkuat daya saing Pendidikan tinggi vokasi di Indonesia, memastikan bahwa perguruan tinggi vokasi tidak hanya mampu mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga menjadi pusat inovasi dan kemitraan strategis yang mendukung

perkembangan industri di tingkat nasional maupun global.

Matching Fund Vokasi

Fokus kedua pada Merdeka Belajar Episode ke 11 ini adalah *Matching Fund* Vokasi. Melalui program ini, Kemdikbudristek terus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi vokasi dan dunia kerja. Program ini bertujuan mendorong dosen dan mahasiswa vokasi untuk mengembangkan riset dan inovasi yang langsung dapat diterapkan oleh industri. Melalui *Matching Fund* Vokasi, perguruan tinggi vokasi yang berhasil mendapatkan pendanaan riset dari

Jumlah program Merdeka Belajar Pendidikan Tinggi Vokasi



mitra industri akan menerima dana tambahan dari pemerintah senilai yang diinvestasikan oleh mitra industri tersebut. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi vokasi dan industri dalam menyelesaikan tantangan nyata di lapangan, memberdayakan masyarakat, serta memperkuat kebijakan strategis nasional.

Diluncurkan pada tahun 2021, Program *Matching Fund* Vokasi telah berhasil menciptakan ekosistem kolaboratif yang sangat produktif antara perguruan tinggi vokasi dan dunia industri. Selama tiga tahun pelaksanaannya, program ini telah membuahkan berbagai inovasi penting yang tak hanya relevan dengan kebutuhan industri tetapi juga memberikan dampak nyata pada masyarakat. Secara konsisten

terjadi kenaikan pada jumlah proyek riset terapan bersama mitra industri. Jumlah mitra industri yang meningkat setiap tahunnya menunjukkan semakin tinggi minat kolaborasi industri dengan perguruan tinggi vokasi. Riset terapan yang didanai *Matching Fund* Vokasi ini melibatkan dosen dan mahasiswa vokasi. Jumlah dosen dan mahasiswa yang terlibat pun meningkat dari tahun ke tahun. Hingga 2024, keterlibatan dosen berjumlah 1243 dan keterlibatan mahasiswa berjumlah 3527. Dana investasi dari industri yang terkumpul bertotal Rp 289 miliar semenjak 2021. Hal ini menunjukkan animo yang besar terhadap program *Matching Fund* Vokasi dari pihak perguruan tinggi vokasi maupun industri. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada peningkatan signifikan Indeks Inovasi Global (*Global Innovation Index/GII*) Indonesia dari 87 (tahun 2021) menjadi 61 (tahun 2023), dimana skor kolaborasi antara universitas dan industri menjadi salah satu *key indicator*, menunjukkan perbaikan hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja yang semakin kuat.

Matching Fund Vokasi menggunakan platform terpadu yaitu Kedaireka. Platform ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Bersama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Di dalam platform ini, industri dapat dengan mudah terhubung dan bermitra dengan perguruan tinggi vokasi dan akademik, menciptakan sinergi untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemitraan strategis ini memungkinkan perguruan tinggi untuk berperan lebih besar dalam menyediakan solusi inovatif yang langsung diimplementasikan di dunia industri.

Untuk memastikan efektivitas program *Matching Fund* Vokasi, diperlukan strategi kemitraan yang lebih luas dan masif agar industri memiliki kepercayaan lebih besar dalam mendukung riset terapan berkaliber tinggi yang melibatkan mahasiswa perguruan tinggi vokasi. Dengan kemitraan yang lebih kuat, industri dapat mengakui lebih banyak mahasiswa vokasi yang terlibat dalam *real-based projects*, sehingga mereka

mendapatkan pengalaman langsung dan keterampilan yang relevan, yang secara otomatis meningkatkan daya saing mereka di pasar tenaga kerja. Dengan program *Matching Fund* Vokasi, Kemdikbudristek menegaskan komitmennya dalam mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pendidikan vokasi dan industri, menciptakan inovasi yang berdampak, serta memastikan lulusan perguruan tinggi vokasi siap menghadapi tantangan global.

Sejak diluncurkan pada 2021, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) mengalami lonjakan peserta yang signifikan, dari hanya 361 mahasiswa pada 2021 menjadi 9.532 peserta di 2023. Hingga semester



pertama 2024, 5.698 mahasiswa telah ikut serta, menunjukkan antusiasme yang terus meningkat.

Program MBKM memberikan kebebasan belajar di luar kampus, yang menjadi krusial untuk memastikan relevansi kompetensi lulusan vokasi. MBKM tidak hanya bertujuan mencetak lulusan siap kerja, tetapi juga memerdekakan potensi mahasiswa dengan berbagai pengalaman nyata yang relevan dengan dunia industri. Melalui program ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk magang, studi independen, mengajar, mengikuti proyek kewirausahaan, hingga program pertukaran pelajar, baik di dalam maupun luar negeri.

Kampus Merdeka adalah langkah besar dalam transformasi pendidikan vokasi, memastikan setiap mahasiswa mendapatkan pembelajaran bermakna yang menghubungkan ilmu dengan praktik nyata. Program ini merupakan fondasi penting dalam menciptakan lulusan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga siap berinovasi dan bersaing di kancah global.

Tantangan

Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam menghadapi bonus demografi, khususnya terkait pengangguran lulusan pendidikan tinggi dan kebutuhan akan tenaga kerja terampil. Pada 2030, diproyeksikan akan ada peningkatan permintaan tenaga kerja terampil sebesar 60 juta orang. Dengan populasi usia produktif yang mencapai 70,72% (BPS 2020), Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, peluang ini juga disertai tantangan serius, seperti:

1. Tingkat pengangguran terbuka yang mencapai 5,45%, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di ASEAN (*Trading Economy*, Februari 2023).
2. Sebanyak 9,9 juta anak muda usia 15-24 tahun tergolong NEET (*Not in Education, Employment, or Training*) alias tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan (BPS, Agustus 2023).
3. Satu dari lima anak muda di Indonesia saat ini menganggur (Sakernas, Agustus 2020).

Selain itu, perubahan lanskap ketenagakerjaan masa depan juga menambah kompleksitas tantangan ini.

Diperkirakan:

1. Sekitar 1-2 dari setiap pekerja yang ada memerlukan *reskilling* atau pelatihan ulang agar tetap relevan (WEF, 2020).
2. Sebanyak 23 juta pekerjaan di Indonesia akan tergantikan oleh otomatisasi atau robotisasi pada 2030 (Survei McKinsey & Company, 2019).
3. Lebih dari 50% tenaga kerja di Indonesia akan membutuhkan *reskilling* agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin berubah (WEF, 2020).
4. Sekitar 10 juta pekerjaan baru akan membutuhkan keterampilan yang sangat berbeda dari yang ada saat ini (McKinsey, 2019).

Di latar belakang tantangan ini, Kampus Merdeka Vokasi menjadi program yang sangat penting dan strategis. Program ini berperan kunci dalam menjawab tantangan nasional dengan memastikan lulusan perguruan tinggi vokasi memiliki keterampilan yang relevan dan siap kerja. Melalui integrasi pendidikan vokasi dengan dunia kerja, Kampus Merdeka Vokasi membantu menjembatani kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Dengan



dukungan konkrit seperti *Competitive Fund* Vokasi dan *Matching Fund* Vokasi, perguruan tinggi vokasi dapat lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan keterampilan baru.

Selain yang sudah disebut di atas, Kampus Merdeka Vokasi telah membantu meningkatkan keterampilan dan kompetensi mahasiswa, memperkuat keterhubungan antara pendidikan dan industri, serta memajukan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat dan ekonomi nasional :

- 28.269 mahasiswa mengikuti sertifikasi kompetensi, sehingga lulusan siap dengan keterampilan yang diakui industri.
- 1.229 program studi telah menerapkan kurikulum *link and match* yang semakin relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
- 54% mata kuliah berbasis proyek (PBL) yang melibatkan industri dengan erat.
- 502 pengakuan internasional atas karya penelitian dosen dan mahasiswa PTV diakui secara global.
- 537 program studi melaksanakan hilirisasi penelitian untuk masyarakat dan industri.

Kampus Merdeka Vokasi ini memungkinkan mahasiswa terlibat langsung dalam proyek nyata di dunia industri, memperkuat kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lanskap pekerjaan, dan pada akhirnya, menurunkan tingkat pengangguran di kalangan lulusan vokasi. Inisiatif ini juga berkontribusi dalam mendorong *reskilling* dan *upskilling* tenaga kerja Indonesia, mempersiapkan mereka menghadapi otomatisasi, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan khusus. Dengan demikian, Kampus Merdeka Vokasi tidak hanya menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan Indonesia untuk masa depan ketenagakerjaan yang lebih cerah, mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Urgensi Keberlanjutan

Urgensi keberlanjutan Kampus Merdeka Vokasi tidak bisa diabaikan, mengingat dampak positif yang telah dihasilkan oleh program-programnya. Keberhasilan dalam menciptakan lulusan vokasi yang siap kerja, relevan dengan kebutuhan industri, dan mampu bersaing secara global menjadi bukti nyata bahwa program ini adalah kunci masa depan pendidikan vokasi di Indonesia. Melanjutkan program ini dengan peningkatan pelaksanaan dan penguatan kapasitas pengelola serta lembaga-lembaga terkait menjadi langkah strategis untuk menjaga momentum transformasi ini.

Tanpa keberlanjutan, potensi besar yang telah tercipta akan terhenti, sementara kebutuhan industri dan dunia kerja terus berkembang pesat. Dengan terus mendukung Kampus Merdeka Vokasi, kita tidak hanya menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga membangun ekosistem pendidikan yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan menjadi penggerak perkembangan ekonomi Indonesia.

Program ini bukan sekadar jawaban untuk tantangan saat ini, tetapi juga investasi jangka panjang untuk Indonesia Emas 2045, di mana tenaga kerja terampil dan inovatif akan menjadi fondasi utama kemajuan bangsa.



MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-12

Sekolah Aman Berbelanja Bersama SIPLah

Merdeka Belajar Episode Kedua belas: Sekolah Aman Berbelanja dengan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) diluncurkan untuk meningkatkan kemudahan dan keamanan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) oleh sekolah menggunakan sumber dana bantuan pemerintah.

Pada tahun 2021, pemerintah menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp53,4 triliun ke lebih dari 216 ribu sekolah untuk membantu pemenuhan kebutuhan belanja operasional. Total anggaran BOS meningkat dari Rp51,2 triliun di tahun 2019 menjadi Rp53,4 triliun di tahun 2021. Sejak diinisiasi pada tahun 2019, SIPLah telah membantu satuan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Pada 26 Agustus 2021, penyempurnaan fitur SIPLah diluncurkan sebagai Merdeka Belajar episode kedua belas.

SIPLah bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. Kini sekolah dapat berbelanja dengan semakin aman sebab alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Pendidikan. Selain itu, transformasi ini juga menghadirkan lebih banyak pilihan mitra penyedia dan mitra pengiriman. Fitur-fitur yang tersedia juga lebih lengkap, yang terdiri dari pembatalan transaksi, aduan, serta *dashbord* pemantauan status transaksi untuk menghindari kesalahan maupun penipuan.

Penyempurnaan fitur SIPLah membantu sekolah membelanjakan dana BOS secara fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, termasuk untuk melengkapi daftar periksa Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang diatur di dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Selain itu, pembaruan ini juga membantu proses pelaporan karena semua proses transaksi terdokumentasi dengan baik. Pendokumentasian elektronik untuk setiap transaksi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses PBJ.

Hal ini meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan tingkat harga keseluruhan cenderung lebih rendah. Di samping itu, penyempurnaan fitur SIPLah juga membuka kesempatan bagi lebih banyak pelaku UMKM di daerah untuk ikut bergabung sebagai penyedia barang dan jasa.



Capaian dan Inovasi

Pada 2021 jumlah pengguna aktif SIPLah sebanyak lebih dari 153 ribu satuan pendidikan, kemudian meningkat signifikan pada 2024 mencapai lebih dari 301 ribu satuan Pendidikan. Inovasi pengadaan pada kuartal kedua 2021 sudah mengakumulasi lebih dari 1.073.897 jumlah transaksi bernilai Rp 12,6 triliun, dari 26.025 penyedia barang dan jasa yang ada di platform pengadaan daring tersebut. Pada 2022 penambahan transaksi senilai Rp 2,4 triliun.

Saat ini, nilai transaksi pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan yang terbayar dan terdokumentasi melalui SIPLah mencapai lebih dari Rp 40 triliun.

Urgensi Keberlanjutan

Meski demikian, SIPLah telah berhasil memperluas jangkauannya hingga ke daerah-daerah rural, dan sangat bermanfaat bagi daerah terpencil yang punya keterbatasan akses terhadap berbagai produk. Selain itu SIPLah juga memungkinkan efisiensi dalam proses pengiriman barang ke sekolah. Sebelumnya tidak dapat memantau status pemesanan, sekarang sekolah bisa memantau status pemesanan melalui dashboard SIPLah. Salah seorang Guru di SMP Satu Atap YPPK Tanah Merah, Boven Digul, Papua mengatakan SIPLah dapat memotong waktu pengiriman kebutuhan sekolah dari dua bulan menjadi satu atau dua minggu saja.

Tahun	Jumlah Satdik	Jumlah Transaksi	Jumlah Penyedia Aktif	Nilai Transaksi (Rp)
2021	146,124	1,173,619	30,806	5,129,997,638,916
2022	211,674	2,592,239	45,873	11, 170,817,016,608
2023	237,006	3,396,784	58,479	13,810,742,306,993
2024	237,006	2,677,524	59,867	11,054,143,633,829

Sejalan dengan peningkatan akuntabilitas sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Sebanyak 1,8 juta pilihan produk tersedia di SIPLah. Lebih dari 250 ribu penyedia adalah UMKM yang berkolaborasi dengan SIPLah melalui 9 mitra pengelola pasar daring SIPLah.

Tantangan

Bukan tanpa tantangan, pada praktiknya masih terjadi kesenjangan akses dan pemanfaatan SIPLah untuk wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Ditinjau dari statistik rata-rata login ke dalam platform pada wilayah-wilayah tersebut, rata-rata tingkat login berada di angka 3%, dan 55% di antaranya sudah menyelesaikan transaksi di SIPLah. Bandingkan dengan wilayah non 3T yang rata-rata tingkat loginnya sebanyak 25%, dengan 64% sekolah sudah menyelesaikan transaksi.



Keuntungan lain dari SIPLah tertangkap dari hasil survei Oliver Wyman. Menurut survei tersebut SIPLah memberikan keuntungan yang signifikan dalam proses pengadaan. Responden mengakui platform SIPLah mampu menghemat waktu, 75% responden mengapresiasi efisiensi platform dalam proses pencarian produk yang relevan. 62% menyebut pendokumentasian dalam setiap transaksi jadi lebih mudah.

Beberapa kategori produk yang paling banyak dicari di SIPLah adalah alat tulis kantor yang terjual sebanyak 3 juta produk, elektronik terjual 2 juta produk, alat peraga sekolah terjual 1 juta produk, peralatan rumah tangga terjual 1 juta produk, buku terjual 800 ribu produk, produk kesehatan terjual 500 ribu produk, alat dan jasa pertukangan terjual sebanyak 400 ribu produk, jasa cetak terjual 300 ribu produk, makanan dan minuman terjual 300 ribu produk.



MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-13

Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana

Untuk pertama kalinya di Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadirkan kanal media khusus budaya yang dinamakan Indonesiana. Kanal media ini bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan, serta mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat Indonesia. Kanal Indonesiana diluncurkan sebagai Merdeka Belajar Episode ke-13, yakni “Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana”.

Dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku, dan 718 bahasa daerah, Indonesia adalah negara yang tangguh dan tumbuh dalam keberagaman. Hal itulah yang menjadi semangat bersama untuk menghadirkan dan memanfaatkan kanal Indonesiana. Kanal budaya Indonesiana merupakan saluran multi-kanal platform media yang memublikasikan pengetahuan dan informasi publik seputar kebudayaan yang hidup di Indonesia.

Kanal budaya Indonesiana diharapkan ikut berperan membangun ekosistem kebudayaan yang menyatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman, kegembiraan, keterbukaan, dan kesetaraan.

Pengetahuan dan informasi seputar kebudayaan tersebut diproduksi dalam bentuk konten audiovisual dan teks yang dipublikasikan melalui jaringan televisi kabel dan *website* dan *mobile app* bernama INDONESIA.TV. Kanal ini juga dapat diakses melalui siaran televisi jaringan Indihome saluran 200 (SD) dan 916 (HD).



Capaian *audiens* Indonesiana TV

PLATFORM	JUMLAH AUDIENS
Media Sosial	5.879.401 Audiens
Indihome	2.170.288 Audiens
Youtube	616.758 Audiens
OTT	63.826 Audiens
Wiwara	1.020 Audiens

Jumlah konten Indonesiana TV

NO	KATEGORI	JUMLAH/EPS	DURASI TOTAL
1	Dokumenter	505	130:51:43
2	Film	222	58:40:49
3	Variety Show	145	47:34:01
4	Animasi	61	10:53:42
5	Drama Musikal	41	12:51:57
6	Seni Teater	34	16:32:48
7	Seni Pertunjukan	43	59:58:47
8	Kuliner	12	4:09:14
9	Edukasi	100	40:51:21
10	Talkshow	32	28:21:05
11	Anak	140	36:44:25
12	Musik	7	4:50:25
13	ENG-EFP 2023	150	22:39:08
14	ENG-EFP 2024	136	14:48:44



MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-14

Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah memperkuat komitmennya dalam memberantas ‘tiga dosa besar’ dalam dunia pendidikan, meliputi: perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Berbagai langkah konkret telah dilakukan, termasuk penetapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKS) yang menjadi kebijakan Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Permendikbudristek PPKS hadir sebagai terobosan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang berpihak pada korban dan mampu membentuk lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif bagi seluruh sivitas akademika untuk pembelajaran dan pengaktualisasian diri.

Tujuan Permendikbudristek PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi:

1. Pemenuhan hak pendidikan setiap WNI. Salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap WNI atas pendidikan tinggi yang aman.
2. Penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan. Substansi Permendikbudristek PPKS memberi kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas.
3. Peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Seluruh kampus di Indonesia menjadi semakin teredukasi tentang isu dan hak korban kekerasan seksual.
4. Penguatan kolaborasi antara Kemendikbudristek dan Perguruan Tinggi. Semangat kolaboratif antara Kementerian dan kampus-kampus dalam

menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman semakin kuat.

Salah satu mandat penting yang diatur dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di seluruh Perguruan Tinggi. Satgas PPKS memiliki tugas dan fungsi membantu pemimpin Perguruan Tinggi untuk melakukan langkah konkret terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Pembentukan Satgas PPKS di PTS masih menghadapi tantangan, antara lain: a) masih ada beberapa Pemimpin PTS yang belum memahami pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sehingga pembentukan Satgas PPKS tidak menjadi program prioritas; b) beberapa PTS memiliki keterbatasan sumber daya; c) beberapa PTS dalam proses penggabungan perguruan tinggi.

Dalam menjalankan tugas Satgas PPKS, Kesadaran dan pemahaman Pemimpin Perguruan Tinggi dalam Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satgas PPKS sangat dibutuhkan, di antaranya: a) penyediaan sarana dan prasarana operasional; b) pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan; c) perlindungan keamanan bagi anggota Satgas PPKS; dan d) pendampingan hukum bagi anggota Satgas PPKS. Walaupun sudah banyak Perguruan Tinggi yang telah aktif dalam mengimplementasikan PPKS, namun masih dijumpai Satgas PPKS yang masih terkendala dalam mengimplementasikan PPKS karena kurang optimalnya dukungan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Semangat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, tidak hanya berhenti dengan menjadi aktivitas administratif berdasarkan regulasi yang sudah diterbitkan, namun menjadi sebuah pergerakan yang nyata yang mulai bergerak meluas ke seluruh perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Regulasi ini tidak sekedar mengajak banyak pihak mengubah paradigma yang selama ini terjadi, namun juga mengajak para akademisi untuk aktif menyuarakan kepedulian dan turut memperjuangkan hak-hak korban. Dengan diwajibkannya terbentuk Satuan Tugas PPKS di masing-masing perguruan tinggi memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan maupun penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Satgas PPKS terbukti memberikan dampak yang luar biasa dalam upaya mewujudkan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Satgas PPKS telah sukses menjadi konektor yang menghubungkan berbagai elemen dan menginisiasi diskusi dengan pimpinan perguruan tinggi, serta aktif melakukan kampanye dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Selain itu, Satgas PPKS juga mampu melakukan advokasi serta mendorong semakin banyaknya kajian mengenai isu gender, HAM, kelompok rentan, dan isu kekerasan seksual.

Dengan meningkatnya kepercayaan warga kampus terhadap kinerja Satgas PPKS, berdampak dengan masuknya laporan kekerasan selain kekerasan seksual yang diterima Satgas PPKS. Hal tersebut menandakan, bahwa unit seperti Satgas PPKS menjadi organ vital dalam upaya pencegahan dan penanganan

kekerasan yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Pada akhirnya regulasi ini berhasil menciptakan ekosistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tinggi, dan meningkatkan partisipasi aktif dari warga kampus untuk bergerak bersama memerangi kekerasan, dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang setara, aman, dan nyaman.



Dalam rangka mengoptimalkan implementasi Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, Kemendikbudristek melalui Pusat Penguatan Karakter telah mengembangkan berbagai perangkat dan intervensi untuk memperkuat peran Perguruan Tinggi.

Semenjak pemberlakuan Permendikbudristek PPKS sampai dengan Juli 2024, Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek telah menerima sebanyak 122 laporan kekerasan tersebut meliputi kasus kekerasan seksual sebesar 75%, kasus kekerasan perundungan sebesar 20%,

dan kasus kekerasan intoleransi sebesar 5%. Melihat berbagai fenomena kekerasan yang kian marak dengan berbagai bentuk-bentuk kekerasan di perguruan tinggi, Kemendikbudristek melakukan konsultasi publik dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Hasil konsultasi publik menunjukkan bahwa terdapat bentuk-bentuk kekerasan lain yang terjadi di perguruan tinggi, yaitu kekerasan fisik, psikis, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa Kemendikbudristek perlu memperkuat regulasi dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan lainnya di perguruan tinggi.

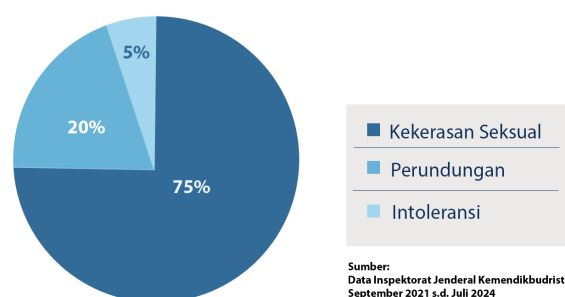
Capaian Program (Utama) Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Tahun 2021 s.d. 2024

No	2021	2022	2023	2024
1	Penerbitan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi	Persesjen Kemendikbudristek Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang PPKS di Lingkungan Perguruan Tinggi	Kolaborasi dan kemitraan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi	Evaluasi nasional terhadap Permendikbudristek PPKS
2	<i>Learning Management System (LMS)</i> pelatihan dan seleksi calon panitia seleksi dan pelatihan anggota satuan tugas PPKS	Modul pembelajaran PPKS untuk mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Peningkatan kapasitas Satgas PPKS di perguruan tinggi negeri	Penguatan peran mahasiswa dan komunitas kampus melalui kampanye kesadaran, pembuatan kelompok advokasi, dan program mentoring terkait pencegahan kekerasan seksual
3	Konten-konten Seri Edukasi Permendikbudristek PPKS		Rapat Koordinasi Nasional Satgas PPKS	Pendampingan percepatan pembentukan Satgas PPKS di perguruan tinggi swasta
4	Lomba Pantun Rap Nusantara (Panturap) yang berisi ajakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dari kekerasan seksual			Pendampingan peningkatan kapasitas Satgas PPKS di perguruan tinggi swasta

Melihat fakta dan data bahwa kekerasan yang terjadi di Perguruan Tinggi tidak hanya meliputi kekerasan seksual, maka Kemendikbudristek kemudian merancang regulasi yang memperkuat kebijakan yang telah ada dengan menerbitkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbudristek PPKPT). Beberapa hal pokok yang akan diperkuat melalui regulasi PPKPT yaitu:

1. Bentuk kekerasan: akan diatur 6 bentuk kekerasan meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan
2. Satuan Tugas: penyederhanaan mekanisme pembentukan Satuan Tugas, serta mempertegas apa saja hal dan kedudukan Satuan Tugas dalam structural Organisasi PT
3. Lokasi Kasus: Mengatur mekanisme cakupan penanganan kasus yang melibatkan lebih dari 1

Laporan Kasus Kekerasan di Perguruan Tinggi



- perguruan tinggi/dalam lokasi lain yang terkait pelaksanaan Tridharma
4. Mekanisme penanganan: Mengatur mekanisme rujukan kasus kekerasan yang tidak terkait pelaksanaan Tridharma ke mekanisme etik/disiplin pegawai
5. Pendanaan: Pendanaan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi dialokasikan oleh Perguruan Tinggi

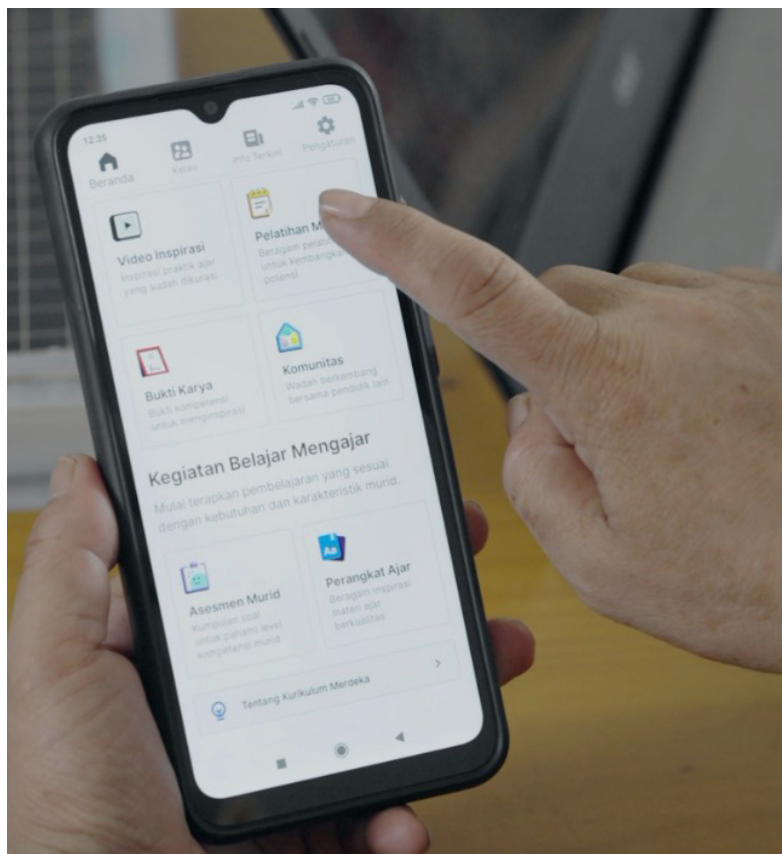
MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-15

Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (*learning crisis*) yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antarwilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum.

Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) diperlukan kebijakan pemulihan pembelajaran dalam jangka waktu tertentu terkait dengan implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan. Implementasi kurikulum oleh satuan pendidikan dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik dan harus memperhatikan ketercapaian kompetensi peserta didik di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran.

Kurikulum Merdeka adalah salah satu alat bantu utama untuk melakukan transformasi pendidikan dan mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar



sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Dalam hal ini, konsep pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan atau diuraikan dalam profil pelajar Pancasila.

Kurikulum Merdeka dirancang dengan prinsip:

1. Pengembangan karakter, yaitu pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik;
2. Fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat.
3. Berfokus pada muatan esensial, yaitu berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk

mengembangkan kompetensi dan karakter Peserta Didik agar Pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Muatan esensial juga dibuat lebih relevan dengan tantangan zaman dan isu terkini, seperti perubahan iklim, literasi finansial, literasi digital, dan literasi kesehatan.

Pada tahun ajaran 2024/2025 sudah 81% satuan pendidikan (data per 25 September 2024) yang sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka. Survei pada 164 ribu sekolah menunjukkan, sebagian besar guru merasakan manfaat Kurikulum Merdeka. Lebih dari 97% guru menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa Kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas untuk merancang pembelajaran sesuai kondisi murid dan sekolah.

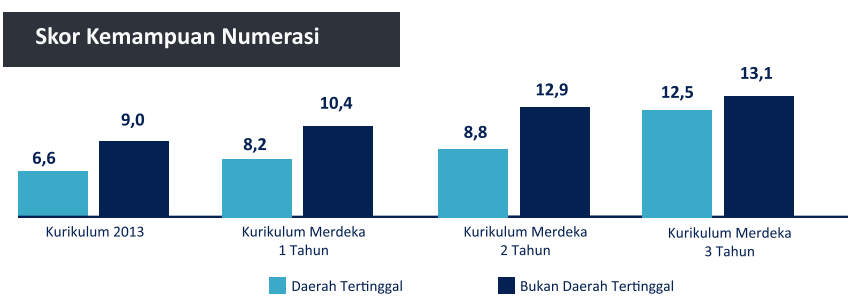
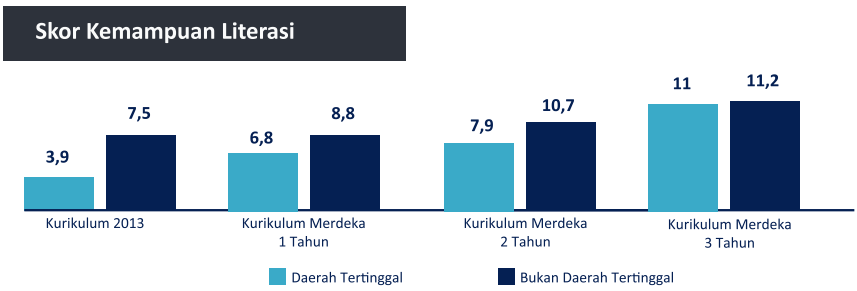
Sejak diluncurkan pada tahun 2022, kini lebih dari 300 ribu satuan pendidikan telah menerapkan Kurikulum Merdeka secara sukarela. Data Asesmen Nasional tahun 2021-2023 menunjukkan dampak positif penerapan Kurikulum Merdeka. Lebih lanjut, hasil Rapor Pendidikan tahun 2023 menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka mengalami peningkatan literasi, numerasi, karakter, inklusivitas, dan kualitas pembelajaran.

Kurikulum Merdeka telah terbukti memberikan manfaat pada satuan pendidikan dalam peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik baik di daerah tertinggal maupun non-tertinggal.

Pada 2024, Kemendikbudristek resmi menerapkan Kurikulum Merdeka secara nasional melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang

Peningkatan Skor Kemampuan Literasi dan Numerasi di SD/Sederajat

Peningkatan kompetensi siswa terjadi di daerah tertinggal, terutama daerah 3T (tertinggal, terpencil, terdepan) yang menerapkan Kurikulum Merdeka



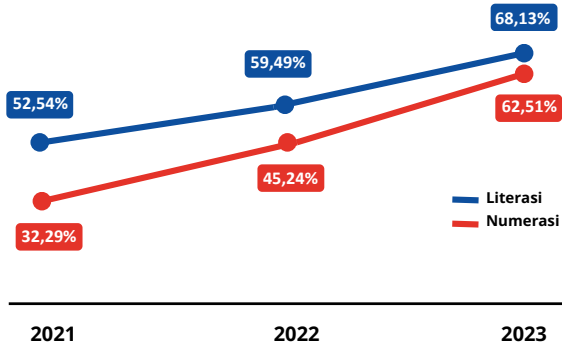
Keterangan:
Berdasarkan hasil Asesmen Nasional dari 2021-2023 di sekolah yang sama.

Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Regulasi ini menjadi payung hukum sekaligus kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi seluruh masyarakat, khususnya para pendidik, kepala satuan pendidikan, dan dinas pendidikan.

Platform Merdeka Mengajar

Sejalan dengan peluncuran Kurikulum Merdeka, Kemendikbudristek meluncurkan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Saat ini Platform Merdeka Mengajar telah digunakan lebih dari 4,3 juta guru dan tenaga kependidikan, 225 ribu sekolah, lebih dari 267 ribu PTK telah mengunggah lebih dari 774 Bukti Karya ke dalam PMM. Platform digital ini dibangun untuk menunjang implementasi Kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang Kurikulum Merdeka.

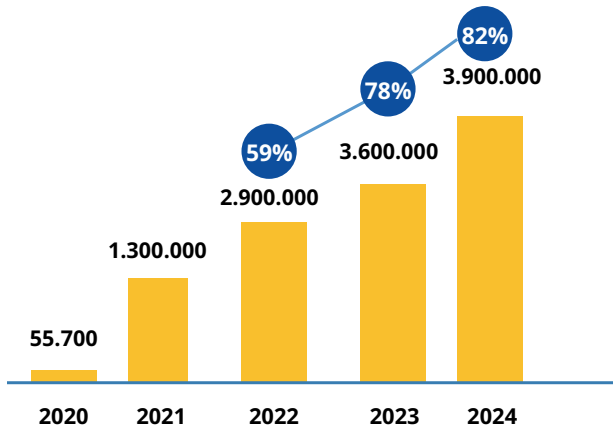
Persentase peserta didik yang mencapai batas minimum kompetensi



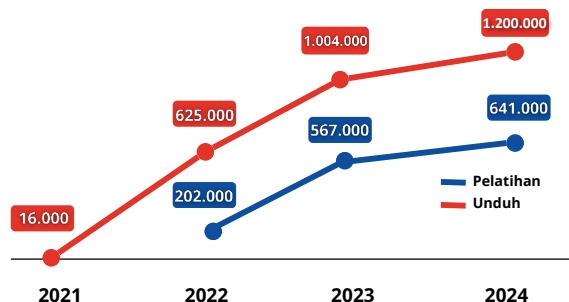
Keterangan:

- Kompetensi literasi dan numerasi diukur lewat Asesmen Nasional
- Kemahiran berbahasa Indonesia diukur lewat Ujian Kemampuan Berbahasa Indonesia

Jumlah guru yang log-in dan persentase yang aktif menggunakan Platform Merdeka Mengajar



Jumlah guru yang selesai pelatihan mandiri dan mengunduh perangkat ajar di Platform Merdeka Mengajar



Sebagai teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya, platform ini dilengkapi berbagai fitur untuk membantu guru dalam mengakses materi ajar, mengikuti pelatihan, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Terbaru, PMM juga dilengkapi dengan fitur Pengelolaan Kinerja yang merupakan bentuk pengintegrasian e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam PMM. Dengan fitur ini, guru dan kepala sekolah dapat mengisi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam waktu yang singkat tanpa melakukan pengisian rencana kerja secara manual.

Inovasi yang dihadirkan menawarkan sejumlah manfaat signifikan. Pertama, Pengelolaan Kinerja memfasilitasi guru dan kepala sekolah dalam melakukan pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi, proses pengembangan diri menjadi lebih terstruktur dan terarah.

Kedua, fitur ini memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi guru dan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Penghargaan ini tidak hanya meningkatkan motivasi, tetapi juga memberikan apresiasi yang layak atas dedikasi mereka.

Ketiga, Pengelolaan Kinerja juga memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karier guru dan kepala sekolah berdasarkan kualitas kerjanya. Sistem ini memungkinkan penilaian yang lebih objektif dan transparan, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi dan pengembangan karier.

MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-16

Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional non-personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Adapun Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non-personalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOP PAUD, sasarannya adalah satuan satuan PAUD yang meliputi taman kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Dan BOP PAUD terdiri dari: (1) BOP PAUD Reguler; (2) BOP PAUD Kinerja. Sementara itu, Dana BOP Kesetaraan, sasarannya adalah SKB dan PKBM.

Melalui Merdeka Belajar episode ke-16, Kemendikbudristek melakukan akselerasi dan peningkatan pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan. Kebijakan Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan merupakan reformasi kebijakan pendanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) yang merupakan kelanjutan dari episode Ketiga Merdeka

Belajar yakni Penyaluran dan Penggunaan Dana BOS. Reformasi kebijakan terkait Pendanaan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan mencakup:

1. Nilai satuan biaya BOP PAUD yang bervariasi sesuai karakteristik daerah;
2. Penyaluran langsung dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan ke rekening satuan pendidikan;
3. Penggunaan BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan yang fleksibel; dan
4. Perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai aplikasi tunggal.



Satuan biaya majemuk BOSP Reguler (BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan) menggunakan indikator Indeks

Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

Biaya Pendidikan (IBP) yang memuat variabel Indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan *Purchasing Power Parity* (PPP) tiap wilayah kabupaten/kota.

ARKAS pada Satuan Pendidikan

Jika sebelumnya sistem pengelolaan anggaran sekolah masih terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah, maka melalui Merdeka Belajar episode keenam belas Kemendikbudristek juga memperkenalkan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk menyederhanakan sistem perencanaan dan pelaporan keuangan tersebut. Melalui terobosan integrasi ARKAS dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri, pengelola BOSP hanya

perlu melakukan pengisian perencanaan dan laporan penggunaan dana BOSP pada satu aplikasi saja.

Pada akhir 2023, ada sebanyak 220 ribu satuan pendidikan untuk jenjang dasar dan menengah telah terdaftar di ARKAS. Sekitar lebih dari 150 ribu di antaranya juga sudah mengintegrasikan akunnya di SIPLah. Berdasarkan data per 2 Juni 2024, sebanyak lebih dari 414 ribu satuan pendidikan telah menggunakan ARKAS yang terdiri dari 199 ribu satuan penerima BOP dan 219.684 satuan penerima BOS. Inovasi ARKAS Menurut survei yang dilakukan Oliver Wyman, 84% responden mengakui bahwa platform ARKAS secara signifikan mengubah alur kerja keuangan menjadi lebih baik.

Penyesuaian satuan biaya BOSP

Jenjang	Satuan Biaya (Rp)			Jumlah Kabupaten/Kota		Rata-rata Peningkatan di Kab/Kota per Satuan Biaya Naik (Rp)	Perubahan Total Alokasi BOSP (%)
	Rendah		Tinggi	Satuan Biaya Tetap	Satuan Biaya Naik		
PAUD	600.000	s.d	1.200.000	434	80	29.375	0,69%
SD	900.000	s.d	1.960.000	313	201	48.010	1,99%
SMP	1.100.000	s.d	2.480.000	318	196	76.480	2,54%
SMA	1.500.000	s.d	3.470.000	319	195	116.000	2,81%
SMK	1.600.000	s.d	3.590.000	317	197	156.345	2,85%
SLB	3.500.000	s.d	7.370.000	275	239	1.262.008	2,41%
Paket A	1.300.000	s.d	2.600.000	240	274	1.281.314	0,26%
Paket B	1.500.000	s.d	3.000.000	319	195	1.283.949	0,35%
Paket C	1.800.000	s.d	3.600.000	331	183	1.480.765	0,39%

MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-17

Revitalisasi Bahasa Daerah

Merdeka Belajar Episode Ketujuh Belas: Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) diluncurkan pada tanggal 22 Februari 2022. Program Revitalisasi Bahasa Daerah merupakan salah satu upaya perlindungan bahasa dan sastra daerah di Indonesia. Upaya ini sesuai amanat Pasal 32 Ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Selain itu, upaya ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 (UU 24/2009) pada Pasal 41 (1) dan Pasal 42 (1) serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 (PP 57/2014).

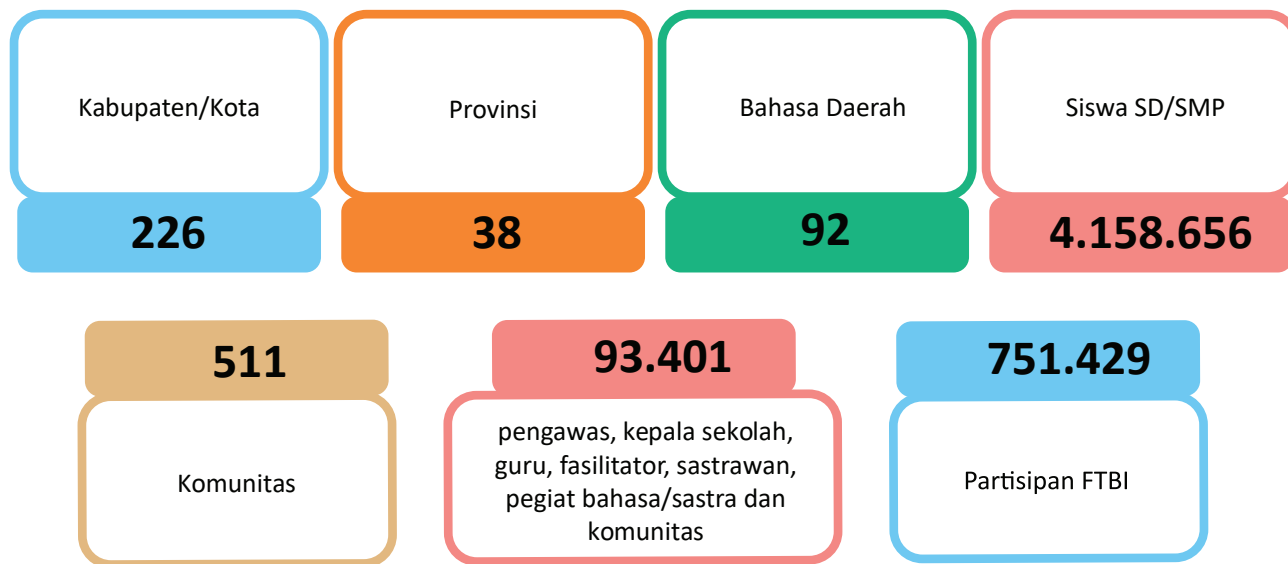
Revitalisasi Bahasa Daerah merupakan upaya untuk menghambat laju kepunahan bahasa. Strategi baru tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam

implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

Sasaran bahasa dan wilayah RBD dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Hal ini sebagai langkah mencegah atau paling tidak menghambat laju kepunahan bahasa yang disebutkan UNESCO 1 bahasa hilang (punah) dalam setiap dua minggu. Pada 2021 jumlah bahasa yang direvitalisasi sejumlah 5 bahasa di 3 provinsi (3 UPT Balai/Kantor Bahasa), yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Pada 2022 sasaran bahasa RBD menjadi 39 bahasa di 13 provinsi (13 UPT Balai/Kantor Bahasa). Sementara itu pada 2023 arah sasaran bahasa RBD telah bertambah menjadi 72 bahasa yang dilaksanakan di 25 provinsi (19 UPT Balai/Kantor Bahasa) di Indonesia. Sementara pada 2024 sebanyak 97 bahasa di 38 provinsi di 30 UPT Balai/Kantor Bahasa. Jumlah bahasa dan provinsi sasaran RBD dapat divisualkan dalam peta berikut:



Capaian Program Revitalisasi Bahasa Daerah sampai dengan 2024



Pada rangkaian *Internasional Mother Language Day* (IMLD) atau Hari Bahasa Ibu Internasional, Badan Bahasa sebagai representasi Indonesia di UNESCO turut menyerukan pelestarian bahasa lokal pendidikan multibahasa berbasis bahasa ibu yang penting dalam mentransmisikan dan melestarikan budaya sebagai agenda internasional. Indonesia bertindak sebagai *co-organizer* dalam perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional atau IMLD pada 2023 di UNESCO Paris, Perancis.

IMLD yang diperingati setiap tanggal 21 Februari telah diselenggarakan sejak tahun 2000. UNESCO mengakui pentingnya melestarikan keanekaragaman budaya dan bahasa secara berkelanjutan karena bahasa dunia semakin terancam punah. UNESCO melaporkan bahwa rata-rata satu bahasa di seluruh dunia hilang setiap dua minggu. Hal itu sangat mengkhawatirkan dan secara langsung berdampak pada penurunan warisan budaya dan intelektual.

Tantangan

- Data penutur bahasa yang terbaru belum bisa dipublikasikan secara langsung melalui aplikasi Regbastra.

- Perolehan data mengenai guru bahasa daerah, publikasi, dan media elektronik baru pada trimester keempat.
- Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat belum optimal sehingga dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan revitalisasi bahasa di wilayah tertentu belum mendapatkan dukungan secara materiil maupun non materiil.

Inovasi

Pencapaian Sasaran Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dilakukan melalui berbagai inovasi layanan di bidang kebahasaan dan kesastraan. Inovasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kecepatan layanan dengan mengoptimalkan teknologi dan informasi. Detail inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dijelaskan sebagai berikut:

- **Seminovel**
Penyusunan buku *Seminovel Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah dan Merdeka Belajar Episode ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia* ini bertujuan untuk menyajikan perjalanan program/kebijakan

Revitalisasi Bahasa Daerah dan Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia dalam rangkaian cerita nyata dengan gaya novel. Berbeda dengan laporan kegiatan, buku Seminoel ini akan memiliki alur, tokoh dengan pengalaman empiriknya, dan mungkin beberapa konflik (dalam ruang lingkup positif) beserta cara cara penyelesaiannya. Selain itu, buku ini juga menyajikan aspek humanis yang seringkali tidak terpotret laporan standar pemerintahan. Buku seminoel Revitalisasi Bahasa Daerah akan diterbitkan dalam 5 judul buku dan buku seminoel Literasi akan diterbitkan dalam 4 judul buku. Buku Seminoel ini akan menyajikan sumber literasi tentang kebahasaan, khususnya bahasa daerah, yang dapat dijadikan motivasi oleh penutur muda untuk meningkatkan keberpihakan mereka terhadap bahasa ibunya.

- Pengembangan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Kecerdasan buatan (AI) dapat memainkan peran signifikan dalam pemutakhiran pemetaan bahasa dan sastra, terutama dalam mengatasi tantangan-tantangan seperti jumlah penutur yang menurun, keterbatasan sumber daya manusia untuk penelitian, serta kecepatan perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi keberlangsungan bahasa. Pada tahun 2024 Badan Bahasa melalui Kepala Badan Bahasa telah mendapatkan penghargaan dari TIME sebagai 100 orang paling berpengaruh dalam pengembangan AI. Pengembangan tersebut meliputi pembelajaran

bahasa daerah berbasis AI, pengambilan data bahasa daerah untuk vitalitas dan pemetaan bahasa berbasis AI serta penerjemahan dalam 15 bahasa daerah berbasis AI.

- Pendataan Revitalisasi Bahasa Daerah Beserta Partisipan Pelindungan Berbasis Web Seluruh tahapan kegiatan Revitalisasi yang dilakukan oleh balai dan kantor bahasa memuat data yang berharga sehingga perlu disediakan suatu pangkalan data. Oleh karena itu, Pusat Pengembangan dan



Pelindungan Bahasa dan Sastra mengembangkan aplikasi Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan untuk dapat menyediakan pangkalan data yang terintegrasi. Salah satu fitur yang dikembangkan adalah fitur Revitalisasi.

- Tampilan Fitur Revitalisasi Fitur Revitalisasi ini dikembangkan untuk mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah yang

dilaksanakan unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Seluruh tahapan dalam pelaksanaan RBD disediakan menu inputan dalam fitur Revitalisasi tersebut. Sebelumnya data kegiatan RBD tersimpan secara partial di setiap balai dan kantor bahasa pada perangkat masing-masing yang rentan hilang. Akan tetapi, dengan adanya aplikasi ini, balai dan kantor bahasa dapat menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan program Revitalisasi Bahasa Daerah di wilayah kerja masing-masing. Pengembangan fitur ini juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan UPT sebagai pelaksana kegiatan. Pendataan Revitalisasi Bahasa Daerah ini dapat memperlihatkan peningkatan partisipasi masyarakat dan capaian program Revitalisasi Bahasa Daerah oleh seluruh balai/kantor bahasa dalam upaya perlindungan bahasa daerah.

- Fitur Konten Revitalisasi

Seluruh komponen dan unsur partisipan yang terlibat Revitalisasi Bahasa Daerah diinput dan disimpan pada aplikasi Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan sebagai bukti keberhasilan dan capaian program tersebut. Data yang terinput terintegrasi ke laman Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan (Dapobas) sebagai tempat satu data kebahasaan dan kesastraan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berikut ini adalah capaian partisipasi masyarakat terhadap program RBD tahun 2023 yang terhimpun melalui aplikasi Registrasi Kebahasaan dan Kesastraan dan tersaji pada laman Dapobas.

- Laman VIBA Monitoring dan VIBA Indeks

Pada tahun 2022 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menghadirkan VIBA App, sebuah aplikasi pengumpulan data daya hidup bahasa. Kemudian, pada tahun 2023 Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra mengembangkan fitur lanjutan, yaitu VIBA Monitoring dan VIBA Indeks. VIBA Monitoring merupakan aplikasi dasbor monitoring pendataan lapangan yang digunakan oleh manajemen untuk memantau jalannya pendataan lapangan. Dengan

adanya VIBA Monitoring, pemantauan atau monitoring terhadap data daya hidup bahasa dapat dilakukan. Selain itu, data pengukuran daya hidup bahasa ditampilkan secara langsung pada laman tersebut. Seluruh kuesioner yang terisi melalui VIBA App akan termonitor datanya pada VIBA Monitoring ini sehingga apabila terdapat data/kuesioner yang belum terkirim pada VIBA App, data tersebut akan terlihat pada VIBA Monitoring. Sementara itu, VIBA Indeks dapat memperlihatkan indeks daya hidup bahasa daerah secara simultan dan terperinci dari data kuesioner yang terkirim ke VIBA Server.

- Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional (FTBIN)

Festival ini merupakan momentum perdana Badan Bahasa melalui Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra memberikan apresiasi di tingkat nasional kepada tunas muda penutur bahasa daerah yang telah mengikuti pembelajaran, baik di sekolah, keluarga, maupun komunitas. Tidak hanya mengikuti pembelajaran berbahasa daerah, para tunas muda tersebut juga unjuk kebolehan kompetensi berbahasa daerahnya dalam ajang festival tunas bahasa ibu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat dan/atau UPT Balai/Kantor Bahasa. FTBIN untuk pertama kalinya dilaksanakan dengan menghadirkan ratusan siswa dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menjadi wakil-wakil pemenang festival, baik perwakilan terbaik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Beragam perlombaan yang diikuti sesuai dengan materi RBD yang dilaksanakan di wilayah sasaran, antara lain bercerita atau mendongeng, berpidato, membaca atau menulis aksara daerah, cerita pendek, puisi, tembang (pupuh/geguritan), lawakan tunggal. Pada momentum FTBIN tersebut Mendikbudristek memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang serius mengimplemtasikan RBD. Penghargaan tersebut sebagai wujud apresiasi pemerintah dalam mendukung kesungguhan implementasi pelestarian bahasa daerah melalui revitalisasi bahasa daerah.

MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-18

Merdeka Berbudaya dengan Dana Indonesiana

Sebagai bangsa yang kaya dengan keragaman budaya, Indonesia memiliki modal besar pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebudayaan Indonesia merupakan pondasi kokoh untuk mendukung visi Indonesia Maju. Melalui pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global di masa depan, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, serta krisis sosial dan ekonomi.

Salah satu pencapaian penting dari transformasi tata kelola kebudayaan yang berkelanjutan adalah terwujudnya Dana Abadi Kebudayaan yang menjadi wujud hadirnya negara dalam mendukung berbagai upaya pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan. Dana abadi yang diberi nama Dana Indonesiana ini dikelola secara transparan untuk mendukung berbagai kegiatan budaya yang dikelola masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa pendanaan pemajuan kebudayaan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian dalam Pasal 49 Ayat (1) ditegaskan lagi bahwa dalam rangka upaya pemajuan kebudayaan, Pemerintah Pusat membentuk dana perwalian Kebudayaan.

Kewajiban pemerintah menyediakan dana perwalian yang diwujudkan lewat dana abadi kebudayaan dimulai pada 2018. Kemudian, melalui Merdeka Belajar episode ke-18 Kemendikbudristek bersama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) meluncurkan dana abadi kebudayaan yang kemudian disebut Dana Indonesiana. Layanan Dana Indonesiana meliputi

program fasilitasi bidang kebudayaan, pemanfaatan dana abadi kebudayaan, dan beasiswa pelaku kebudayaan. Penerima manfaat Dana Indonesiana terdiri dari perorangan, kelompok/komunitas budaya, dan lembaga kebudayaan.



Daftar program layanan pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan “Dana Indonesiana

No.	Program Layanan	No.	Kategori 2024
1.	Fasilitasi bidang Kebudayaan bagi Komunitas dan Pelaku Budaya	1.	Dukungan Institusional bagi Organisasi Kebudayaan
2.	Produksi Kegiatan Kebudayaan	2.	Pendayagunaan Ruang Publik
		3.	Sinema Mikro
		4.	Kegiatan Strategis
3.	Produksi Media	5.	Dokumentasi Karya/Pengetahuan Maestro atau OPK Rawan Punah
		6.	Penciptaan Karya Kreatif Inovatif

Pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan melalui Dana Indonesiana diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2021. Melalui Dana Indonesiana, Ditjen Kebudayaan menunjukkan peran pemerintah sebagai fasilitator yang mendukung keberlanjutan ekosistem budaya di tanah air. Ada beberapa capaian kinerja Ditjen Kebudayaan dalam memanfaatkan Dana Indonesiana untuk mendukung para pelaku budaya dan komunitas budaya di berbagai daerah.

Dana Abadi Kebudayaan adalah dana yang diakumulasi dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan. Dana Indonesiana bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada kegiatan-kegiatan kebudayaan yang bertujuan melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan di Indonesia. Strategi pengelolaannya didesain agar dapat menjangkau pelaku budaya di seluruh Indonesia, termasuk mereka yang berada di daerah-daerah terpencil yang jarang tersentuh bantuan pemerintah.

Dana ini terdiri dari beberapa program utama, yaitu:

- Program Fasilitasi Bidang Kebudayaan (FBK), yang mendukung penyelenggaraan kegiatan kebudayaan di berbagai wilayah Indonesia.
- Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan, yang memberikan pembiayaan kepada

kegiatan-kegiatan budaya yang telah diseleksi oleh Komite Seleksi Substansi yang terdiri dari para ahli di bidang kebudayaan.

- Program Beasiswa Pelaku Budaya, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya



manusia di sektor kebudayaan.

Inovasi

Pendanaan ini dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap tahapan seleksi dilakukan secara ketat oleh tim yang terdiri dari profesional dan ahli di bidang kebudayaan.

• Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Program Kebudayaan

Dana Indonesiana telah mendukung berbagai festival dan kegiatan kebudayaan di seluruh Indonesia. Misalnya, pendanaan untuk Yayasan Sinema Yogyakarta yang menyelenggarakan *Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF)*. Berkat bantuan Dana Indonesiana, JAFF mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, memperkerjakan tenaga profesional, serta menyelenggarakan penelitian dan *Focus Group Discussion (FGD)* yang menghasilkan peta jalan organisasi hingga tahun

2039. Selain itu, JAFF juga dapat menyelenggarakan berbagai program baru seperti JAFF Market yang menjadi unit bisnis baru untuk mendukung keberlanjutan yayasan.

Pendanaan juga memungkinkan *Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF)* untuk memperluas lingkup penyelenggaraan festival dan memperkuat kelembagaan *BWCF Society* tanpa harus bergantung pada dukungan dana dari pemerintah daerah tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Indonesiana mampu memberikan kemandirian kepada komunitas budaya untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

• Mendukung Inovasi dan Keberlanjutan Program Kebudayaan

ARTJOG, salah satu penerima Dana Indonesiana, memanfaatkan dana tersebut untuk melaksanakan berbagai program inovatif seperti studi dampak ARTJOG, FGD bersama para pakar, dan penyusunan dokumen strategis keberlanjutan lembaga. Berkat pendanaan ini, ARTJOG mampu meningkatkan jangkauan dan kualitas penyelenggaraan festival serta menciptakan ruang bagi seniman muda untuk mempresentasikan karyanya.

Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) juga merasakan dampak positif dari pendanaan Dana Indonesiana. Setelah dua tahun diselenggarakan secara daring dan hibrida akibat pandemi, UWRF dapat kembali diadakan secara normal dengan skala yang sama seperti sebelum pandemi. UWRF juga mampu melaksanakan riset dampak festival serta analisis SWOT organisasi untuk pertama kalinya setelah 20 tahun berdiri. Dengan bantuan Dana Indonesiana, UWRF juga dapat membangun aset-aset seperti *sound system* dan *projector*, yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas lain di Ubud.

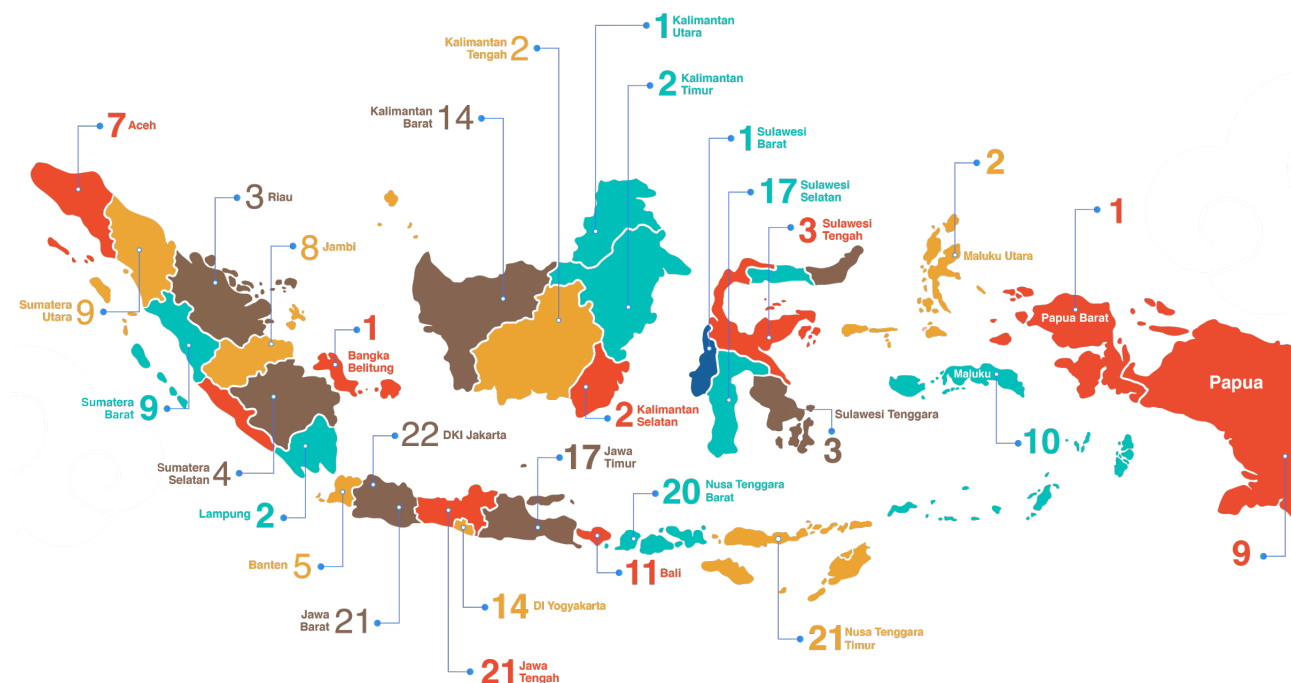
• Pengembangan Kapasitas Pelaku dan Perluasan Jejaring

Festival Film Purbalingga, salah satu penerima manfaat Dana Indonesiana, berhasil meningkatkan kapasitas operasional dan program unggulannya



Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

Sebaran Penerima Dana Indonesiana Tahun 2023



Rekapitulasi usulan dan Penerima Dana Indonesiana Tahun 2023

Kategori	Periode Pendaftar	Jumlah Pendaftar	Periode Penilaian	Jumlah Komite Seleksi	Jumlah Proposal	Jumlah Lulus Substansi	Jumlah Lulus Administrasi	Jumlah Penerima TTD Kontrak
Pendayagunaan Ruang Publik	17 Juli – 17 Agustus 2023	715	20 September s.d. 12 Oktober 2023	12 orang	715	59	55	55
Penciptaan Karya Kreatif Inovatif	17 Juli – 17 Agustus 2023	836	20 September s.d. 12 Oktober 2023	15 orang	836	59	57	57
Dokumentasi Karya Pengetahuan Maestro	24 Juli – 24 Agustus 2023	724	20 September s.d. 30 Oktober 2023	12 orang	724	62	56	56
Dukungan Institusional	24 Juli – 24 Agustus 2023	209	20 September s.d. 8 Oktober 2023	6 orang	209	50	50	50
Sinema Mikro	7 Juli – 17 Agustus 2023	129	20 September s.d. 6 Oktober 2023	3 orang	129	30	27	27
TOTAL		2.613		48 Orang	2.163	260	245	245

seperti Kompetisi Film Pelajar Banyumas Raya. Melalui pendanaan ini, Festival Film Purbalingga dapat menyusun kurikulum dan modul pelatihan komunitas film Banyumas Raya, menyelenggarakan pelatihan penulisan skenario, dan memperluas jangkauan program pemutaran film pelajar di berbagai sekolah. Selain itu, program Layar Tanjleb yang melibatkan pemuda desa sebagai pengelola programasi film juga berkembang pesat, menciptakan model pemutaran film di komunitas yang berkelanjutan.

Dengan adanya Dana Indonesiana, banyak lembaga dan komunitas budaya yang mampu memperluas jejaring dan kolaborasi mereka baik di tingkat nasional maupun internasional. Yayasan Gairah Sinema Muda, misalnya, memperoleh kepercayaan dari berbagai instansi dan perusahaan untuk bekerja sama dalam proyek-proyek budaya. Lembaga ini juga mampu menarik pendanaan dari jaringan funding internasional, menunjukkan bahwa dukungan Dana Indonesiana tidak hanya berdampak pada keberlanjutan kegiatan budaya tetapi juga memperluas pengaruh dan daya saing komunitas budaya Indonesia di tingkat global.

- **Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Pendanaan melalui Dana Indonesiana mempertegas peran pemerintah sebagai fasilitator dalam ekosistem kebudayaan. Alih-alih menjadi eksekutor utama, pemerintah memberikan ruang yang luas bagi pelaku budaya untuk merancang dan mengembangkan program-program mereka sendiri. Pemerintah menyediakan pendanaan, tetapi pelaksanaan dan pengelolaan program sepenuhnya diserahkan kepada komunitas budaya yang bersangkutan.

Pendekatan ini menumbuhkan kemandirian dan kreativitas di kalangan pelaku budaya. Mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan pasif, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan dana dengan baik dan transparan, serta berinovasi untuk mengembangkan program-program yang

berkelanjutan. Dengan demikian, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendukung ekosistem budaya agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing komunitas.

Tantangan

- Meskipun banyak capaian positif, pemanfaatan Dana Indonesiana masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah kesulitan dalam memastikan bahwa dana benar-benar tersalurkan ke seluruh daerah di Indonesia secara merata. Ada beberapa daerah yang belum sepenuhnya memanfaatkan dana ini, baik karena keterbatasan kapasitas kelembagaan maupun kendala administratif.
- Untuk mengatasi tantangan ini, Ditjen Kebudayaan perlu memperkuat program pendampingan dan sosialisasi agar lebih banyak pelaku budaya yang memahami prosedur dan persyaratan untuk mengakses Dana Indonesiana. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi dan pemantauan penggunaan dana juga perlu terus ditingkatkan agar manfaat dana ini dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh komunitas budaya di Indonesia.
- Pemanfaatan Dana Abadi Kebudayaan melalui Dana Indonesiana menunjukkan komitmen Ditjen Kebudayaan untuk mendukung keberlanjutan ekosistem budaya di Indonesia. Dengan memberikan dukungan finansial kepada pelaku dan komunitas budaya, Dana Indonesiana membantu menciptakan ruang bagi inovasi, memperkuat kelembagaan komunitas, dan memperluas jejaring budaya. Pemerintah sebagai fasilitator berperan penting dalam menciptakan ekosistem budaya yang inklusif dan berkelanjutan, di mana pelaku budaya memiliki ruang dan dukungan untuk berkembang dan berkontribusi bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.

MERDEKA BELAJAR

EPISODE KE-19

Rapor Pendidikan Indonesia

Rapor Pendidikan menampilkan hasil Asesmen Nasional dan analisis data pendidikan lainnya sebagai laporan evaluasi sistem pendidikan. Rapor Pendidikan menjadi acuan evaluasi internal dan eksternal dalam rangka penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Satuan pendidikan dan pemerintah daerah menggunakan Rapor Pendidikan untuk melakukan evaluasi internal dalam bentuk perencanaan berbasis data, yaitu mengidentifikasi masalah dan merefleksikan akarnya untuk merumuskan langkah pembenahan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Pemerintah menggunakan Rapor Pendidikan untuk melakukan evaluasi eksternal kepada satuan pendidikan melalui akreditasi satuan

pendidikan dan kepada pemerintah daerah melalui evaluasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.

Capaian

Rapor Pendidikan merupakan sintesis berbagai data pendidikan baik yang dikelola Kemendikbudristek maupun kementerian/lembaga lainnya, yang mencakup:

1. Hasil Asesmen Nasional
2. Data Pokok Pendidikan
3. Data manajemen talenta guru dan tenaga kependidikan
4. Data hasil *tracer study* SMK

Evaluasi Pencapaian Standar Nasional Pendidikan disajikan dalam Rapor Pendidikan



5. Data *Education Management Information System* (EMIS) Kemenag

6. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS

Dengan kerangka evaluasi yang komprehensif dan integrasi berbagai sumber data pendidikan ini, Rapor Pendidikan menjadi rujukan utama berbagai evaluasi, baik internal maupun eksternal, baik bagi pemerintah daerah maupun satuan pendidikan. Dengan integrasi ini, ketidakselarasan instrumen dan hasil dari berbagai evaluasi pendidikan dapat dikurangi secara signifikan.

Dampak lain dari adanya Rapor Pendidikan adalah berkurangnya beban administratif pendataan. Satuan pendidikan dan pemerintah daerah tidak perlu lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas pengumpulan data evaluasi. Mereka hanya perlu berpartisipasi aktif dalam Asesmen Nasional dan secara rutin memperbarui data pokok pendidikan masing-masing.

Inovasi

Platform Rapor Pendidikan memuat tiga jenis laporan: Rapor Satuan Pendidikan, Rapor Pendidikan Daerah, dan Rapor Pendidikan Nasional:

- **Rapor Satuan Pendidikan**

Memuat laporan komprehensif layanan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Rapor Satuan Pendidikan dapat diakses oleh kepala satuan pendidikan dan guru pada satuan pendidikan terkait melalui akun belajar.id. Melalui laporan ini, satuan pendidikan dapat melihat capaian semua indikator kinerja pendidikannya selama satu tahun dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya.

- **Rapor Pendidikan Daerah**

Memuat laporan komprehensif layanan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada tingkat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Rapor Pendidikan Daerah dapat diakses oleh kepala dan pegawai dinas pendidikan serta perangkat pemerintah daerah

yang telah terdaftar melalui akun belajar.id. Melalui laporan ini, pemerintah daerah dapat melihat capaian kinerja pendidikan selama satu tahun dan perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya, baik pada level daerah maupun pada tiap satuan pendidikan yang ada di wilayahnya.

- **Rapor Pendidikan Nasional**

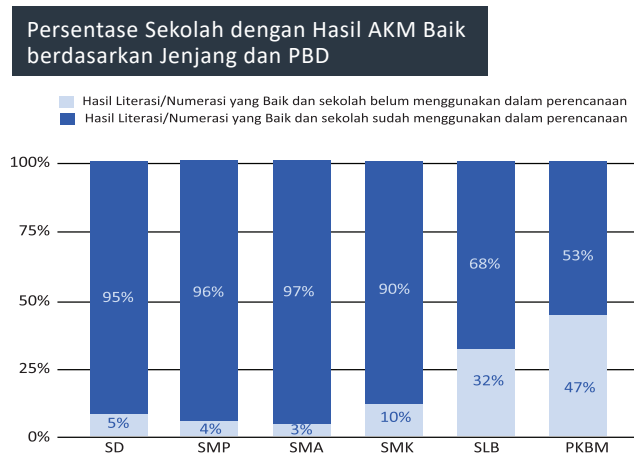
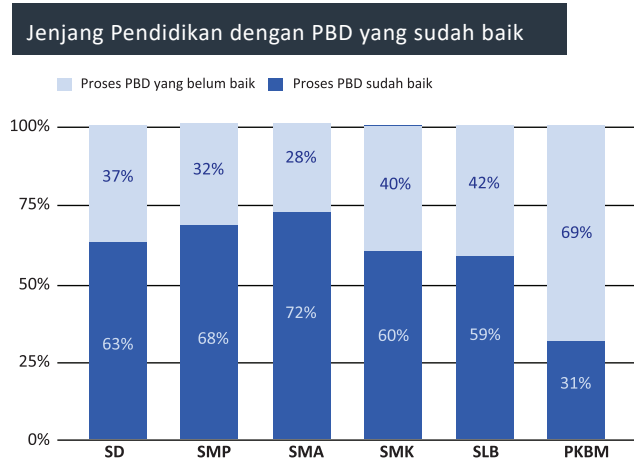
Memuat laporan komprehensif layanan pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada tingkat nasional. Laporan ini memuat capaian kinerja pendidikan secara nasional untuk sejumlah indikator prioritas. Rapor Satuan Pendidikan dapat diakses secara terbuka oleh publik sebagai bagian dari upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung perbaikan kualitas pendidikan.

Fungsi Rapor Pendidikan:

1. Sebagai rujukan untuk perencanaan berbasis data (PBD) guna meningkatkan kualitas pendidikan
2. Mengidentifikasi indikator masalah, menganalisis akar masalah, dan memberikan rekomendasi perbaikan.



3. Menjadi acuan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dokumen RKAS untuk program yang memerlukan biaya.



Rapor Pendidikan digunakan sebagai rujukan evaluasi internal oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam bentuk perencanaan berbasis data (PBD) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Dalam mendukung PBD, platform Rapor Pendidikan bukan hanya menampilkan hasil kinerja layanan pendidikan, namun secara otomatis juga mengidentifikasi indikator-indikator paling bermasalah, menghasilkan analisis berbagai akar masalahnya, dan memberikan rekomendasi untuk membenahi akar masalah tersebut.

Jika melihat korelasi antara proses Perencanaan Berbasis Data dengan hasil literasi/numerasi peserta didik, terlihat bahwa hasil literasi dan numerasi yang

baik memiliki keterkaitan dengan tingkat penggunaan Rapor Pendidikan dalam perencanaan program dan kebijakan pada satuan pendidikan.

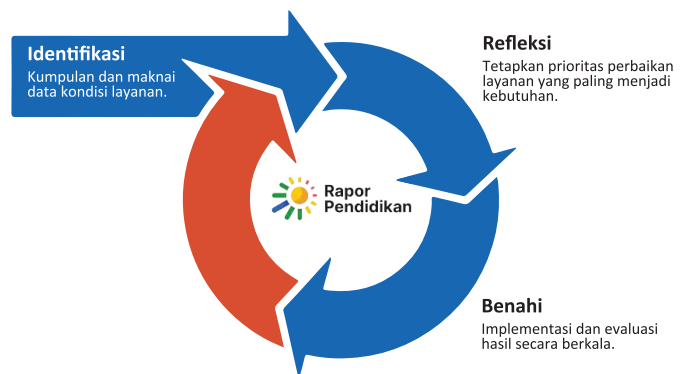
Satuan pendidikan dan pemerintah daerah juga dianjurkan melakukan analisis secara mandiri melalui file unduhan laporan Rapor Pendidikan yang menampilkan rincian capaian semua indikator. Satuan pendidikan dan pemerintah daerah harus mampu menetapkan prioritas mana masalah-masalah yang paling mendesak dan mampu ditangani sesuai kewenangan dan kapasitas sumber daya yang ada. Pelibatan semua pemangku kepentingan terkait sangat esensial dalam proses PBD ini.

Tantangan

Rapor Pendidikan adalah alat bantu untuk memantik budaya refleksi dan kolaborasi para pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan. Satuan pendidikan dan pemerintah daerah dapat melengkapi analisis masalahnya dengan sumber-sumber data lain sesuai kebutuhan untuk menghasilkan rencana dan langkah pembenahan yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks masing-masing.

Rencana pembenahan yang sudah disusun berdasarkan tahapan PBD perlu dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan agar menjadi

Siklus Perencanaan Berbasis Data

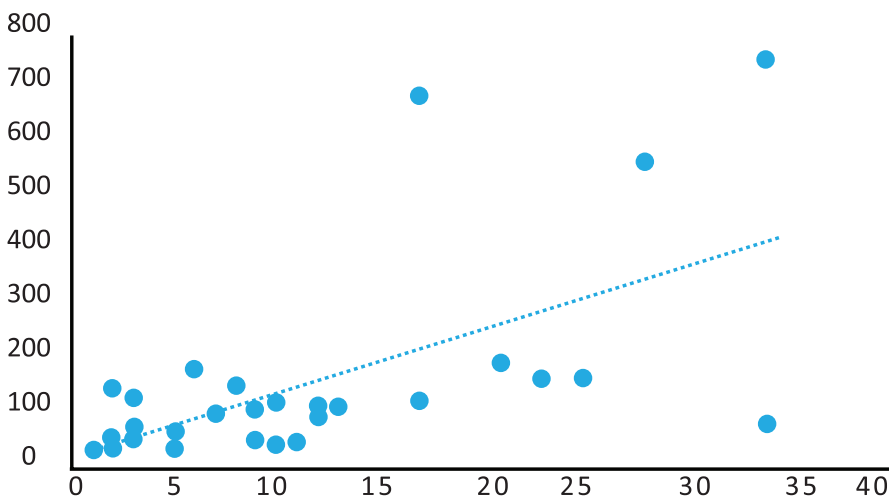


acuan dan komitmen bersama. Adapun rencana atau program yang memang membutuhkan pembiayaan dapat dituangkan ke dalam dokumen RKAS. Tidak semua program kerja perlu biaya. Beberapa rekomendasi Benahi untuk peningkatan kapasitas GTK yang diberikan oleh platform Rapor Pendidikan, misalnya, telah dilengkapi dengan tautan materi yang relevan dari Platform Merdeka Mengajar agar guru dapat berlatih secara mandiri maupun kolaboratif tanpa biaya.

Urgensi Keberlanjutan

Rapor Pendidikan menjadi rujukan untuk evaluasi eksternal melalui akreditasi satuan pendidikan.

Jumlah dinas kabupaten dalam provinsi yang melakukan perencanaan berdasarkan PBD



Berdasarkan Permendikbudristek 38/2023 tentang akreditasi satuan PAUD dan Dikdasmen, proses reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) dilakukan secara otomatis berdasarkan analisis data Rapor Pendidikan. Kunjungan langsung ke satuan pendidikan untuk proses akreditasi hanya dilakukan untuk satuan pendidikan yang melakukan akreditasi pertama kali atau satuan pendidikan yang memiliki indikasi tertentu.

Dari hasil evaluasi terhadap pemanfaatan Rapor Pendidikan Daerah, terdapat korelasi positif antara dinas pendidikan yang telah melakukan analisis

terhadap Rapor Pendidikan dengan pencapaian literasi dan numerasi yang baik. Semakin banyak kabupaten/kota dalam satu provinsi yang melakukan analisis Rapor Pendidikan untuk perencanaan dan penganggaran, maka jumlah satuan pendidikan yang memiliki capaian literasi dan numerasi baik di dalam provinsi tersebut juga meningkat.

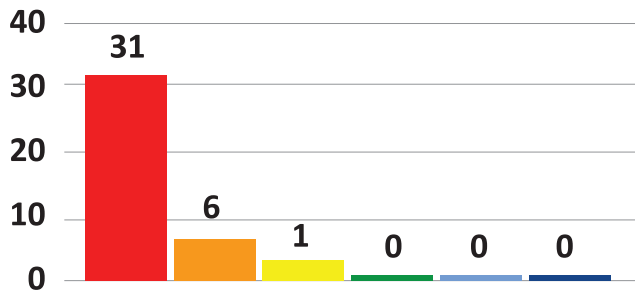
Rapor Pendidikan juga menjadi rujukan evaluasi eksternal kepada pemerintah daerah melalui penilaian pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan. Indikator-indikator Rapor Pendidikan telah diadopsi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 59/2021 tentang penerapan SPM dan telah diatur dalam Permendikbudristek 32/2022 tentang SPM Pendidikan. Dengan adanya indikator-indikator ini, SPM kini lebih menekankan pada aspek-aspek kualitas pembelajaran, bukan hanya akses dan pemenuhan sarana prasarana.

Dari rangkaian indikator SPM pendidikan yang lebih komprehensif, Kemendikbudristek menetapkan indikator-indikator prioritas untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan rencana dan anggaran pendidikan. Indikator-indikator ini juga menjadi dasar bagi penghitungan indeks capaian SPM pendidikan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek 195/M/2023. Indikator-indikator prioritas yang digunakan berbeda untuk SPM provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangan pengelolaan pendidikan masing-masing.

Pada sisi capaian Indeks SPM Pendidikan kabupaten/kota terlihat mengalami kenaikan di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, akan tetapi dari

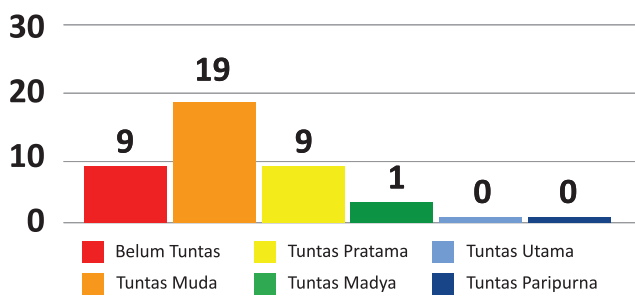
Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

Jumlah provinsi berdasarkan kategori capaian indeks SPM pendidikan tahun 2022



514 kabupaten/kota tersebut belum ada satu pun kabupaten/kota yang dapat mencapai kategori Tuntas Utama dan Tuntas Paripurna.

Jumlah provinsi berdasarkan kategori capaian indeks SPM pendidikan tahun 2023

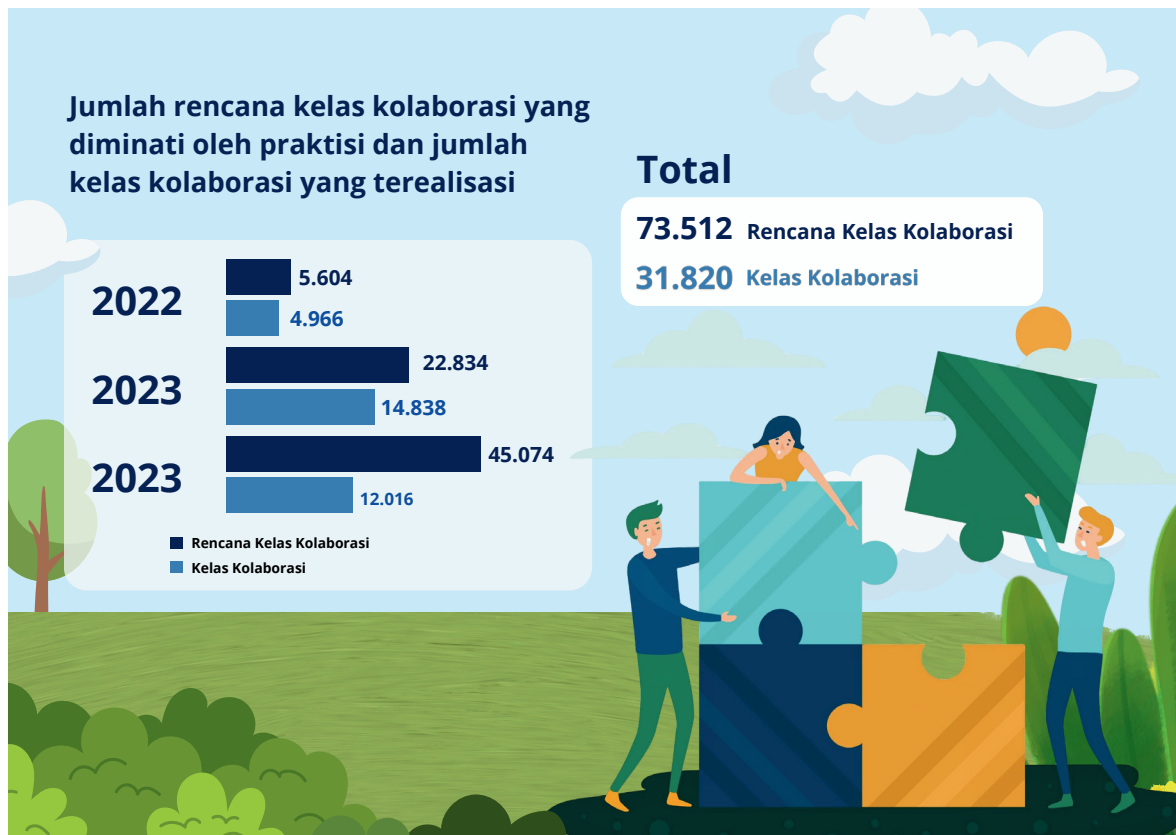


MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-20

Praktisi Mengajar

Program Praktisi Mengajar merupakan ruang perjumpaan praktisi dan akademisi untuk bersama-sama mempersempit kesenjangan antara dunia pendidikan dengan dunia profesi. Program ini diselenggarakan untuk memfasilitasi kolaborasi antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri yang sama-sama memegang peranan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia masa depan di Indonesia. Dalam pelaksanaan program, perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk menghadirkan praktisi terbaik di berbagai bidang untuk memperkaya proses pembelajaran di dalam kelas serta mendorong pertukaran ilmu dan keahlian yang mendalam dan bermakna antar sivitas akademika di perguruan tinggi dan profesional di dunia kerja.

Kebermanfaatan program Praktisi Mengajar memberikan interaksi langsung yang terjadi antara Praktisi dengan mahasiswa di ruang kelas memberikan pengalaman baru dalam mahasiswa memahami perspektif dunia usaha dan dunia industri masa kini dari kacamata ahli. Pengalaman pembelajaran yang lebih dinamis, kompetitif, kolaboratif, dan partisipatif diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang lebih baik. Keikutsertaan mahasiswa dalam program PM diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan mencetak lulusan perguruan tinggi yang berkualitas.



Jumlah RKK dan Kelas Kolaborasi di Praktisi Mengajar

Capaian

Hingga tahun 2024, sebanyak 22.920 praktisi mengikuti program Praktisi Mengajar di dalam 31.820 kelas kolaborasi. Melalui program Praktisi Mengajar, tercipta ruang kolaborasi antara praktisi ahli dengan dosen agar tercipta pertukaran ilmu dan keahlian yang mendalam dan bermakna antar sivitas akademika di perguruan tinggi dan profesional di dunia kerja.

Program Praktisi Mengajar memberikan peluang kepada mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi *hardskill* dan mendapatkan materi tambahan yang dibawakan oleh praktisi berbasis pada pengalaman praktisi ke dalam kelas perkuliahan untuk berkolaborasi dengan dosen (akademisi). Ragam kolaborasi yang terbangun di Kelas Kolaborasi mendorong terwujudnya kerja sama antara pihak perguruan tinggi dengan perusahaan praktisi dan memungkinkan terjadinya interaksi mitra DUDI dengan talent pool melalui aktivitas kelas kolaborasi.

Adapun dampak kebermanfaatn program Praktisi Mengajar:

- **Dampak Ekonomi Sosial**
 - Nilai potensi kebermanfaatn program mencapai Rp 236,4 miliar, dengan perhitungan nilai manfaat pada kerja sama/MoU dan peningkatan

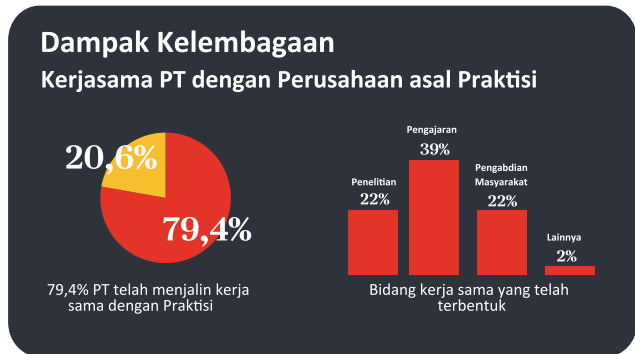
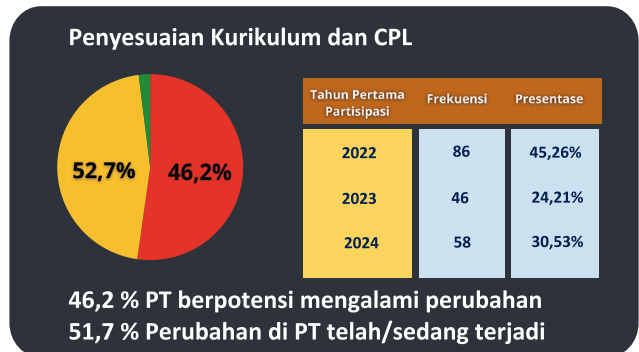
- kompetensi mahasiswa
- Mempertemukan mahasiswa dengan calon pemberi kerja dalam pangkalan bakat (*talent pool*), di mana 69,0% mahasiswa mendapatkan tawaran magang, dan 72,0% mendapatkan tawaran pekerjaan di perusahaan asal praktisi
- Potensi adanya mobilitas vertikal

- **Dampak Kelembagaan**

- Bagi Perguruan Tinggi
 - Ketercapaian IKU 1, IKU 4, dan IKU 7
 - Penyesuaian kurikulum, kepegawaian, dan kemahasiswaan pada perguruan tinggi/program studi
 - Peningkatan *link & match* perguruan tinggi dan dunia industri
- Bagi Mitra
 - Potensi praktisi merekrut mahasiswa Praktisi Mengajar ke perusahaan/institusi dan potensi kerja sama dengan perguruan tinggi

- **Dampak Kompetensi**

Program Praktisi Mengajar berhasil meningkatkan indeks kompetensi umum dan indeks kompetensi khusus mahasiswa, terutama pada aspek *problem solving* dan *creative process engagement*.



MERDEKA BELAJAR

EPISODE KE-21

Dana Abadi Perguruan Tinggi

Daya saing perguruan tinggi Indonesia dalam kancah persaingan global adalah salah satu indikator yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek) untuk periode 2020-2024 seperti tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang meletakkan *key performance indicator* (KPI) melalui target pencapaian lima perguruan tinggi Indonesia masuk dalam top 500 perguruan tinggi terbaik dunia. Target ini bukanlah target yang mudah untuk dicapai.

Melalui program pengembangan dan pendampingan yang sistematis dan diimplementasikan secara konsisten pada perguruan tinggi, maka pada tahun 2022 Ditjen Diktiristek berhasil mencapai target lima perguruan tinggi unggulan Indonesia yang masuk dalam top 500 perguruan tinggi terbaik dunia. Sejalan dengan hal ini, Ditjen Diktiristek telah mengembangkan berbagai program yang ditujukan untuk peningkatan kualitas dan relevansi Perguruan Tinggi (PT), baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Program yang khusus diarahkan untuk memfasilitas PTN dan PTS mencapai peringkat *World Class University*, menggunakan acuan *Quacquarelli Symonds World University Ranking* (QS WUR) atau *Times Higher Education* (THE).

Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia agar masuk dalam jajaran perguruan tinggi kelas dunia adalah melalui Program Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT). Dalam program DAPT, Pemerintah menyediakan pendanaan melalui hasil pengelolaan dana abadi PT yang digunakan untuk program layanan dana padanan atas



hasil pengembangan dana abadi PT kelas dunia untuk meningkatkan peringkat perguruan tinggi. Dana abadi perguruan tinggi digunakan untuk peningkatan kualitas dan kinerja tridharma berstandar internasional yang mendukung pengembangan *World Class University* (WCU).

Saat ini telah terdapat 5 perguruan tinggi Indonesia yang masuk dalam top 500 perguruan tinggi terbaik dunia yang seluruhnya berstatus sebagai PTNBH. Ditjen Diktiristek melihat potensi yang lebih besar pada PTNBH untuk dapat menduduki top 500 perguruan tinggi terbaik dunia. Sebagai wujud komitmen untuk mendorong perguruan tinggi menuju WCU, Ditjen Diktiristek meluncurkan Program Dana Abadi Perguruan Tinggi yang pada dasarnya bertujuan untuk memfasilitasi PTNBH dalam merancang dan melaksanakan program-program pengembangan untuk meningkatkan kualitas sehingga dapat mempercepat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pendidikan tinggi dan masuk dalam 500 perguruan tinggi terbaik dunia atau WCU.

Program DAPT menggunakan konsep *Enhancing Quality Education for International University Recognition* (EQUITY Project) yang mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan internal, proses belajar mengajar, dan aktifitas penelitian sehingga menciptakan kultur akademik PTNBH yang mampu menghasilkan lulusan dan output penelitian (produk inovasi dan publikasi), serta pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan relevan serta diakui secara internasional dan sejalan dengan kriteria pemeringkatan WCU oleh QS (WUR, AUR, *Subjects*), THE (WUR, AUR, *Subjects*, dan IMPACT), dan IKU.

Program EQUITY menyoal IKU dan indikator kinerja yang relevan dengan indikator WCU atau *World Class University by Subject* menurut QS dan THE. PTNBH pengusul dapat memilih indikator kinerja yang relevan sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan serta *niche* universitas.

Tujuan

Program DAPT bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas dan relevansi PTNBH yang mampu memberikan landasan yang kuat dan berkelanjutan dalam pencapaian IKU dan peringkat top 500 perguruan tinggi terbaik dunia menurut QS (WUR, AUR, *Subjects*) dan THE (WUR, AUR, *Subjects*, dan IMPACT).

Pemberi Pendanaan

Program Dana Abadi Perguruan Tinggi merupakan salah satu program bantuan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Pendanaan Program DAPT bersumber dari hasil kelolaan Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sejalan dengan amanat



dari Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan.

Persyaratan Penerima Pendanaan

Pendanaan diberikan kepada setiap PTNBH untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan mutu perguruan tinggi menuju kelas dunia berdasarkan proposal yang diajukan PTNBH sesuai panduan pendanaan program EQUITY. Selain itu, Ditjen Diktiristek dapat mengalokasikan dana dari pendanaan Program DAPT kepada salah satu PTNBH

yang ditunjuk untuk mengelola dana yang dapat digunakan secara bersama oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan Ditjen Diktiristek.

Alokasi Bantuan

Alokasi bantuan didasarkan pada kriteria:

- a. peningkatan dana abadi yang telah dikelola PTNBH pada tahun sebelumnya;
- b. kinerja hasil kelola dana abadi oleh PTNBH;



- c. jumlah mahasiswa program sarjana dan diploma yang terdaftar di PTNBH, berdasarkan kelompok eksakta dan sosial humaniora; dan
- d. Peringkat WCU dalam QS WUR/AUR.

Rincian Jumlah Bantuan

Rincian jumlah bantuan yang diterima masing-masing perguruan tinggi penerima bantuan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Bentuk Pendanaan dan Komponen Biaya

Pendanaan Program DAPT diberikan dalam bentuk uang yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan aktivitas yang ditentukan sesuai dengan ruang lingkup skema program. Penggunaan dana Program DAPT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Komponen biaya yang dapat diajukan oleh PTNBH, sesuai dengan prioritas program dalam meningkatkan WCU dan ketersediaan anggaran, sebagai berikut:

1. fasilitas dan sumber daya
2. pengembangan staf dosen and tenaga kependidikan
3. biaya pegawai non-PNS
4. penelitian, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat
5. kerja sama internasional dalam pendidikan
6. akreditasi internasional program studi (*accreditation application and process*)
7. pengembangan/penyelarasan kurikulum dan metode pembelajaran
8. promosi
9. penguatan kelembagaan
10. pengelolaan program

Komponen biaya yang disusun memperhatikan standar biaya masukan yang berlaku yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor dalam hal terdapat pengaturan internal di lingkungan PTNBH dan/atau Peraturan Menteri Keuangan apabila belum diatur dalam peraturan rektor. Selain itu, dalam hal penggunaan komponen biaya memerlukan proses pengadaan barang dan/atau jasa, maka prosesnya memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang berlaku di lingkungan PTNBH.

Selain 10 komponen biaya di atas, terdapat skema dana bersama dari pendanaan Program DAPT yang dialokasikan kepada salah satu PTNBH yang ditunjuk untuk mengelola dana yang dapat digunakan secara bersama oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebijakan Ditjen Diktiristek.

Capaian

2025 QS World University Rankings



	2025	2024	Institution Name	Overall
INDEX	RANK	RANK		SCORE
207	206	237	Universitas Indonesia	45,7
239	239	263	Gadjah Mada University	41,8
256	256	281	Bandung Institute of Technology (ITB)	39,9
308	308	345	Airlangga University	35,3
426	426	489	IPB University (a.k.a. Bogor Agricultural University)	27,9
585	585	621-630	Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya)	21,2
597	596	661-670	Universitas Padjadjaran	20,8
726	721-730	791-800	Diponegoro University	-
834	801-850	801-850	Universitas Brawijaya	-
957	951-1000	1001-1200	Bina Nusantara University (BINUS)	-
1104	1001-1200	1001-1200	Telkom University	-
1146	1001-1200	1001-1200	Universitas Hasanuddin	-
1147	1001-1200	1001-1200	Universitas Sebelas Maret	-
1208	1201-1400	1201-1400	Atma Jaya Catholic University Jakarta	-
1355	1201-1400	1201-1400	Universitas Islam Indonesia	-

MERDEKA BELAJAR

EPISODE KE-22

Transformasi Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri

Terobosan kebijakan transformasi pada Pendidikan Tinggi menjadi fokus dari Merdeka Belajar Episode Kedua Puluh Dua, yaitu terkait Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kebijakan yang diluncurkan pada tanggal 7 September 2022 ini bertujuan untuk menyeleraskan antara pembelajaran di jenjang pendidikan menengah dengan proses seleksi masuk PTN. Prinsip-prinsip yang mendasari transformasi ini adalah mendorong pembelajaran yang holistik, mendorong kemampuan bernalar, proses penerimaan mahasiswa baru yang inklusif, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sistem seleksi.

Terdapat tiga transformasi seleksi masuk PTN. Pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi. kedua, seleksi nasional berdasarkan tes. Ketiga, seleksi secara mandiri oleh PTN.

Capaian dan Inovasi

Hasil dari transformasi ini menunjukkan animo yang meningkat di seleksi nasional jalur prestasi. Di seleksi jalur tes siswa yang berasal dari sekolah sosial ekonomi rendah dan keluarga sosial ekonomi rendah mengalami peningkatan dan pelaporan masyarakat selama proses seleksi mengalami penurunan.

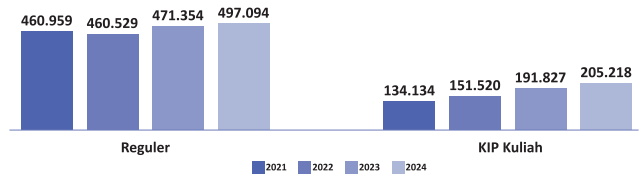
Perubahan Mekanisme Seleksi Nasional 2022-2024

Aspek	2021-2022	2023	2024
Organisasi	Panitia Adhoc	Satker BLU BPPP	Satker BLU BPPP
Dasar seleksi jalur prestasi	Nilai rata-rata 6 seluruh mata Pelajaran sesuai prodi	Nilai rata-rata seluruh mata Pelajaran	Nilai rata-rata mata pelajaran
Materi Tes	Potensi kognitif, kemampuan akademik saintek, kemampuan akademik sashum	Potensi kognitif dan penalaran dalam Bahasa serta numerik	Potensi kognitif dan penalaran dalam Bahasa serta numerik
Ruang lingkup	Jenjang sarjana	Jenjang sarjana, diploma IV, dan diploma III	Jenjang sarjana, diploma IV, dan diploma III
Jumlah pilihan prodi	Dua untuk pilihan linear dan tiga untuk pilihan prodi campuran	Dua tidak ada pembatasan lintas jurusan	Empat dengan dorongan pemilihan diploma maupun sarjana
Transparansi dan Akuntabilitas**	Di 74 pusat UTBK	Di 74 pusat UTBK	Di 74 pusat UTBK dan 5 sub pusat UTBK wilayah pulau terbesar
Upaya pemenuhan daya tampung	Lulus jalur prestasi tidak dapat ke tes, dapat ke mandiri	Lulus jalur prestasi tidak dapat ke tes, dapat ke mandiri	Lulus jalur prestasi tidak dapat ke tes, dapat ke mandiri, daftar ulang jalur tes tidak diterima di mandiri

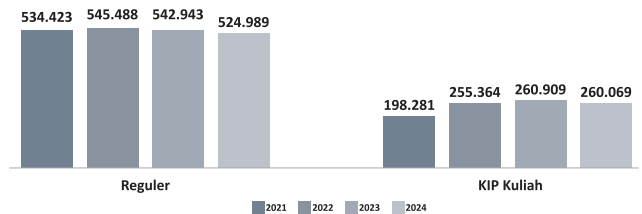


Jumlah Pendaftar Seleksi Nasional (2021-2024)

Jumlah Pendaftar Seleksi PTN Jalur Prestasi



Jumlah Pendaftar Seleksi PTN Jalur Tes



Adanya perubahan mekanisme pada seleksi nasional jalur prestasi, Kemendikbudristek pada tahun 2023 melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kanwil Kemenag terkait seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan pengisian Pangkalan Data Sekolah Siswa (PDSS) untuk jalur prestasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan para pihak memahami prosedur dan pentingnya pengisian data yang akurat. Dampak dari sosialisasi tersebut terlihat jelas, dengan adanya peningkatan jumlah peserta yang mengikuti seleksi jalur prestasi. Selain itu, program KIP Kuliah juga mencatat peningkatan jumlah penerima, menandakan program ini semakin inklusif bagi siswa dari latar belakang ekonomi rendah.

Melalui transformasi seleksi masuk PTN yang lebih adil, diharapkan perbaikan iklim pembelajaran di jenjang pendidikan menengah akan mendorong lahirnya calon mahasiswa yang lebih kompeten. Dengan demikian, bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberikan kesempatan kepada individu berbakat dan pekerja keras untuk terus berkembang.

MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-23

Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia



Untuk melengkapi berbagai program penguatan literasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Program tersebut berfokus pada pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang disertai dengan pelatihan bagi guru. Hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi karena kurangnya buku bacaan bermutu menyebabkan rendahnya kebiasaan membaca. Pernyataan ini diperkuat dengan adanya hasil Asesmen

Nasional (AN) tahun 2021, Indonesia saat ini sedang mengalami darurat literasi, yakni satu dari dua peserta didik jenjang SD sampai SMA belum mencapai kompetensi minimum literasi. Fakta lainnya, banyak sekolah terutama yang berada di kawasan 3T dengan peringkat literasi dan numerasi berada pada level satu atau sangat rendah.

Program pengiriman buku ke sekolah yang bukan kali ini saja menjadi kebijakan di Kemendikbudristek. Perbedaan program pengiriman buku ke sekolah kali ini melakukan terobosan yang dimulai dari jumlah eksemplar, jumlah judul buku, jenis buku yang dikirimkan, pendekatan yang dilakukan dalam mendistribusikan buku, sampai pemilihan sekolah yang menjadi penerima pengiriman buku. Di tahun 2022, Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia.

Program peningkatan kemampuan literasi masyarakat Indonesia melalui penyediaan bahan bacaan bermutu bagi anak usia kelas 4-6 SD dan SMP ini, membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan/pihak terkait untuk menghasilkan konten literasi (dalam bentuk buku) berstandar tinggi sesuai dengan konteks kebutuhan dan karakteristik masyarakat Indonesia. Selain itu program ini juga bersifat inklusif yang memberi kesempatan bagi pendidik, komunitas literasi, masyarakat, dan orang tua untuk turut serta dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi anak-anak Indonesia. Jenis buku pendukung literasi yang disusun dilakukan melalui sayembara penulisan cerita anak, komik, dan penyediaan buku bahan pengayaan untuk anak berkebutuhan khusus seperti *video book*, braille, dan *audio book* yang dapat dimanfaatkan oleh siswa bisu-tuli. Jenis-jenis buku yang dibuat untuk jenjang B1, B2,

B3, dan C serta buku jenjang E yang dihasilkan melalui residensi 25 sastrawan ke daerah 3T.

Upaya yang dilaksanakan Kemendikbudristek melalui Badan Bahasa ini menjadi salah satu tugas dari Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra yang tercantum pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa, yaitu melaksanakan penyusunan dan penyebarluasan bahan literasi dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan literasi.

Program-program yang menjadi bagian dari episode ke-23 ini, diharapkan agar melalui pelatihan yang diberikan kepada guru-guru dan pustakawan sekolah, mereka benar-benar bisa memahami kegunaan dan kebermanfaatannya buku yang diterima. Juga diharapkan, tidak akan ada buku yang menumpuk di perpustakaan karena tidak dimanfaatkan. Misi khusus dari Merdeka Belajar Episode ke-23 adalah untuk membantu peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik, yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam upaya menumbuhkan budi pekerti. Juga untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

Outcome dari kebijakan ini adalah Literasi kebahasaan dan kesastraan yang baik, terutama literasi baca tulis, dapat menumbuhkembangkan lima literasi dasar berikutnya (numerasi,

sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan).

Dampak/Daya Ungkit

1. Meningkatnya Kemampuan Berbahasa.
2. Meningkatnya Kemampuan Berkomunikasi
3. Meningkatnya Kemampuan Berpikir Kritis.
4. Meningkatnya Kemampuan Berkreasi.
5. Meningkatnya Kemampuan Berkarya.

Tiga Pilar Penyediaan Buku Bacaan dalam Merdeka Belajar 23

1. Pemilihan dan Perjenjangan (Buku bacaan bermutu dan sumber pemerolehan buku)
2. Cetak dan Distribusi
3. Pelatihan dan Pendampingan

Terkait dengan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga perlu secara rutin memberikan bantuan pemerintah kepada komunitas literasi supaya program, aktivitas, dan inovasi yang dilakukan oleh komunitas literasi guna meningkatkan literasi masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Bentuk



Data Komunitas Literasi di 35 Provinsi (Sebelum Tahun 2021 s.d. 2023)

No.	Nama Provinsi	Total Komunitas Literasi yang Diberdayakan Tiap Provinsi	Sebelum 2021	Tahun		
				2021	2022	2023
1	DKI Jakarta	100	0	0	100	100
2	Aceh	89	2	0	42	45
3	Sumatera Utara	90	0	7	43	40
4	Sumatera Barat	70	0	20	30	20
5	Sumatera Selatan	42	0	0	8	34
6	Riau	150	0	50	50	50
7	Kepulauan Riau	61	0	0	40	21
8	Jambi	55	0	0	31	24
9	Bengkulu	83	42	0	20	21
10	Bangka Belitung	48	5	0	19	24
11	Lampung	80	0	0	40	40
12	Banten	130	0	30	40	60
13	Jawa Barat	193	0	0	100	93
14	Jawa Tengah	422	318	2	31	71
15	Jawa Timur	56	33	0	11	12
16	DI Yogyakarta	65	25	12	14	14
17	Bali	51	5	0	25	21
18	Nusa Tenggara Barat	156	0	0	66	90
19	Nusa Tenggara Timur	87	21	0	26	40
20	Kalimantan Timur	90	0	20	30	40
21	Kalimantan Utara	5	0	0	0	5
22	Kalimantan Barat	55	0	0	13	42
23	Kalimantan Selatan	107	34	0	36	37
24	Kalimantan Tengah	40	0	0	20	20
25	Gorontalo	43	0	0	9	34
26	Sulawesi Utara	94	0	29	30	35
27	Sulawesi Tengah	58	0	17	20	21
28	Sulawesi Tenggara	65	0	11	35	19
29	Sulawesi Selatan	77	31	0	20	26
30	Sulawesi Barat	20	13	0	3	4
31	Papua	14	0	0	12	2
32	Papua Barat	14	0	0	13	1
33	Papua Barat Daya	23	0	0	0	23
34	Maluku	101	0	16	47	38
35	Maluku Utara	86	0	0	40	46

pembinaan yang dilakukan kepada komunitas literasi ialah dengan, antara lain, (1) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; (2) pemutakhiran profil komunitas literasi; serta (3) pemberdayaan komunitas literasi. Berikut data komunitas literasi dari tahun 2021 sampai dengan 2023.

Capaian

Pada tahun 2024, dalam rangka pengayaan bahan pendukung Gerakan Literasi Nasional (GLN), Kemendikbudristek juga telah mendistribusikan lebih dari 21 juta eksemplar buku bacaan bermutu



Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

ke 35.785 satuan pendidikan SD yang paling membutuhkan yang tersebar di 513 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, pada 2022, Kemendikbudristek menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20 ribu PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia. Upaya ini dilakukan agar pemanfaatan buku di wilayah yang dikirimkan dapat tepat sasaran dan guna.

Capaian MB ke-23
Tahun 2021-2023

	2021	2022	2023	2024
Eksemplar	1.511.611	15.356.486	-	21.471.000
Judul Buku	716	716	100	200
Satuan Pendidikan	20.558	20.558	-	35.785
Kab/Kota	470	470	-	513

200 judul
3 eksemplar

85 sekolah
Provinsi

Oplah 21.471.000 eksemplar	357.850 kali	Total -/+ 3.571.343 kilogram
-------------------------------	--------------	---------------------------------

200 judul berasal dari:
1. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Litara
3. Direktorat PAUD
4. Pusat Perbukuan

Sekolah sasaran penerima adalah
1. SD yang hasil AN tahun 2022 masih jauh di bawah kompetensi minimum (kategori 1 dan kategori 2)
2. Pada tahun 2022 belum mendapat buku bacaan dari Badan Bahasa

Setelah seluruh buku literasi ke sekolah di wilayah 3T terdistribusi, dilaksanakan pendampingan pemanfaatan buku yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen dengan jumlah peserta kegiatan Peningkatan Mutu Fasilitator Pendampingan Pemanfaatan Buku Literasi, baik di tingkat pusat, regional, sampai dengan kabupaten/kota.

Pada 2023, program ini berfokus pada pemanfaatan buku yang sudah didistribusikan pada 2021 dan 2022, serta mengadakan pelatihan guru dalam skala besar. Pelatihan berupa bimbingan teknis (bimtek) fasilitator pendampingan pemanfaatan buku bacaan literasi. Peserta sejumlah 68 orang Widyaprada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Widyaiswara dari Balai Guru Penggerak (BGP). Selain itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Dikti) melalui Program Kampus Mengajar Angkatan 5, telah mendampingi 1.106 SD sekolah penerima buku bacaan literasi dr Badan Bahasa.

Jumlah buku bacaan yang disusun 2021-2024

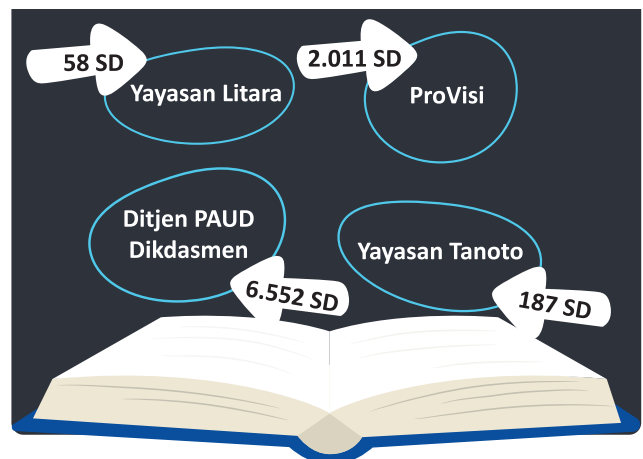


Yayasan Litara mendampingi 58 SD sekolah penerima buku bacaan literasi dari Badan Bahasa. Di tingkat proVisi, pelatihan dan pendampingan dilakukan secara daring kepada 2.011 SD. PDM-10 di bawah Ditjen PAUD Dikdasmen dan melatih sebanyak 6.552 SD. Yayasan Litara, ProVisi, dan Mahasiswa Kampus Mengajar bisa berkontribusi di kegiatan ini karena aktualisasi Nota Kesepahaman antara Yayasan Litara, Dikti, ProVisi, dengan Ditjen PAUD Dikdasmen. Namun daftar sekolah sarasannya tetap berasal dari Badan Bahasa. Yayasan Tanoto juga turut memberikan pelatihan di 187 SD.

Selain itu pada 2023, mendorong distribusi buku bacaan bermutu secara daring melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan laman buku.kemdikbud.go.id.

Pada 2024, pencetakan dan penyaluran dimulai kembali sebagai tindak lanjut evaluasi dari 2021-2023. Pada tahun yang sama Direktorat Jenderal Guru dan

Pendampingan pemanfaatan buku literasi tahun 2024



Tenaga Kependidikan (GTK) melakukan pelatihan melalui UPT daerah yakni BBGP dan BGP, di 3.879 SD, masing-masing satu orang kepala sekolah dan satu orang guru. Sehingga total peserta pelatihan tahun 2024 sampai dengan saat ini sebanyak 7.758 orang.

Tantangan

Terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan penyediaan buku bacaan bermutu, yaitu:

1. Penentuan tema buku yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi/karakteristik kewilayahan 3T;
2. Sistem seleksi penulis dan proses pendampingan ketika penyusunan buku yang membutuhkan waktu tidak sebentar;
3. Penyamaan standard kualitas konten buku yang dihasilkan oleh penulis pemenang sayembara kepenulisan;

4. Pelibatan *stakeholder* strategis dalam penyusunan buku secara penuh sesuai dengan peran masing-masing;
5. Perluasan dan pelibatan mitra-mitra secara massif (Lembaga dan perseorangan) dalam penyusunan buku bacaan literasi sehingga kualitas dari buku semakin tinggi; dan
6. Pengiriman buku fisik ke penerima manfaat yang berada di wilayah 3T.

Urgensi Keberlanjutan

1. Perlu penambahan koleksi bahan bacaan untuk menjangkau sekolah dasar kelas tinggi (4-6) dan Pendidikan sekolah menengah di daerah yang minim akses dan dana untuk memperoleh bahan bacaan bermutu.

Kolaborasi dan Integrasi Lintas Fungsi	Peran	
	Badan Bahasa	Pihak Eksternal
Program Merdeka Belajar Episode Ke- 23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia	Badan Bahasa menyusun bahan penguatan literasi berupa buku bacaan bermutu untuk semua jenjang baca, mencetak buku, dan mendistribusikan buku bacaan bermutu ke sekolah (SD kategori 1 dan 2 berdasarkan nilai AN)	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) memilih sekolah berdasarkan AN 2021/2022, memantau dan mengevaluasi program (melakukan kajian damprogram bersama World Bank dan J-Pal) • Pusat Perbukuan (Pusbuk) menilai buku berdasarkan kriteria buku bacaan bermutu, menyeleksi, dan merekomendasikan buku bacaan bermutu yang akan dicetak dan didistribusikan Badan Bahasa sesuai dengan minat dan sasaran • Ditjen GTK menyiapkan materi untuk pelatihan guru dan pendampingan pemanfaatan buku bermutu yang melibatkan unit utama yang relevan di Kemendikbudristek dan mengembangkan materi di PMM untuk Kepala Sekolah, Guru, dan Dinas Pendidikan untuk memanfaatkan buku bacaan bermutu. • Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PDM) melakukan advokasi ke Pemda menggunakan materi pelatihan dan pendampingan buku bacaan bermutu serta bekerja sama dengan Mitra Pembangunan dan Konsolidator untuk mencetak dan mendistribusikan ke sekolah yang belum mendapatkan buku bacaan bermutu dari badan bahasa. • Ditjen Diktiristek melalui Kampus Mengajar menyiapkan para mahasiswa Kampus Mengajar untuk melakukan pendampingan buku bacaan bermutu di sekolah.

2. Buku bacaan berkualitas dan sesuai dengan jenjang pendidikan penting diwujudkan untuk mendukung agenda Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berjalan
3. Berdasarkan berbagai kajian dan hasil survei tingkat nasional maupun internasional, menunjukkan bahwa tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah (salah satunya survei PISA).
4. Peran serta pendidik, komunitas literasi, masyarakat, dan orang tua dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi anak-anak Indonesia belum maksimal.
5. Sinergi, kolaborasi, dan kerja sama antar-pemangku kepentingan (kementerian/lembaga, komunitas literasi, lembaga swasta, pemerintah daerah, dan masyarakat) terkait gerakan literasi nasional belum berjalan secara maksimal
6. Ketidaksetaraan akses terhadap buku bacaan bermutu di sekolah yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan.
7. Rendahnya kemampuan literasi anak-anak Indonesia akibat rendahnya kebiasaan membaca sejak dini karena masih kurang atau belum tersedianya buku bacaan yang menarik minat peserta didik.

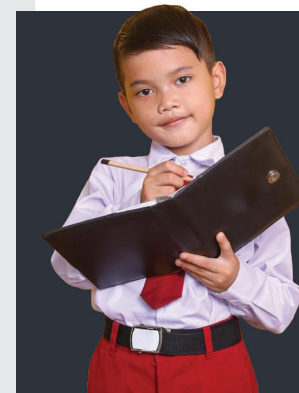
Praktik Baik Pelaksanaan Program

■ Kondisi awal SDN 005 Nunukan Selatan

- | | | |
|---|--|--|
| <p>01 Rapor Pendidikan Rendah Kemampuan Literasi dan Numerasi Tahun 2021 di bawah Kompetensi Minimum</p> | <p>02 Ketersediaan Buku Sekolah hanya memiliki koleksi buku teks dan minim buku bacaan anak</p> | <p>03 Bulan Agustus 2022 Mendapat Bantuan Buku Bacaan Anak Bantuan buku sebanyak 1578 eks. belum dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan efektif</p> |
|---|--|--|

■ Program Keberlanjutan di SDN 005 Nunukan Selatan setelah menerima buku hibah Badan Bahasa 2022

- | | |
|--|---|
| <p>01 Literasi dan Numerasi Merupakan Kebutuhan dan Menjadi Program Prioritas SDN 005 Nunukan Selatan Mengintegrasikan ke dalam Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah sebagai dasar pembuatan program dan penyediaan anggaran yang berkelanjutan</p> | <p>02 Program Literasi dan Numerasi Berkelanjutan sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Rapor Mutu Pendidikan
Capaian Rapor Literasi 2021: skor 22, 22
Capaian Rapor Literasi 2022: skor 70, 00
Capaian Rapor Numerasi 2021: skor 14, 81
Capaian Rapor Numerasi 2022: skor 50, 00</p> |
|--|---|



MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-24

Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

PAUD menjadi tempat pertama bagi anak usia dini dalam membangun fondasi sebagai pembelajar. Namun, PAUD di Indonesia masih berfokus pada kemampuan kognitif, khususnya calistung (membaca, menulis, dan menghitung). Bahkan, kemampuan calistung anak usia dini menjadi indikator terkuat dalam proses seleksi masuk Sekolah Dasar (SD). Hal ini menyebabkan anak usia dini merasa sekolah menjadi tidak menyenangkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI), pemerintah menekankan pada pengembangan anak usia dini yang esensial dari aspek kesehatan/gizi, pengasuhan, perlindungan, sampai rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan. Namun implementasi dari Perpres tersebut masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah maupun tenaga pendidik.

Upaya yang dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam mengimplementasikan sekolah yang menyenangkan bagi anak usia dini adalah dengan meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan pada 28 Maret 2023. Program Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan diluncurkan untuk meluruskan miskonsepsi tentang kemampuan calistung siswa masuk SD yang masih sangat kuat di masyarakat, dan juga menitikberatkan pentingnya membangun kemampuan fondasi nonkognitif pada anak secara bertahap demi efektivitas dan optimalisasi proses pembelajaran.

Fokus utama dalam program Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan antara lain:

1. Transisi PAUD ke SD perlu berjalan dengan mulus. Proses belajar mengajar di PAUD dan

SD/ MI/ sederajat kelas awal harus selaras dan berkesinambungan

2. Setiap anak memiliki hak untuk dibina agar kemampuan yang diperoleh tidak hanya kemampuan kognitif, tetapi juga kemampuan fondasi yang holistik, seperti kematangan emosi, kemandirian, dan kemampuan berinteraksi.
3. Kemampuan dasar literasi dan numerasi harus dibangun mulai dari PAUD secara bertahap dan dengan cara yang menyenangkan
4. “Siap sekolah” merupakan proses yang perlu dihargai oleh satuan pendidikan dan orang tua yang bijak. Setiap anak memiliki kemampuan, karakter, dan kesiapan masing-masing saat memasuki jenjang SD, sehingga tidak dapat disamaratakan dengan standar atau label-label tertentu.

Target Capaian PPDB dan Pembelajaran di PAUD dan SD/MI/sederajat:

1. Penghapusan Tes Calistung
 - Tes calistung tidak boleh digunakan dalam proses PPDB di SD/MI/sederajat (PP No. 17 Tahun 2010 dan Permendikbudristek No. 1 Tahun 2021)
 - Setiap anak berhak mendapatkan layanan pendidikan dasar tanpa seleksi berbasis calistung
2. Penerapan Masa Perkenalan
 - Satuan pendidikan perlu memfasilitasi masa perkenalan bagi peserta didik baru
 - PAUD dan SD/MI/sederajat diharapkan membantu peserta didik dan orang tua beradaptasi dengan lingkungan belajar
3. Pengembangan Enam Kemampuan Fondasi Anak
 - Nilai agama dan budi pekerti
 - Keterampilan sosial dan bahasa
 - Kematangan emosi
 - Kematangan kognitif (dasar literasi dan numerasi)
 - Keterampilan motorik dan perawatan diri
 - Pemaknaan positif terhadap belajar

Capaian

Kemendikbudristek telah melakukan monitoring dan evaluasi pada November 2023 atau delapan bulan setelah peluncuran. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, target capaian pertama yakni penghapusan tes calistung dari proses PPDB SD/MI/ sederajat sudah diterapkan dengan baik. Nyaris seluruh atau 96,76 persen satuan pendidikan yang menjadi sampel monitoring dan evaluasi sudah menghilangkan tes calistung.

Dalam monitoring dan evaluasi untuk melihat capaian target kedua yakni penerapan masa pengenalan bagi peserta didik baru. Secara umum, sebagian besar (64,9 persen) satuan pendidikan PAUD dan SD telah berada pada posisi baik dan sangat baik dalam menerapkan masa pengenalan peserta didik baru. Namun peningkatan tetap perlu didorong, utamanya pada jenjang SD di mana sebesar 44,9 persen satuan pendidikan masih perlu dikuatkan karena berada pada kategori kurang dan sangat kurang.

Adapun untuk target capaian ketiga, pengembangan enam kemampuan fondasi anak, satuan pendidikan PAUD dan SD mengalami banyak tantangan, terutama dalam implementasinya. Hal ini terlihat dari data-data hasil monitoring dan evaluasi.

Kategori	Sangat Kurang (%)	Kurang (%)	Baik (%)	Sangat Baik (%)
PAUD (n=1885)	13.0	21.0	41.8	24.2
SD (n=5290)	33.7	30.4	32.4	3.5
PAUD-SD (n=7175)	28.3	27.9	34.8	9.0

Satuan PAUD dan SD (56,2%) masih perlu peningkatan dalam menerapkan pembelajaran yang membangun enam kemampuan fondasi, terutama pada jenjang SD, terdapat 64,1% satuan yang masih berada pada dua kategori terendah. Meskipun relatif lebih baik, namun masih terdapat 34,2 persen satuan PAUD yang berada pada dua kategori terendah.

Tantangan

Meskipun program Merdeka Belajar Episode ke-24: Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan telah

memberikan arah kebijakan yang jelas dan berdampak positif, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan ini berkaitan dengan kesenjangan kualitas dan konsistensi penerapan di satuan pendidikan PAUD dan SD. Selain itu, tantangan dalam membangun kapasitas tenaga pendidik dan fasilitator, serta koordinasi lintas lembaga, juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Beberapa tantangan utama yang ditemukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi meliputi:

- Pengembangan Enam Kemampuan Fondasi Anak**
 Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah dalam pengembangan enam kemampuan fondasi anak, terutama di jenjang SD. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, 64,1% satuan pendidikan SD masih berada pada kategori “kurang” dan “sangat kurang” dalam membangun kemampuan fondasi seperti kematangan emosi, keterampilan sosial, dan nilai agama. Di jenjang PAUD, meskipun relatif lebih baik, masih terdapat 34,2% satuan pendidikan yang berada pada kategori dua terendah, menunjukkan bahwa peningkatan di kedua jenjang pendidikan ini masih sangat diperlukan.
- Penerapan Masa Pengenalan**
 Meskipun sebagian besar satuan pendidikan sudah menerapkan masa pengenalan dengan baik, masih terdapat 44,9% satuan pendidikan SD yang berada pada kategori “kurang” dan “sangat kurang.” Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam memfasilitasi masa transisi yang efektif bagi siswa baru, terutama pada jenjang SD.
- Koordinasi dengan Mitra dan Peningkatan Kapasitas**
 Penguatan kapasitas PSP dan UPT masih perlu didorong agar mampu mendukung perubahan pembelajaran yang efektif. Selain itu, tantangan lain adalah memperkuat koordinasi antara kementerian/ lembaga dan peran mitra, terutama dalam menginternalisasi perubahan pembelajaran yang diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh dan berkelanjutan di berbagai daerah.

Urgensi Keberlanjutan

Upaya yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek dalam mengoptimalkan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan membutuhkan keberlanjutan yang konsisten agar perubahan yang terjadi dapat mengakar dan memberikan dampak jangka panjang. Penguatan dukungan untuk perubahan pembelajaran di SD dan PAUD harus terus diprioritaskan, karena transisi ini menjadi kunci dalam membangun fondasi pembelajaran yang kuat. Peningkatan kapasitas PSP untuk PAUD dan SD juga perlu berjalan berkesinambungan, sehingga mereka

dapat mengembangkan dan menerapkan strategi yang relevan dalam jangka panjang. Di samping itu, penguatan kapasitas UPT untuk melakukan advokasi harus dipertahankan agar pemahaman tentang pentingnya perubahan pembelajaran ini dapat menjangkau seluruh daerah. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan peran mitra juga sangat penting untuk dioptimalkan secara terus menerus, karena kolaborasi multi-pihak akan mempercepat tercapainya hasil yang diinginkan dan memastikan perubahan ini berlanjut secara holistik.



MERDEKA BELAJAR

EPISODE KE-25

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) menerima mandat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua demi terwujudnya Profil Pelajar Pancasila mengacu pada pelajar yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar Pancasila memiliki enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia; berkebinekaan global; bergotong royong; mandiri; bernalar kritis; dan kreatif.

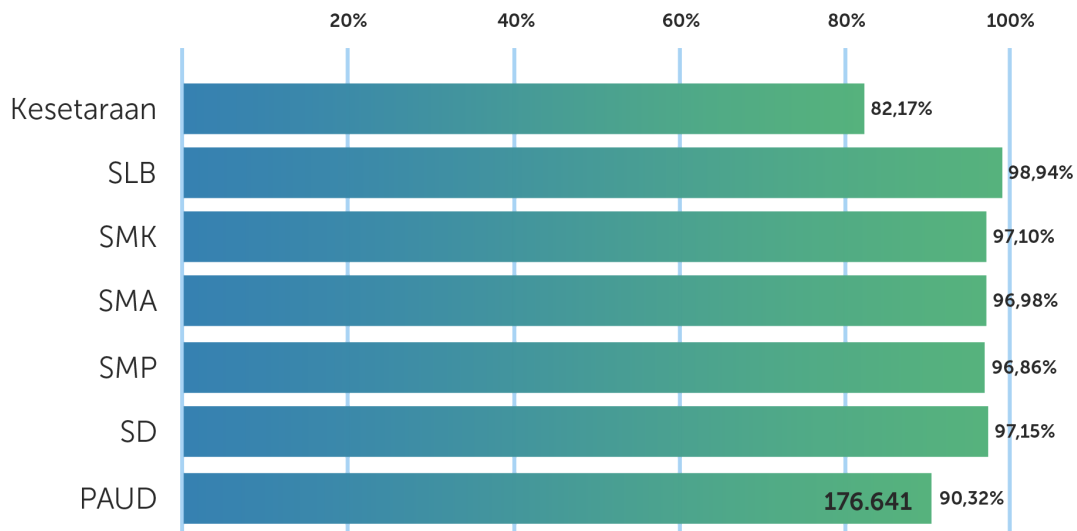
Selain program penguatan karakter dan implementasi Profil Pelajar Pancasila, Puspeka juga berkomitmen menuntaskan tiga dosa besar dalam dunia pendidikan, yang menjadi fokus utama Kemendikbudristek. Ketiga dosa tersebut adalah a) kekerasan seksual; b) perundungan (*bullying*); dan c) intoleransi.

Kekerasan di lingkungan pendidikan memiliki dampak serius terhadap perkembangan akademik, kesehatan mental, dan masa depan peserta didik. Dampak negatif ini dapat menghambat pencapaian prestasi akademik atau karier, menghilangkan kesempatan melaksanakan pendidikan atau pekerjaan dengan optimal, berpotensi menyebabkan korban kehilangan pendidikan atau mata pencaharian, sehingga menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan sesuai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menjadi suatu keharusan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Demi mengoptimalkan pencegahan dan penanganan



kekerasan di satuan pendidikan, Kemendikbudristek mendukung kerja Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di semua satuan jenjang pendidikan dan satuan tugas (satgas) di pemerintah daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyusun bahan ajar (modul) pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Modul ini berisi materi terkait mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan, pembentukan TPPK dan satgas serta urgensi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 yang disusun dengan langkah-langkah terstruktur sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh

Progres pembentukan TPPK di satuan pendidikan



PAUD : 176.641 SMK : 176.641
 SD : 144.642 SLB : 144.642
 SMP : 41.640 Kesetaraan : 41.640
 SMA : 14.181

* Sederajat (tidak termasuk satuan pendidikan keagamaan)

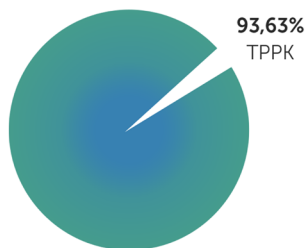
Progres pembentukan Satuan Tugas PPKSP di Pemerintah Daerah

Jumlah Satuan Pendidikan 438.758

Satuan Pendidikan Update 432.107

Jumlah TPPK 404.570

Presentase TPPK



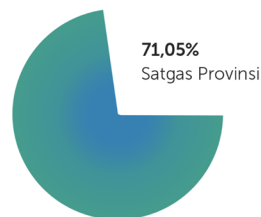
Jumlah Provinsi 38

Jumlah Satgas Provinsi 27

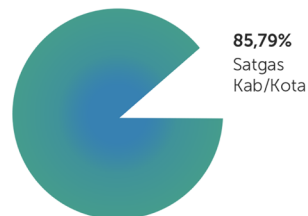
Jumlah Satuan Pendidikan 514

Satuan Pendidikan Update 441

Presentase Satgas Provinsi



Presentase Satgas Kab/Kota



Data Per 1 Oktober 2024

Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

anggota TPPK di semua jenjang dan satuan tugas di pemerintah daerah.

Progres pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas PPKSP di Pemerintah Daerah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menunjukkan perkembangan signifikan dalam upaya pemerintah mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Berdasarkan regulasi ini, seluruh satuan pendidikan di Indonesia diwajibkan membentuk TPPK untuk mengawasi dan menangani kasus kekerasan secara langsung. TPPK bertugas menyusun rencana pencegahan, menangani laporan kekerasan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam proses penanganan kasus.

Di tingkat Pemerintah Daerah, Satuan Tugas PPKSP dibentuk untuk memonitor penerapan kebijakan di seluruh satuan pendidikan di wilayahnya. Satuan Tugas ini memastikan implementasi Permendikbudristek berjalan sesuai pedoman, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan melalui kerja

sama dengan instansi lokal seperti dinas pendidikan, kepolisian, dan lembaga perlindungan anak.

Informasi terbaru mengenai progres pembentukan TPPK dan Satuan Tugas PPKSP dapat diakses melalui laman <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/tppk/>. Laman ini menyediakan data terkini terkait jumlah satuan pendidikan yang telah membentuk TPPK dan materi-materi peningkatan kapasitas anggota Satgas dan TPPK. Dashboard tersebut juga memuat laporan evaluasi, statistik, dan indikator kesuksesan dalam implementasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, membantu pemerintah dan masyarakat memantau efektivitas kebijakan ini dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan.

Program Pencegahan Perundungan

Salah satu bentuk kekerasan yang marak terjadi di lingkungan pendidikan adalah perundungan atau biasa dikenal dengan istilah *bullying*. Perundungan merupakan kekerasan fisik atau kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang karena ketimpangan relasi kuasa (Permendikbudristek 46/2023). Salah satu upaya



pemerintah dalam melakukan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah adalah mengimplementasikan Program Roots Indonesia. Program Roots merupakan model intervensi untuk mencegah perundungan dengan melibatkan siswa sebagai agen perubahan untuk membantu menciptakan iklim yang aman dan nyaman. Pada tahun 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengadopsi Program Roots Indonesia sebagai program pencegahan perundungan di satuan pendidikan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Program ini telah dikembangkan UNICEF bersama mitra sejak tahun 2017-2020.

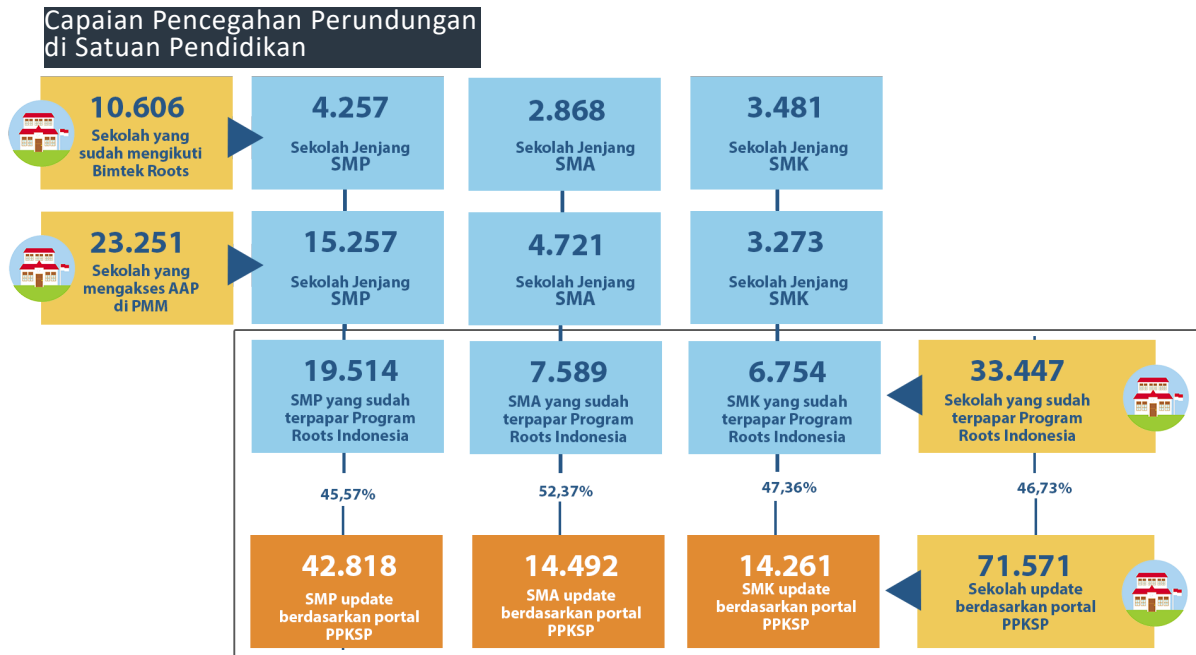
Pada rentang tahun 2021 s.d. 2023, sebanyak 10.606 sekolah jenjang SMP, SMA, dan SMK telah mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan peningkatan kapasitas Program Roots Indonesia. Pada sekolah yang telah diintervensi tersebut, Program Roots telah dilaksanakan sebanyak 8.662 kali dan menghasilkan +/- 173.240 siswa agen perubahan. Selain itu, lebih dari 97% atau sebanyak 10.336 sekolah peserta bimtek Program Roots Indonesia telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Pada tanggal 28 Desember 2023, Pusat Penguatan

Karakter bersama UNICEF dan beberapa fasilitator nasional telah mengembangkan bahan ajar Program Roots Indonesia di PMM agar dapat diakses dan dipelajari semua pendidik/tenaga kependidikan di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Topik pembelajaran mandiri ini adalah Ayo Atasi Perundungan (APP) melalui Program Roots Indonesia yang dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/AyoAtasiPerundungan>. Sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 yang sudah mengakses sebanyak 59.314 pendidik/tenaga kependidikan.

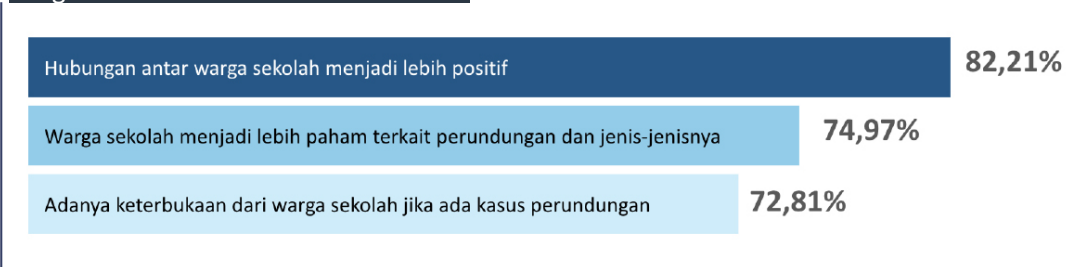
Tantangan

1. Program pencegahan perundungan (Program Roots Indonesia) merupakan kegiatan ekstrakurikuler, sehingga sekolah perlu menetapkan kebijakan mengenai rencana.
2. Pelaksanaan program roots di masing-masing sekolah terutama terkait pembiayaan, sumber daya manusia yang terlibat, dan waktu pelaksanaan.
3. Tidak semua fasilitator guru dapat dilatih secara langsung (tatap muka/luring), sehingga proses bimtek atau peningkatan kapasitas kurang optimal, karena terhambat koneksi jaringan.



data satuan pendidikan yang tersinkronisasi pada dapodik

Dampak pelaksanaan Program Roots Indonesia 2021-2023



Berdasarkan survei implementasi Program Roots 2023

Dampak kegiatan Agen Perubahan setelah menyelesaikan Bimtek Roots dan Roots Day

Dampak	2021	2022	2023	Rata-rata
Menyebarkan perilaku positif di sekolah	94.01%	84.01%	75.94%	83.47%
Berani melaporkan kejadian perundungan	84.57%	64.94%	63.15%	68.60%
Membuat media edukasi tentang pencegahan perundungan di sekolah	82.94%	64.94%	55.52%	65.68%
Mengkampanyekan pencegahan perundungan di media sosial	87.66%	58.35%	52.46%	62.73%
Mendampingi korban perundungan di sekolah	57.35%	44.90%	36.97%	44.94%
Menginisiasi kelompok diskusi pencegahan perundungan	49.91%	30.84%	28.87%	34.32%

Rekomendasi

1. Modul pencegahan perundungan di satuan pendidikan (Program Roots Indonesia) dapat dikembangkan dalam bentuk Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sehingga dapat terintegrasi dalam Kurikulum Merdeka.
2. Topik “Ayo Atasi Perundungan” melalui Program Roots Indonesia dapat dikembangkan atau disempurnakan untuk dapat setara dengan kegiatan bimtek atau peningkatan kapasitas.
3. Prasyarat surat komitmen melaksanakan program Roots Indonesia dipertahankan berlanjut dan digunakan sebagai bahan evaluasi tindak lanjut.
4. Setiap dinas pendidikan dapat mengalokasikan dana untuk menyelenggarakan program Roots berkolaborasi dengan Kemendikbudristek untuk memperbanyak sasaran sekolah yang melaksanakan program pencegahan perundungan di sekolah.

Program Pencegahan Kekerasan Seksual

Dengan diberlakukannya mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Permendikbudristek PPKSP) melalui Merdeka Belajar Episode 25, Pusat Penguatan Karakter bersama para guru, jaringan masyarakat sipil, aktivis hak anak, kementerian/ lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya menyusun bahan ajar (modul) Pembelajaran Pencegahan Kekerasan Seksual jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA/K yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi tentang pencegahan kekerasan kepada para siswa.

Program Pencegahan Intoleransi

Implementasi kebijakan atau program Penguatan Kebinekaan (Anti Intoleransi) dilakukan dengan cara

below the line (sosialisasi, diseminasi, dan advokasi produk-produk kebinekaan kepada pemangku kepentingan) dan *above the line* (produksi dan penyebarluasan konten di media sosial dan laman). Puspeka dalam melakukan pengembangan produk-produk kebinekaan berupa modul, buku, maupun konten selalu melibatkan pemangku kepentingan seperti, jaringan masyarakat sipil, unit utama internal Kemendikbudristek, dan K/L lain.

Produk-produk Puspeka untuk pencegahan intoleransi antara lain a) Modul Wawasan Kebinekaan Global bagi guru semua jenjang; b) Modul Projek Penguatan

Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik jenjang SMA/SMK; c) Buku Panduan Aktivitas Kreatif bagi guru semua jenjang; d) Buku Panduan PAUD bagi orang tua; e) Forum Penguatan Kebinekaan bagi guru semua jenjang; f) Produk Konten dalam bentuk Video, Infografis, dan Poster; dan g) Panduan dan Modul Tunas Bineka.

Capaian

Program pencegahan intoleransi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan dan advokasi produk-produk yang dihasilkan.

Capaian Program Pencegahan Intoleransi 2020-2024

2020

Penyusunan dan Uji Coba, Produksi

Tahun 2020-2022, Produksi dan Uji Coba Modul WKG; Tahun 2022, Produksi dan Uji Coba Modul P5; Tahun 2022, Penyusunan Panduan Aktifitas Kreatif dan Buku Panduan Orang Tua PAUD; 2020-2024, Produksi dan Penyebarluasan Konten Pencegahan Intoleransi ; 2023, Laman Bineka, Modul WKG ke PMM; 2024, Modul P5 ke PMM, Modul Tunas Bineka

2023

Sosialisasi dan Diseminasi

Pada 9 Provinsi dan 48 Kabupaten/Kota, pesertanya terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, MKKS, Pengawas dan UPT (700 peserta).

2024

Advokasi

Pada 9 Provinsi dan 172 Kabupaten/Kota, peserta terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Koordinator Guru Penggerak, Komunitas Belajar, Fasilitator Sekolah Penggerak, dan Jaringan Masyarakat Sipil

Berbagai perangkat pencegahan intoleransi telah disematkan dalam Platform Merdeka Mengajar, dan laman bineka yang dapat diakses melalui <https://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/bersamacintaikeragaman/>.



Lini masa produk, penyebarluasan, dan advokasi produk-produk Kebinekaan

Modul Wawasan Kebinekaan Global (WKG) bagi guru semua jenjang

Bahan ajar (modul) pembelajaran kebinekaan yang memperluas pemahaman guru agar tercipta budaya toleransi

285.834

Pengguna

Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) bagi peserta didik jenjang SMA/SMK

Panduan peserta didik dalam melakukan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) terkait kebinekaan

3.017

Pengguna

Laman Bineka

Etalase produk kebinekaan yang dapat diunduh oleh pengguna.

27.454

telah diunduh

38

Provinsi telah menggunakan produk kebinekaan

Implementasi Program Advokasi Produk Kebinekaan

Kolaborasi Puspeka dengan dinas, komunitas, dan jaringan masyarakat sipil untuk menyebarkan produk kebinekaan.

6.746

peserta

Program Tunas Bineka

Ruang penjemputan atau interaksi peserta didik dari latar belakang yang berbeda untuk melakukan proyek bersama.

255

peserta

Sosialisasi dan Desiminasi Produk Kebinekaan

Upaya kolaboratif dinas pendidikan MKKS, pengawas, dan UPT dalam menyebarkan produk kebinekaan.

18.215

peserta

Urgensi Keberlanjutan

No	Program/Kegiatan	Urgensi Keberlanjutan
1	Advokasi Modul Wawasan Kebinekaan Global (WKG)	<ul style="list-style-type: none"> Sudah masuk pada laman Bineka PMM pada fitur Belajar Mandiri dan diakses 216 ribuan pengguna di seluruh Indonesia dan terdiseminasi secara luring kepada 15 provinsi di seluruh Indonesia, sehingga program ini perlu dilanjutkan, karena sudah ada jejaring yang terbentuk. Perlu didiseminasikan pada 23 provinsi yang belum mendapatkan advokasi.
2	Advokasi Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tema Bhinneka Tunggal Ika	<ul style="list-style-type: none"> Sudah masuk pada laman Bineka PMM dalam fitur Bahan Ajar dan terdiseminasi secara luring kepada 15 Provinsi di seluruh Indonesia, sehingga program ini perlu dilanjutkan, karena sudah ada jejaring yang terbentuk. Perlu didiseminasikan pada 23 provinsi yang belum mendapatkan advokasi. Perlu dilanjutkan dengan penyusunan dan uji coba modul bertema ini untuk jenjang SD dan SMP
3	Advokasi Buku Panduan Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> Sudah masuk pada laman Bineka PMM dan terdiseminasi secara luring kepada 15 Provinsi di seluruh Indonesia, sehingga, program ini perlu dilanjutkan, karena sudah ada jejaring yang terbentuk. Perlu didiseminasikan pada 23 provinsi yang belum mendapatkan advokasi. Sudah menggandeng Guru Kreator Konten untuk bisa membuat konten berdasarkan isi dari buku ini.
4	Penyebarluasan Konten dan Poster	Sudah banyak konten dan poster yang diproduksi. Perlu menyusun strategi dalam penyebarluasan serta internalisasi pesan dan nilai yang ada pada konten tersebut.
5	Modul Tunas Bineka	Program ini sudah melalui uji coba dan kerja sama dengan Scholas Occurrentes, akademisi, jaringan masyarakat sipil, dan pihak lainnya. Model yang dilakukan kerja sama antara Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Jaringan Masyarakat Sipil dan Puspeka. Inisiatif ini perlu dilanjutkan dengan daerah lain, karena hasilnya sangat baik dalam penciptaan ruang perjumpaan.

MERDEKA BELAJAR

EPISODE KE-26

Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi memiliki peran penting sebagai pendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, persiapan SDM unggul, dan sebagai tulang punggung inovasi. Selain itu, pendidikan tinggi adalah jenjang yang paling dekat dengan dunia kerja dan masyarakat; lulusan perguruan tinggi dituntut untuk dapat berkontribusi dengan baik. Kondisi tersebut yang menjadi salah satu pertimbangan transformasi jenjang pendidikan tinggi menjadi titik berat dalam episode Merdeka Belajar. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meluncurkan Merdeka Belajar Episode Duapuluh Enam yaitu “Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi” pada tanggal 29 Agustus 2023, yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023.

Peluncuran kebijakan ini untuk merespon 3 masalah krusial, yaitu (1) standar nasional pendidikan tinggi yang selama ini dianggap terlalu kaku dan rinci, (2) perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi, dan (3) perguruan tinggi kurang memiliki ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas.

Perubahan yang dilakukan melalui kebijakan ini berisikan dua hal fundamental yaitu yang memungkinkan transformasi pendidikan tinggi melaju lebih cepat lagi. Pertama, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang lebih memerdekakan, di mana Standar Nasional kini berfungsi sebagai pengaturan framework dan tidak lagi bersifat preskriptif dan



detail, diantaranya terkait pengaturan tugas akhir mahasiswa. Kedua, sistem akreditasi pendidikan tinggi yang meringankan beban administrasi dan finansial perguruan tinggi.

Standar Nasional

Kebijakan ini memudahkan perguruan tinggi untuk lebih fokus dalam peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian

masyarakat. Misalnya, syarat kelulusan yang tidak relevan dengan zaman dan alokasi waktu yang diatur sampai per menit per minggu dalam satu satuan kredit semester (SKS). Contoh transformasi terkait Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang lebih memerdekakan, salah satunya terkait standar penelitian dan standar pengabdian. Beberapa perubahan yaitu penyederhanaan lingkup standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat, penyederhanaan standar kompetensi lulusan, dan penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian.

Terkait penyederhanaan lingkup standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat maka sebelumnya, standar ini masing-masing terdiri atas delapan standar, yaitu: (1) standar hasil, (2) standar isi, (3) standar proses, (4) standar penilaian, (5) standar pelaksana, (6) standar sarpras, (7) standar pengelolaan, dan (8) standar pendanaan. Sekarang: Standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat masing-masing hanya terdiri atas tiga standar yaitu standar luaran, standar proses, dan standar masukan. Dengan penyederhanaan ini maka dampak positif yang diharapkan yaitu (1) memberikan ruang lebih luas kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat; dan (2) mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi.

Penyederhanaan yang kedua yaitu penyederhanaan standar kompetensi lulusan. Sebelumnya, standar ini mencakup (1) rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci, (2) mahasiswa sarjana/sarjana terapan wajib membuat skripsi., (3) mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal ilmiah terakreditasi., dan (4) mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional bereputasi. Dengan penyederhanaan maka standar ini berubah meliputi, (1) kompetensi tidak lagi dijabarkan secara rinci, (2) perguruan tinggi dapat merumuskan



kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi, (3) tugas akhir dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk lainnya, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi, (4) jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir dapat dihapus/tidak lagi bersifat wajib, dan (5) mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun tidak wajib diterbitkan di jurnal Dampak positif dari penyederhanaan standar kompetensi lulusan mencakup: (1) program studi dapat menentukan bentuk tugas akhir, (2) menghilangkan kewajiban tugas akhir pada banyak program studi sarjana/sarjana terapan, dan (3) mendorong perguruan tinggi menjalankan Kampus Merdeka dan berbagai inovasi pelaksanaan Tridharma.

Penyederhanaan yang ketiga yaitu penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian. Sebelumnya, standar ini (1) mengatur pembagian waktu (menit) per 1 SKS, seperti tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu, dan (2) penilaian mata kuliah hanya dalam angka/huruf dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK. Dengan perubahan yang terjadi maka sekarang (1) 1 SKS didefinisikan sebagai 45 jam*) per semester, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi, dan (2) penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk lulus atau tidak lulus (pass/fail). Lebih lanjut, khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi, dan mata kuliah pass/fail tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK. Dampak positif dari perubahan ini adalah bahwa Perguruan tinggi dapat menentukan distribusi SKS yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan belajar dalam kelas, dan tidak memaksakan penilaian indeks prestasi yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

Akreditasi Pendidikan Tinggi

Terdapat 6 (enam) perubahan terkait akreditasi yang diatur dalam Merdeka Belajar Episode Dua Puluh Enam yaitu melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023. Perubahan pertama terkait dengan proses akreditasi dan re-akreditasi, yaitu (1) skreditasi diperbaharui secara otomatis setiap 5 tahun, (2) Re-akreditasi bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi, (3) Re-akreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada indikasi penurunan kualitas perguruan tinggi/program studi, dan (4) program studi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

Perubahan kedua terkait keringanan beban administrasi dan finansial akreditasi. Dalam hal ini maka yang nantinya diberlakukan adalah (1) status akreditasi disederhanakan, (2) pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib, baik yang dilakukan BAN-PT maupun LAM, dan (3) proses akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan bersama pada tingkat pengelola program studi.

Perubahan ketiga yaitu penyederhanaan status akreditasi. Kebijakan ini mengatur bahwa (1) akreditasi perguruan tinggi menghasilkan status tidak terakreditasi atau terakreditasi; (2) akreditasi program studi menghasilkan status tidak terakreditasi, terakreditasi, terakreditasi unggul, dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional; (3) status terakreditasi berarti memenuhi SN Dikti; (4) status terakreditasi unggul berarti memenuhi standar LAM; (5) standar LAM harus melampaui SN Dikti; dan (6) program studi yang mendapatkan akreditasi internasional tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional. Dampak positif adalah standar yang menjadi basis akreditasi lebih jelas dan sederhana, dan instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi beban administrasi perguruan tinggi.

Perubahan keempat bahwa Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib. Hal ini diartikan bahwa, (1) status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib, (2) Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi, dan (3) perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul. Dampak positif adalah perguruan tinggi tidak lagi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib, dan perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen akreditasi unggul ke LAM.

Perubahan kelima yaitu akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi. Ini berarti bahwa proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi yaitu departemen/ jurusan/sekolah/fakultas, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi.

Sedangkan perubahan keenam terkait dengan langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Masyarakat. Bagi perguruan tinggi yang harus ditindaklanjuti meliputi empat hal. Pertama, menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan tingkat mutu, keluasan substansi, serta visi dan misi masing-masing dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi. Kedua, menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat dua tahun. Ketiga, peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai. Keempat, perpanjangan status akreditasi akan menggunakan status akreditasi yang disederhanakan.

Sedangkan bagi BAN-PT dan LAM maka (1) tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk asesmen status terakreditasi yang bersifat wajib, dan (2) menyesuaikan instrumen akreditasi dengan Standar

Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat dua tahun.

Capaian

1. Pasca diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, BAN-PT secara kontinyu melakukan sosialisasi “Transformasi akreditasi sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023” ke berbagai forum pimpinan perguruan tinggi, forum LLDIKTI, forum APTISI dan ABPTSI, Forum PTKL, dan forum-forum lainnya yang menghadirkan perwakilan Dewan Eksekutif sebagai Narasumber. Pada setiap kegiatan sosialisasi BAN-PT selalu mengingatkan kepada pimpinan dan pengelola perguruan tinggi terkait dengan masa transisi akreditasi oleh BAN-PT dan juga masa penyelesaian instrumen dan tata cara akreditasi sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023.
2. BAN-PT telah menyelesaikan instrumen perpanjangan akreditasi melalui mekanisme Automasi baik untuk perpanjangan akreditasi institusi perguruan tinggi maupun program studi. Instrumen Automasi tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan BAN-PT, yaitu (terlampir):
 - a. PerBAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi melalui Mekanisme Automasi.
 - b. PerBAN-PT Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi melalui Mekanisme Automasi.
 - c. PerBAN-PT Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi melalui Mekanisme Automasi.

Instrumen automasi untuk perpanjangan status terakreditasi institusi perguruan tinggi akan diterapkan bagi perguruan tinggi yang masa akreditasinya berakhir pada tanggal 12 Agustus 2025 dan



seterusnya. Sementara itu, instrumen automasi untuk perpanjangan status terakreditasi program studi akan diterapkan bagi program studi (yang belum memiliki LAM) paling lambat 30 Maret 2025.

3. Dewan Eksekutif BAN-PT telah menyelesaikan draft Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi yang memenuhi SNDikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Draft instrumen APT untuk varian PTNBH, PTN PJJ, PTN Akademik, PTS Akademik, PTN Vokasi, PTS Vokasi, PTKL (Kementerian/Lembaga Lain), dan Akademi Komunitas. Draft instrumen tersebut telah dibahas dan disetujui oleh Majelis Akreditasi untuk selanjutnya akan segera ditetapkan dengan Peraturan BAN-PT.
4. Dewan Eksekutif BAN-PT sedang dalam proses menyiapkan draft Instrumen Akreditasi Program Studi yang memenuhi SNDikti untuk berbagai program pendidikan (S1, S2, S3, Profesi, diploma, Sarjana Terapan, Magister terapan, Doktor Terapan, dst.). Draft tersebut selanjutnya akan disampaikan ke MA BAN-PT untuk dibahas dan ditetapkan, sesuai target waktu seluruh instrumen akreditasi sesuai Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 sudah ditetapkan dengan Peraturan BAN-PT dan siap disosialisasikan mulai bulan Januari 2025.
5. Dewan Eksekutif BAN-PT juga sedang dalam proses menyiapkan sistem akreditasi online (SAPTO) yang baru, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023. Sistem (New- SAPTO) ini diharapkan dapat diselesaikan pada bulan Desember 2024, dan selanjutnya diujicoba dan disosialisasikan pada bulan Januari hingga Juni 2025.
6. Pemberlakuan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 telah memaksa perguruan tinggi yang belum/ tidak terakreditasi mengajukan akreditasi (pertama) institusi perguruan tinggi. Karena bila tidak melakukan ajuan akreditasi hingga batas waktu 18 Agustus 2023, maka sesuai dengan aturan akan dicabut surat izin pendirian/penyelenggaraannya.



BAB IV

PROGRAM PRIORITAS LAINNYA



PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN SEMAKIN BERDAMPAK

Pembangunan pendidikan nasional di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama satu dekade terakhir menunjukkan dampak positif dan dinilai telah berada di koridor yang tepat. Upaya perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan terus didorong melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pada layanan pendidikan semakin berdampak positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami tren peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang signifikan, terutama dalam aspek pendidikan. Sejak 2014 hingga 2023 skor IPM Indonesia naik dari 68,90 pada 2014 menjadi sekitar 73,31 pada 2023, seiring dengan perbaikan di berbagai dimensi seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Salah satu indikator utama dalam pendidikan, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), juga mengalami peningkatan. Pada 2014, anak-anak Indonesia diperkirakan dapat menempuh pendidikan selama 12,39 tahun—setara dengan menyelesaikan pendidikan menengah atas. Kemudian, pada 2023, HLS meningkat menjadi 13,05 tahun, mencerminkan harapan yang lebih besar bagi anak-anak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Selama satu dekade terakhir Kemendikbudristek memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari keluarga miskin dan ekonomi lemah agar terus bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Senada, Angka Partisipasi Sekolah (APS) di jenjang pendidikan menengah pun mengalami lonjakan, dari

kisaran 60%-70% pada 2014 menjadi sekitar 76%-80% pada 2023, sejalan dengan upaya pemerintah menggalakkan pendidikan menengah universal atau rintisan wajib belajar 12 tahun. Pada pendidikan tinggi, meskipun kenaikannya lebih lambat, APS tetap tumbuh dari 16%-20% pada 2014 menjadi 25%-30% pada 2023.

Capaian penyediaan akses layanan pendidikan ini tidak lepas dari berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti Program Indonesia Pintar (PIP) mulai jenjang pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) hingga pendidikan tinggi melalui KIP Kuliah. Selain itu, Kemendikbudristek juga terus melakukan penguatan pada program penyediaan akses pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), misalnya dengan menghadirkan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Sejak awal PIP Dikdasmen diluncurkan, peserta mendapat kartu secara fisik sebagai identitas penerima dengan nama KIP. Namun, karena kartu fisik ini memiliki banyak permasalahan di lapangan maka dilakukan terobosan pada tahun 2021 dengan penerbitan KIP Digital yang lebih aman. Terobosan ini diikuti dengan upaya percepatan pembuatan rekening dan percepatan pencairan bagi penerima melalui pengiriman pesan pengingat (SMS Broadcast) kepada seluruh siswa penerima PIP yang belum melakukan aktivasi rekening, termasuk kepada Kepala Sekolahnya.

Selanjutnya, untuk meningkatkan ketepatan sasaran, sejak tahun 2023 penetapan kuota usulan berdasarkan berbagai variabel berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian

Sosial (Kemensos) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbudristek).

Kemudian, sejak tahun 2024 dilakukan terobosan kebijakan pada PIP Dikdasmen melalui integrasi sistem dengan eksternal sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, misalnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, dilakukan monitoring bersama di lapangan antara Dinas Pendidikan Daerah dan unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbudristek yang berada di daerah serta bermitra dengan PT POS INDONESIA Untuk menjangkau penyaluran di wilayah sulit (area terdepan, terluar, dan tertinggal yang mengalami kendala layanan dari bank penyalur.

Data jumlah penerima ADEM

Asal Wilayah	X	XI	XII	Lulus	Total
Daerah Khusus (3T)	200	199	200	492	1091
Repatriasi	299	300	293	495	1387
Wilayah Papua	491	490	461	321	1763
Total	990	989	954	1308	4241

Sebagai kebijakan pendidikan yang bersifat afirmatif, Program Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) memberikan bantuan pemerintah untuk memberikan kesempatan belajar kepada mahasiswa karena kondisi dan keberadaannya sehingga mengalami kesulitan dan keterjangkauan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Selain menysasar putra-putri Papua, ADEM juga menysasar siswa berasal dari daerah khusus, siswa anak pekerja migran, serta penyandang disabilitas, dengan skema



persyaratan dan pembiayaan mengikuti skema PIP.

Program Bantuan ADEM merupakan program strategis yang dapat mendukung percepatan pembangunan SDM Indonesia. Selain itu, juga dapat memberikan rasa optimisme pada diri mahasiswa dan keluarga akan cita-cita yang dapat terwujud, serta dapat



memperkuat kecintaan mereka kepada bangsa dan negara.

Sampai tahun 2023, Program ADEM telah memberikan kesempatan kepada 4.241 siswa asal wilayah Papua, daerah khusus 3T dan anak TKI di perbatasan untuk menempuh pendidikan jenjang menengah di berbagai

Data jumlah penerima ADik

Wilayah	2020	2021	2022	2023
Papua	304	322	560	1612
Papua Barat	249	280	356	1095
ADEM Papua dan Papua Barat	93	274	241	848
Daerah Khusus 3T	0	0	299	1287
Repatriasi/Anak Pekerja Migran	0	0	53	98
ADEM TKI dan 3T	0	0	156	0
Difabel	163	247	135	739

sekolah terpilih di Pulau Jawa dan Bali.

Saat ini, sebanyak 2.933 siswa yang sedang aktif melaksanakan pembelajaran di sekolah yang terdiri dari siswa kelas X sebanyak 990 siswa, kelas XI sebanyak 989 siswa dan kelas XII sebanyak 954 siswa menempuh pendidikan pada 243 sekolah terpilih.

Sampai dengan tahun 2023, berdasarkan asal wilayah terdapat 1.763 siswa asal Papua, 1.091 siswa asal daerah 3T dan 1.387 siswa anak pekerja migran yang menjadi penerima ADEM. Dari sebanyak 4.242 siswa penerima ADEM, 1.308 siswa telah lulus dan sebagian telah menempuh jenjang pendidikan tinggi melalui program lanjutan, yakni Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik). Dari total siswa ADEM yang lulus tersebut, 321 siswa berasal dari Papua, 492 siswa berasal dari daerah khusus 3T dan 495 siswa anak pekerja migran di perbatasan Indonesia-Malaysia (repatriasi).

Sejak tahun 2020, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) melanjutkan kebijakan program beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) yang sebelumnya dikelola oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), sejak tahun 2020. Setelah dikelola Puslapdik, sejak tahun 2020, beasiswa disabilitas yang sebelumnya yang merupakan program terpisah dimasukkan ke dalam program beasiswa ADik untuk memperluas sasaran.

PULIH LEBIH CEPAT, BANGKIT LEBIH KUAT: GOTONG ROYONG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HADAPI PANDEMI

Selama pandemi Covid-19 pada 2020 hingga 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan sejumlah inisiatif strategis untuk menjaga kelangsungan pendidikan di tengah tantangan global. Berbagai inisiatif tersebut dikerjakan bersama dengan berbagai pihak, baik di dalam pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor privat, maupun komunitas masyarakat. Salah satu program dan kebijakan utama dalam memitigasi dampak pandemi adalah penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang didukung oleh berbagai terobosan. Misalnya, untuk mengatasi keterbatasan akses internet, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp7,2 triliun untuk program bantuan kuota data internet atau Kuota Belajar, yang berhasil menjangkau lebih dari 35,7 juta siswa, mahasiswa, guru, dan dosen di seluruh Indonesia sepanjang 2020 hingga 2021.

Selain itu, siaran Belajar dari Rumah melalui TVRI menjangkau sekitar 12,4 juta siswa di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet, agar memastikan bahwa proses pembelajaran tetap berlangsung meskipun secara daring tidak memungkinkan. Terobosan ini didukung juga dengan penyediaan modul-modul pembelajaran di masa pandemi yang mendorong pembelajaran yang lebih berfokus pada materi esensial. Serta kebijakan pelonggaran pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan agar satuan pendidikan lebih mudah mengalokasikan sumber daya pada hal yang paling penting, yaitu penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi.



Di sisi lain, untuk mendukung pendidik, Kemendikbudristek memberikan bantuan subsidi upah kepada lebih dari 2 juta guru dan dosen non PNS, sebagai bentuk dukungan finansial selama masa pandemi. Tak hanya itu, bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan kepada lebih dari 1,1 juta mahasiswa yang terdampak pandemi, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung akses pendidikan tinggi. Dengan langkah-langkah ini, Kemendikbudristek tidak hanya berhasil menjaga keberlanjutan pendidikan selama pandemi, tetapi juga mempersiapkan ekosistem pendidikan yang lebih tangguh dan adaptif untuk masa depan.



Tak hanya itu, untuk menjaga nyala api kebudayaan di masa pandemi Covid-19, Kemendikbudristek memberikan dukungan signifikan kepada sektor budaya yang terdampak. Salah satu langkah utamanya adalah penyaluran bantuan sosial kepada sekitar 59 ribu pelaku budaya, termasuk seniman, budayawan, dan pekerja kreatif, untuk membantu mereka bertahan di tengah pembatasan aktivitas.

Selain itu, Kemendikbudristek mendorong digitalisasi produk budaya, dengan memfasilitasi pertunjukan seni, pameran, dan festival budaya secara daring, seperti Pekan Kebudayaan Nasional (PKN), Festival

Film Indonesia, dan berbagai pameran seni secara daring. Kemudian, berbagai program strategis seperti Belajar dari Maestro, yang memungkinkan generasi muda belajar langsung dari seniman terkemuka, juga beralih ke format daring. Untuk memperluas akses publik terhadap kebudayaan, museum dan situs budaya menghadirkan tur virtual serta digitalisasi koleksi museum dan cagar budaya. Inisiatif-inisiatif ini memastikan bahwa aktivitas budaya tetap berlangsung dan terakses oleh masyarakat, meski di tengah keterbatasan akibat pandemi.

Kemendikbudristek juga mendukung mahasiswa sebagai relawan Covid-19 melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Relawan mahasiswa ini diterjunkan untuk melakukan program-program preventif dan promotif melalui komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait Covid-19. Relawan mahasiswa juga dapat membantu pemerintah daerah melakukan pelacakan (*tracing and tracking*), membantu pelayanan *call center* di pusat maupun daerah serta pusat-pusat layanan Covid-19.

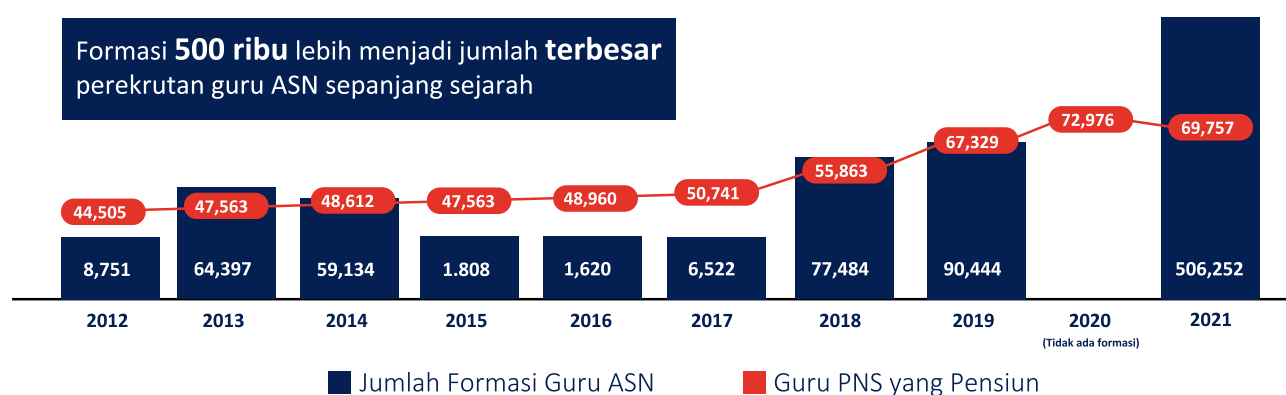
Kemendikbudristek juga mendorong dan berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi negeri untuk menyiapkan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan sebagai *sub center* tes Covid-19. Rumah Sakit Pendidikan di bawah Kemendikbudristek juga disiapkan untuk merawat pasien Covid-19 sesuai kapasitas masing-masing.

REKRUTMEN GURU ASN TERBESAR SEPANJANG SEJARAH

Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan guru berkualitas di sekolah negeri. Kendati terjadi moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak 2015 hingga 2018, penerimaan guru tetap dilakukan, meski dalam jumlah yang terbatas, tidak lebih dari 10.000 formasi.

Sejak tahun 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru honorer telah lulus seleksi dan diangkat menjadi guru ASN PPPK. Angka tersebut merupakan sebuah capaian besar bagi Kemendikbudristek karena dalam periode tiga tahun, jumlah guru berstatus ASN meningkat sebanyak 61%. Adanya perubahan status guru dari

Jumlah formasi guru ASN (CPNS dan CPPPK) dari tahun ke tahun



Moratorium penerimaan ASN yang cukup lama ini menyebabkan kekurangan guru pada sekolah negeri yang mencapai sekitar 1,2 juta. Hal ini diakibatkan jumlah guru yang pensiun setiap tahunnya mencapai sekitar 70 ribu orang. Tak hanya itu, moratorium penerimaan ASN juga mengakibatkan melonjaknya jumlah guru honorer di sekolah negeri hingga mencapai sekitar 742 ribu pada tahun 2020. Tidak adanya jaminan status dan kesejahteraan para guru honorer menjadi alasan utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk melakukan terobosan kebijakan penerimaan guru melalui jalur ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

honorer ke ASN PPPK sehingga membawa jaminan kesejahteraan ekonomi bagi guru, yang meliputi gaji dan tunjangan profesi. Perubahan status tersebut akan memungkinkan lebih banyak guru mengikuti program-program peningkatan kompetensi dan sertifikasi.

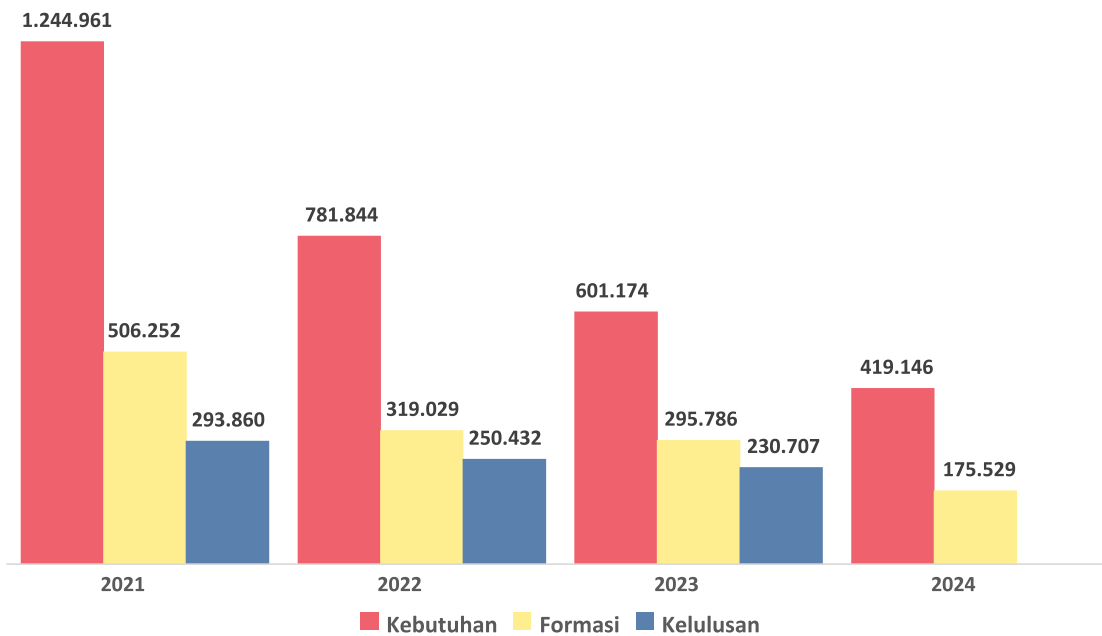
Kesempatan untuk mengikuti seleksi penerimaan guru ASN PPPK dibuka untuk para guru honorer yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang saat ini tidak mengajar, termasuk guru tenaga honorer kategori 2 (eks-THK-2). Pengangkatan guru honorer menjadi ASN PPPK ini merupakan salah satu terobosan

Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

Kemendikbudristek untuk menuntaskan permasalahan guru honorer yang telah terjadi bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan

di Indonesia. Untuk menjaga kualitas guru, Undang-Undang tentang ASN mengamankan proses seleksi dalam penerimaan guru honorer untuk menjadi ASN PPPK.

Grafik perbandingan antara kebutuhan, formasi, kelulusan guru ASN PPPK



MANAJEMEN TALENTA FASILITASI KARIER BELAJAR SISWA



Untuk mengoptimalkan bonus demografi agar membawa Indonesia menjadi negara maju, pemerintah melakukan pengembangan talenta nasional secara holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Manajemen Talenta Nasional (MTN) akan mengelola talenta di tiga bidang, yakni riset dan inovasi, seni dan budaya, serta olahraga. Manajemen Talenta di bidang riset dan inovasi menasar dua target, yakni meningkatnya jumlah dan kualitas SDM ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkontribusi pada penciptaan inovasi nasional dan meningkatnya pengakuan internasional terhadap karya anak bangsa.

Selanjutnya, Manajemen Talenta Nasional di bidang seni dan budaya menasar dua target, yaitu meningkatnya jumlah dan kualitas talenta seni budaya yang berkontribusi pada pengembangan sektor kesenian dan kebudayaan nasional serta meningkatnya penyelenggaraan ajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia.

Sementara itu, Manajemen Talenta Nasional di bidang olahraga akan fokus menasar pengembangan talenta atlet pada cabang-cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali di ajang Olimpiade, di antaranya bulu tangkis, panahan, angkat besi, atletik, dayung, renang, senam, dan panjat tebing.

Sebagai bagian dari Manajemen Talenta Nasional, Kemendikbudristek melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) membangun Sistem Informasi Pengembangan

Talenta (SIMT) yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data talenta peserta didik secara menyeluruh. Sistem ini terdiri dari beberapa platform utama yang saling terhubung, memberikan akses mudah dan transparan untuk peserta didik dan penyelenggara ajang.

Platform SIMT merupakan basis data utama yang mencatat prestasi peserta didik di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pencatatan prestasi secara terstruktur, sehingga peserta didik dapat memantau portofolio digital mereka dan institusi terkait dapat melihat rekam jejak prestasi talenta dari seluruh Indonesia. Portal ini dapat diakses melalui simt.kemdikbud.go.id. Hingga saat ini telah tercatat sebanyak 142.181 peserta didik berprestasi dari berbagai ajang.

Selain itu, Puspresnas juga memfasilitasi rekognisi berbagai ajang talenta baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun sektor privat. Kurasi Talenta

berfungsi untuk mengkurasi berbagai lomba dan prestasi peserta didik yang diselenggarakan di luar Puspresnas. Aplikasi ini memastikan bahwa prestasi yang diraih oleh siswa dalam berbagai ajang tetap terpantau dan tercatat dengan baik, serta dapat diakui oleh Puspresnas untuk pengembangan lebih lanjut. Aplikasi ini bisa diakses melalui kurasi-prestasi.kemdikbud.go.id. Hingga saat ini, terdata sebanyak 2.041 lomba yang diselenggarakan oleh pihak selain Kemendikbudristek yang telah terkurasi.

Lebih lanjut, Kemendikbudristek melalui Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI) telah menyelenggarakan berbagai ajang talenta yang diikuti oleh siswa dari berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Saat ini sebanyak 42 ajang talenta rutin diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Sebanyak 21 Ajang Talenta Riset dan Inovasi yang bertujuan mengembangkan kemampuan riset, inovasi, dan teknologi peserta didik melalui kompetisi di berbagai bidang, seperti robotik, sains, teknologi informasi, dan manajemen bisnis. Ajang ini bertujuan mencetak generasi inovatif yang siap bersaing di era global.

Kemudian, sebanyak 14 Ajang Talenta Seni dan Budaya yang bertujuan menumbuhkan apresiasi seni dan budaya di kalangan peserta didik melalui kompetisi debat bahasa, festival seni, dan budaya. Ajang ini mendorong pengembangan keterampilan komunikasi, kreativitas, dan ekspresi budaya.

Serta, sebanyak 7 Ajang Talenta Olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan semangat sportivitas dan kompetisi sehat di bidang olahraga, serta mendorong gaya hidup sehat dan berprestasi bagi peserta didik. Kompetisi ini mempersiapkan peserta untuk berkompetisi di level internasional. Melalui ajang-ajang tersebut, Kemendikbudristek berupaya untuk menciptakan generasi unggul di berbagai bidang yang mampu berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan bangsa dan berkompetisi di kancah global.

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2024, siswa berprestasi Indonesia telah menunjukkan prestasi gemilang di berbagai ajang talenta internasional di bidang riset dan inovasi, seni budaya, hingga olahraga. Para alumni ajang talenta nasional ini berhasil mengukir sejarah baru dengan meraih total 725 penghargaan di tingkat global.

Prestasi-prestasi tersebut berasal dari ajang-ajang bergengsi berikut:

1. Bidang Riset dan Inovasi

- a. *International Geography Olympiad (IGEO)*
- b. *International Physics Olympiad (IPhO)*
- c. *International Olympiad in Informatics (IOI)*
- d. *International Biology Olympiad (IBO)*
- e. *International Chemistry Olympiad (ICHO)*
- f. *International Economic Olympiad (IEO)*
- g. *International Mathematical Olympiad (IMO)*
- h. *International Earth Science Olympiad (IESO)*
- i. *International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)*
- j. *International Mathematics Competition (IMC)*
- k. *International Junior Science Olympiad (IJSO)*
- l. *International Science and Engineering Fair (REGENERON ISEF)*
- m. *WorldSkills Competitions (WSC)*

2. Bidang Seni dan Budaya

- a. *World Schools Debating Championship (WSDC)*
- b. *World Universities Debating Championship (WUDC)*
- c. *Battle of The Chef*

3. Bidang Olahraga

- a. *Dutch Open Karate*
- b. *ASEAN University Games (AUG)*, dan kompetisi-kompetisi lainnya

Setiap tahunnya, terjadi peningkatan signifikan dalam raihan medali emas, yang mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan 131 medali emas, sementara medali perak juga terus meningkat dengan raihan tertinggi 115 medali pada tahun yang sama. Selain itu, perolehan medali perunggu menunjukkan tren yang stabil. Tidak hanya itu, penghargaan lain seperti Honourable Mention dan kategori penghargaan khusus lainnya juga terus bertambah, menunjukkan luasnya

Grafik raihan prestasi internasional 2020-2024



pengakuan atas kemampuan dan prestasi talenta Indonesia. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi dan potensi luar biasa para peserta didik Indonesia dalam berkompetisi di tingkat global.

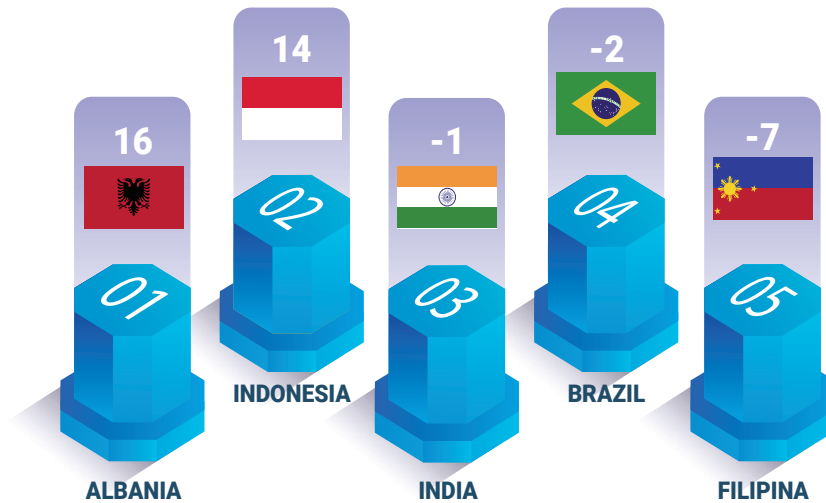
Capaian prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi yang luar biasa, sekaligus mencerminkan kualitas pendidikan dan pengembangan talenta di Indonesia. Melalui berbagai kompetisi bergengsi seperti olimpiade sains, turnamen debat, hingga ajang olahraga internasional, talenta-talenta muda Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk bersaing dan unggul di panggung dunia.



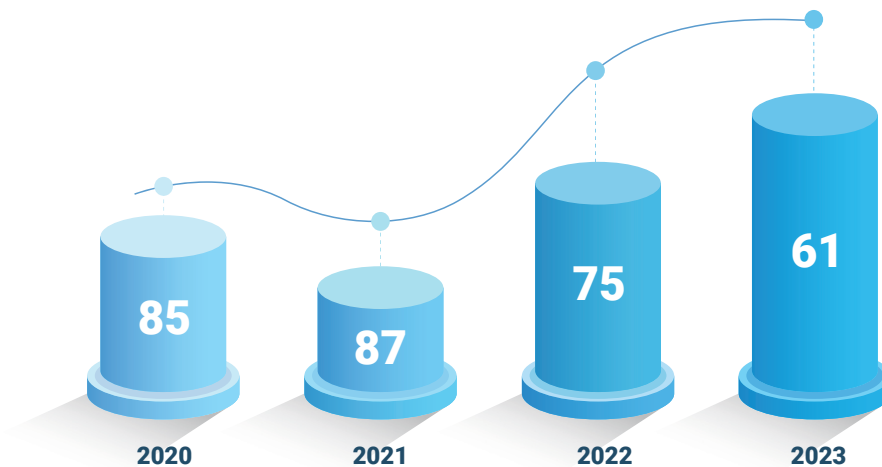


KEMENDIKBUDRISTEK MEMBERI DAMPAK DALAM PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SDM INDONESIA, SECARA MERATA DAN BERKEADILAN

Hal ini ditunjukkan dengan daya saing SDM di Indonesia yang berhasil naik peringkat



Kenaikan peringkat Indonesia dalam *Global Talent Competitiveness Index* dari periode 2013 – 2018 ke 2019 - 2023 tertinggi kedua di dunia.

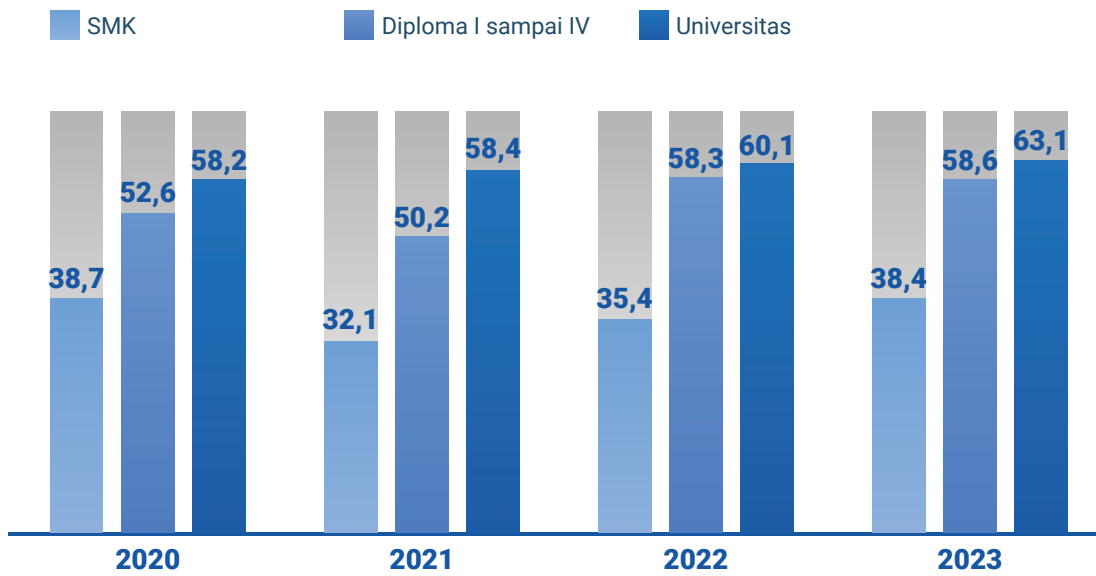


Indonesia berhasil naik **14 peringkat** dalam *Global Innovation Index* dari tahun 2022 ke 2023, walau masih di bawah beberapa negara ASEAN.

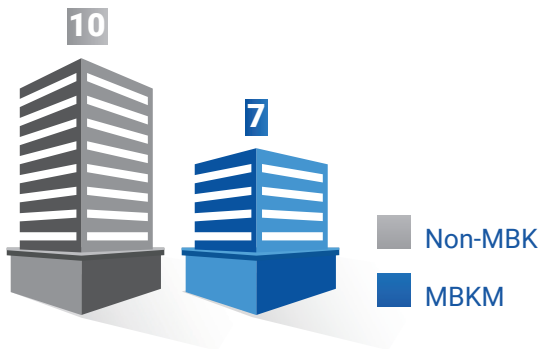
Makin banyak yang bekerja dalam 1 tahun setelah lulus

Kemendikbudristek telah menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih taut-suai dengan industri dan pasar kerja.

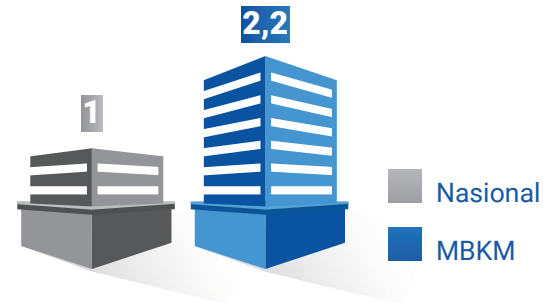
Persentase peserta didik yang bekerja dalam 1 tahun kelulusan



Pendidikan tinggi (waktu tunggu kerja berkurang)



Pendidikan tinggi (rata-rata gaji meningkat)



Hasil riset UGM 2024: Mahasiswa MBKM lebih mudah mendapat pekerjaan

“Hasil riset MBKM mengungkapkan bahwa mahasiswa yang berpartisipasi dalam program unggulan MBKM hanya membutuhkan waktu 7,64 bulan untuk mendapatkan pekerjaan pertama, terhitung dari empat tahun masa studi,” kata Tim Pelaksana Pusat Kampus Merdeka, Rr. Tur Nastiti, M.Si., Ph.D., saat menjadi pembicara dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk “Melanjutkan Transformasi Pendidikan Tinggi Melalui MBKM Mandiri” yang dilaksanakan pada Jumat (28/6) di Balairung UGM.



Peringkat Indonesia di PISA naik dibandingkan 2018 dengan *learning loss* relatif paling kecil dibandingkan negara lain

Hasil PISA 2022 menunjukkan peringkat hasil belajar literasi Indonesia naik 5 sampai 6 posisi dibanding PISA 2018. Peningkatan ini merupakan capaian paling tinggi secara peringkat (persentil) sepanjang sejarah mengikuti PISA.



Peningkatan peringkat ini menunjukkan ketangguhan sistem pendidikan Indonesia dalam mengatasi *learning loss* akibat pandemi.

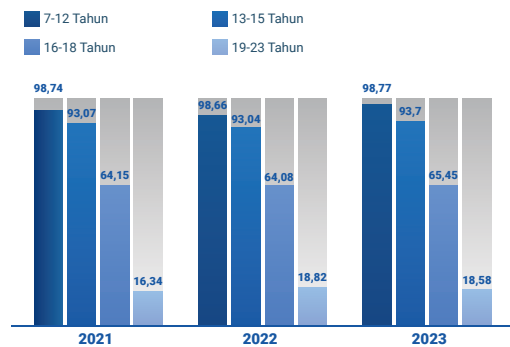
Kemendikbudristek berperan penting dalam integrasi bantuan sosial melalui peningkatan Angka Partisipasi Sekolah bagi kelompok masyarakat dengan kategori miskin

Hasil PISA 2022 menunjukkan peringkat hasil belajar literasi Indonesia naik 5 sampai 6 posisi dibanding PISA 2018. Peningkatan ini merupakan capaian paling tinggi secara peringkat (persentil) sepanjang sejarah mengikuti PISA.

Kemendikbudristek memiliki peranan yang sangat penting dalam Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh, termasuk dalam meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah bagi kelompok masyarakat dengan kategori miskin, yaitu melalui Bantuan Sosial yang terdiri dari:

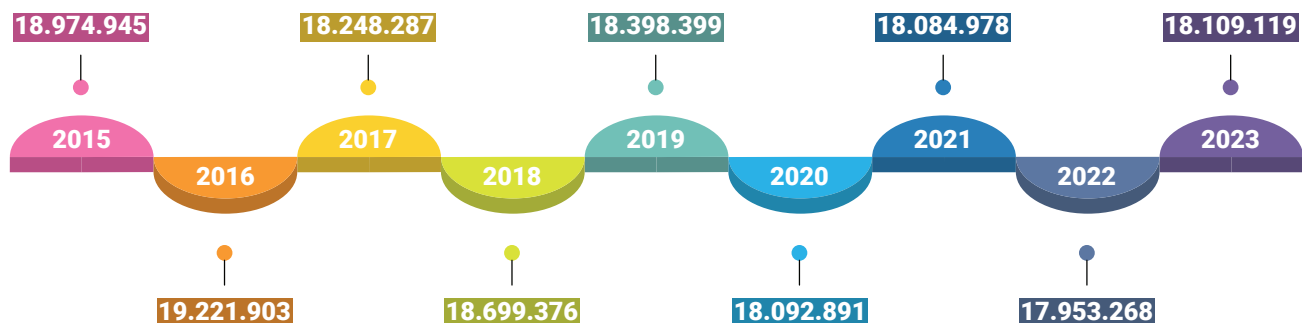
1. Bantuan Sosial Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Program Indonesia Pintar (PIP)
2. Bantuan Sosial Pendidikan Tinggi melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K).

Angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok 20% termiskin, 2021-2023

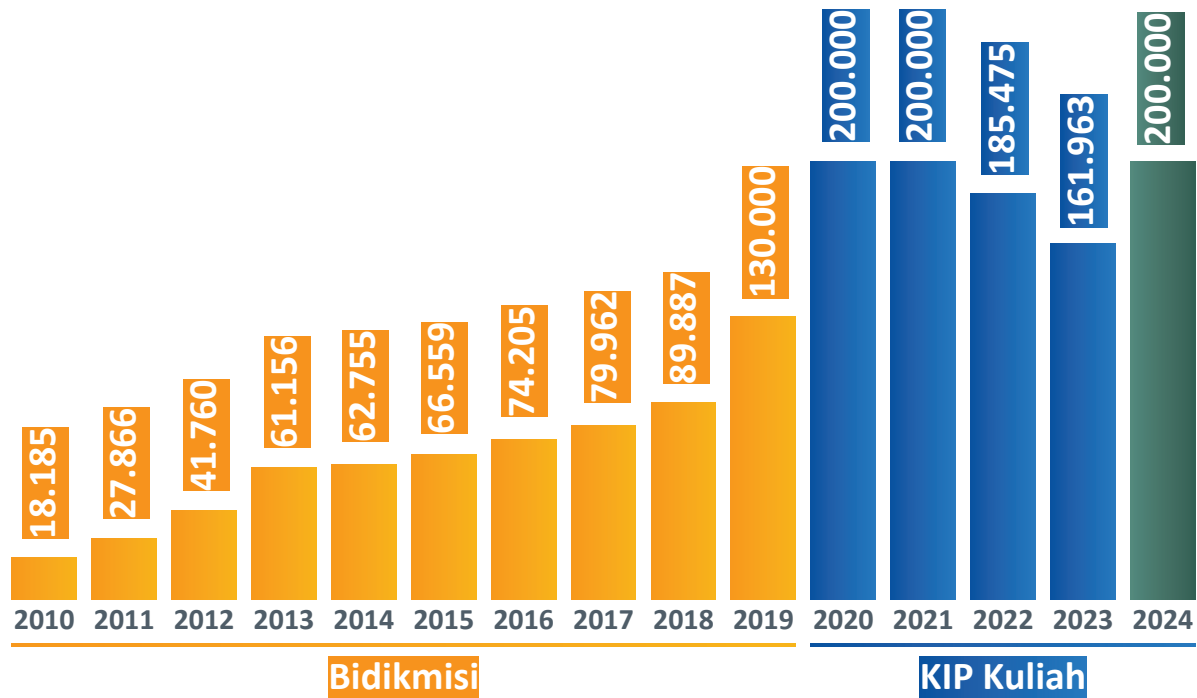


Hal ini terwujud dengan penyaluran bantuan sosial melalui Program Indonesia Pintar di jenjang pendidikan menengah dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (sebelumnya bernama Bidikmisi) di jenjang pendidikan tinggi

Grafik penyaluran PIP 2015-2023



Penerima Baru Bantuan Kuliah per Tahun dari 2010 s.d. 2024



Total Penerima per Tahun dari 2020 s.d. 2024

2020	2021	2022	2023	2024*
689.478	846.946	941.169	1.065.293	975.229

*2024 data per 30 September 2024, masih akan bertambah sampai akhir tahun

Kemendikbudristek juga memprioritaskan aksesibilitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) melalui program afirmasi

Program ADEM Daerah Khusus, diperuntukkan bagi putra-putri terbaik yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk disekolahkan pada jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK) yang terbaik yang berada di Kotamadya wilayah Provinsi yang bersangkutan.

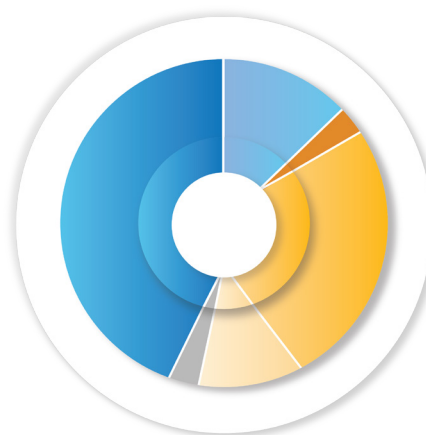
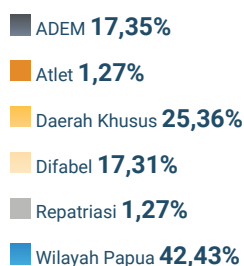
Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) 2024

No	Nama Program	Kelas X (siswa)	Kelas XI (siswa)	Kelas XII (siswa)	Jumlah Bantuan (Rp)
1	ADEM Wilayah Papua	473	467	443	31.021.800.000
2	ADEM Repatriasi	296	294	294	19.828.800.000
3	ADEM Daerah Khusus	200	199	197	13.350.600.000
Jumlah		969	960	934	64.201.200.000

Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 2024

Sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 18 tahun 2023, penerima program ADik berasal dari beberapa kategori yaitu penerima beasiswa ADik asal wilayah Papua, penerima beasiswa ADik asal Daerah Khusus (3T), penerima Adik anak TKI, penerima beasiswa ADik lulusan ADEM dan penerima beasiswa ADik Disa

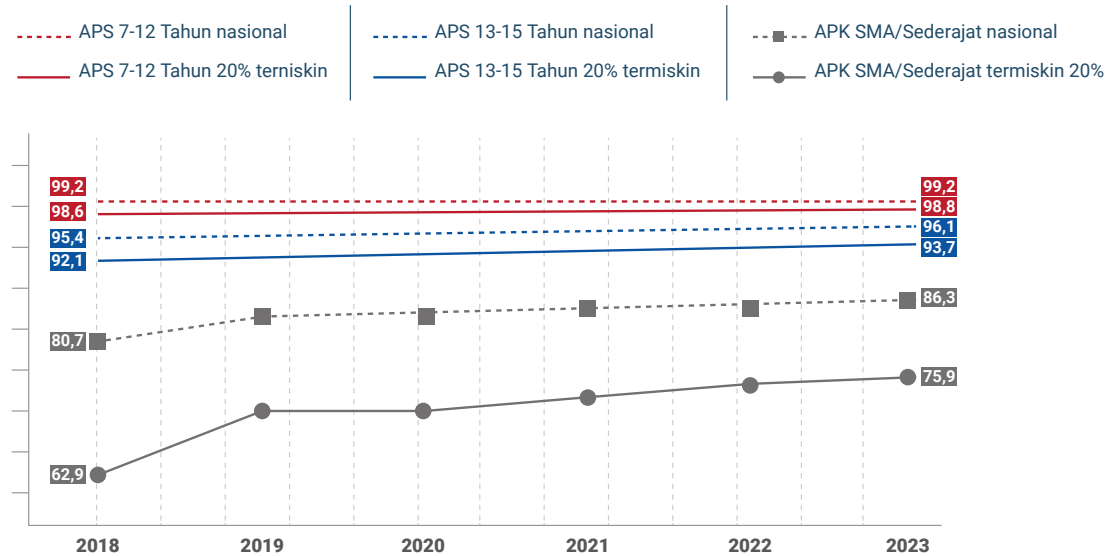
No	ADIK 2023	Jumlah Siswa
1	Lulusan ADEM	1.321
2	Atlet	97
3	Daerah Khusus	1.931
4	Difabel	937
5	Repatriasi	97
6	Wilayah Papua	3.231
Jumlah		7.614



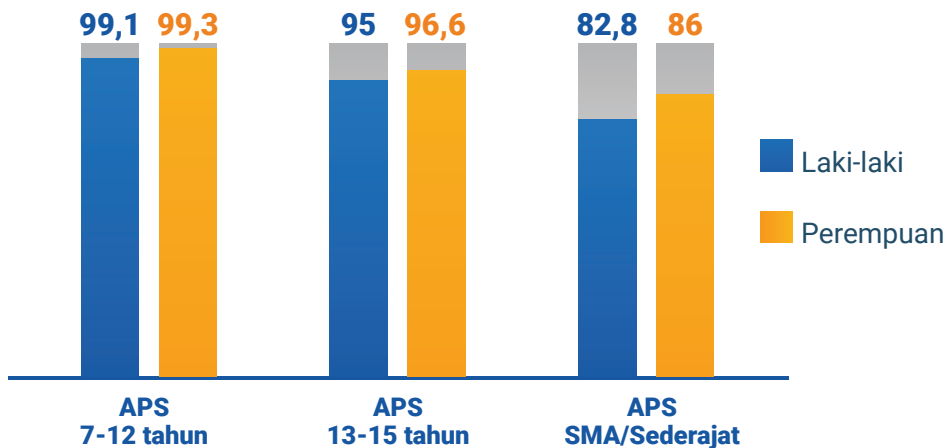
Jangkauan akses di berbagai tingkat pendidikan pun terus meningkat

Kemendikbudristek menyalurkan bantuan pendidikan buat anak dari kelompok tidak mampu, melakukan intervensi sarpras, serta meningkatkan pemahaman keluarga dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Perbandingan tingkat partisipasi sekolah antara nasional dengan kelompok 20% termiskin



Rerata angka partisipasi 2018-2023 di tiga jenjang pendidikan



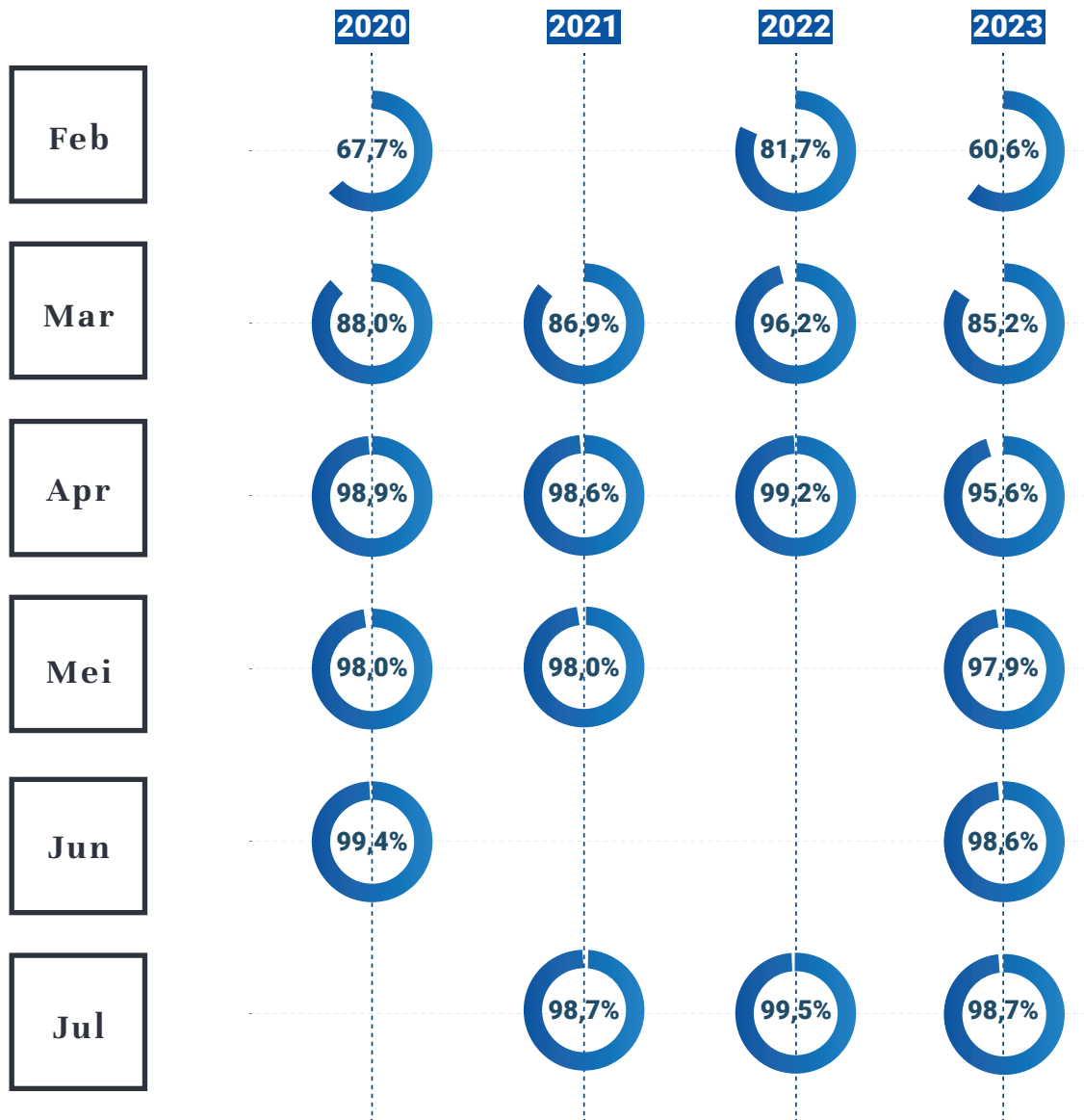
Sejak 2023, dengan perubahan kebijakan transfer langsung dan penyederhanaan birokrasi, BOS bisa disalurkan dengan lebih cepat, sering, dan akuntabel



Pada awal tahun 2024, penyaluran tahap 1 (Februari) bisa langsung mencapai

96%
sekolah

Data Penyaluran BOS



Adanya perubahan kebijakan BOS sesuai Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020

Penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah

	2019	Sekarang
Alur Dana	Penyaluran dana ke sekolah dari Kemenkeu melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi	Penyaluran dana dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah
Frekuensi Penyaluran	4 kali per tahun	2 kali per tahun
Proses verifikasi data	Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat administrasi	Penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota

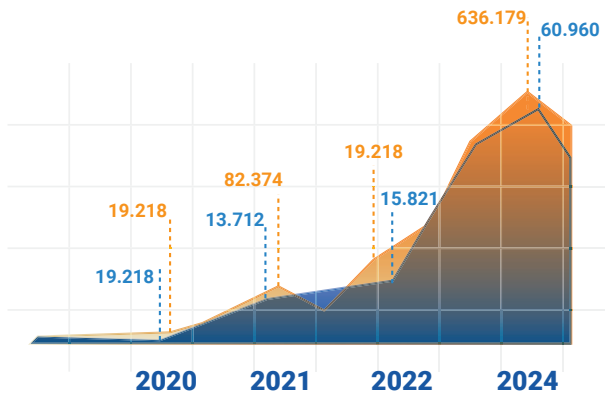
Penggunaan BOS lebih fleksibel untuk sekolah

	2019	Sekarang
Pembayaran honor	Pembayaran guru honorer maksimal 15% untuk sekolah negeri dan 30% untuk sekolah swasta dari total dana BOS	Maksimal 50% untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikat pendidik, dan tercatat di Dapodik pada 31 Desember 2019 (tidak untuk membiayai guru honorer baru)
Alokasi lainnya	Pembelian buku teks dan non-teks maksimal 20% serta pembelian alat multimedia ditentukan kuantitas dan kualitas	Tidak ada pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia
Nilai satuan BOS meningkat	Harga satuan BOS per peserta didik setiap tahun: SD Rp. 800.000, SMP Rp. 1.000.000, SMA Rp. 1.400.000	Harga satuan BOS per peserta didik di setiap jenjang pendidikan bertambah Rp 100.000
Pelaporan BOS diperketat agar lebih transparan dan akuntabel	Laporan disampaikan secara berjenjang oleh sekolah kepada Tim BOS kabupaten/ kota dan atau Tim BOS provinsi. Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah sejauh ini hanya mencakup 53% dari total sekolah	Pelaporan penggunaan dana BOS oleh sekolah secara daring melalui laman: https://bos.kemdikbud.go.id/ menjadi syarat penyaluran BOS tahap ketiga dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan BOS. Sekolah juga harus mempublikasikan penerimaan dan penggunaan dana di papan informasi sekolah atau tempat lain yang mudah diakses masyarakat

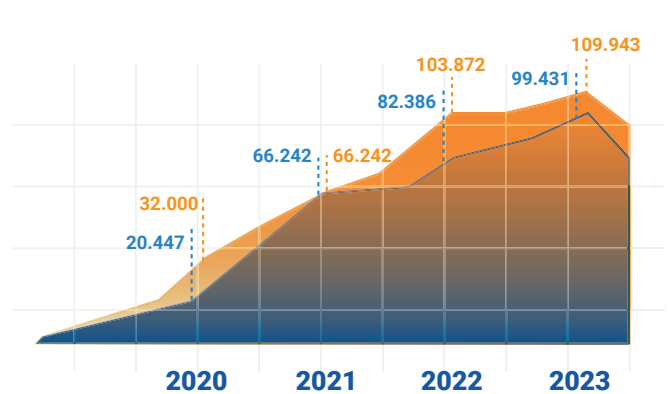
Pemerataan akses pendidikan juga diikuti dengan peningkatan kualitas satuan pendidikan dan pendidik

Kompetensi guru terus meningkat melalui program Guru Penggerak dan sertifikasi

Jumlah guru yang mendaftar dan lulus program Guru Penggerak



Jumlah guru yang mendaftar dan lulus program sertifikasi

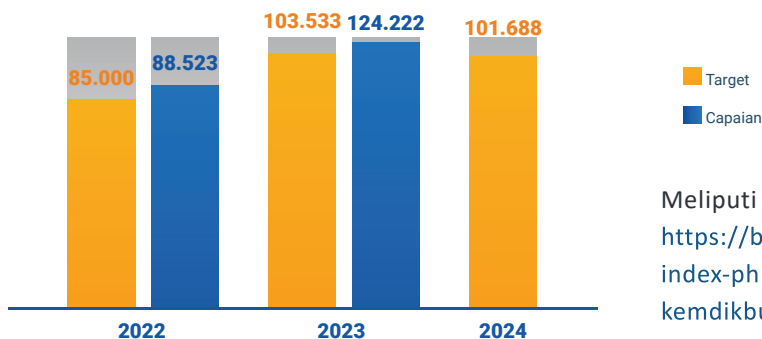


**Penelitian dari Bank Dunia:
Program Guru Penggerak
efektif meningkatkan kualitas
mengajar**

- menegakkan disiplin positif
- memfasilitasi pelajaran
- menciptakan lingkungan pembelajaran kondusif
- meningkatkan pemikiran kritis siswa

Jumlah satuan pendidikan yang lulus akreditasi semakin meningkat

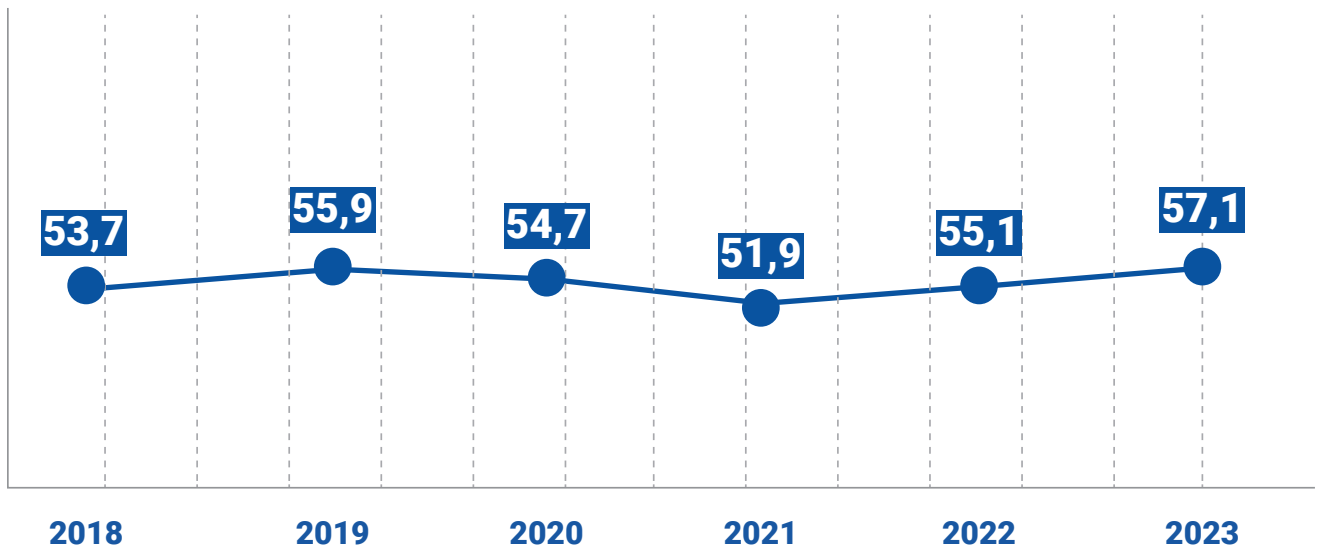
Perbandingan target dan capaian lembaga pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP










Meliputi akreditasi satuan pendidikan PAUD/PNF <https://bansm.kemdikbud.go.id/sispena-paud/index-php> dan Sekolah/Madrasah <https://bansm.kemdikbud.go.id/sispena2020>

KEMENDIKBUDRISTEK MEMBERI DAMPAK YANG BERMAKNA DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN

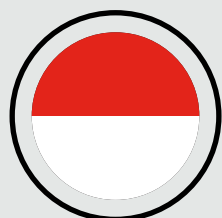
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah salah satu instrumen yang menggambarkan kemajuan pembangunan kebudayaan, dan nilainya terus meningkat sejak 2018.



IPK diukur berdasarkan:

	Aktivitas ekonomi sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan		Aktivitas mendukung proses penciptaan karya budaya oleh masyarakat		Usaha mewujudkan suasana dan proses belajar inklusif
	Aktivitas, sarana, prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji, dan menghasilkan informasi		Upaya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya		Kesetaraan hak dan peluang antara perempuan dan laki-laki di ruang publik untuk berpartisipasi dalam pembangunan
			Kemampuan mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budaya		

Bahasa Indonesia semakin luas kehadirannya di dunia internasional.



diajarkan di

- **54 negara**
- **172.029 penutur asing**



menjadi **bahasa resmi** konferensi umum di UNESCO



UKBI: Pilar kemahiran bahasa Indonesia di panggung global

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) telah mencatatkan pencapaian luar biasa sebagai alat ukur kemampuan bahasa Indonesia yang adaptif dan relevan bagi beragam kalangan. Dengan pendekatan modern, UKBI tidak hanya menjadi tolok ukur kebahasaan di Indonesia, tetapi juga instrumen penting bagi penutur asing melalui program BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing).

UKBI membantu meningkatkan standar kemahiran berbahasa bagi pelajar, profesional, dan penutur asing sehingga memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa yang strategis, baik secara nasional maupun internasional. Selain menjadi alat evaluasi, UKBI adalah simbol kekuatan bahasa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi, mencerminkan jati diri bangsa yang semakin dinamis dan inklusif.

Transformasi UKBI ke arah yang lebih adaptif dan digital menunjukkan komitmen pemerintah dalam

menjadikan bahasa Indonesia kompetitif di era modern. Sebagai salah satu instrumen kebijakan bahasa, UKBI tidak hanya menilai kemahiran berbahasa, tetapi juga mendorong pengembangan bahasa Indonesia di ranah global. Capaian ini semakin mempertegas peran bahasa Indonesia sebagai alat diplomasi dan ilmu pengetahuan, sekaligus menjaga relevansinya di tengah arus global. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, UKBI telah menjadi garda terdepan dalam memajukan bahasa Indonesia dan mewujudkan bahasa internasional yang diakui di berbagai bidang.

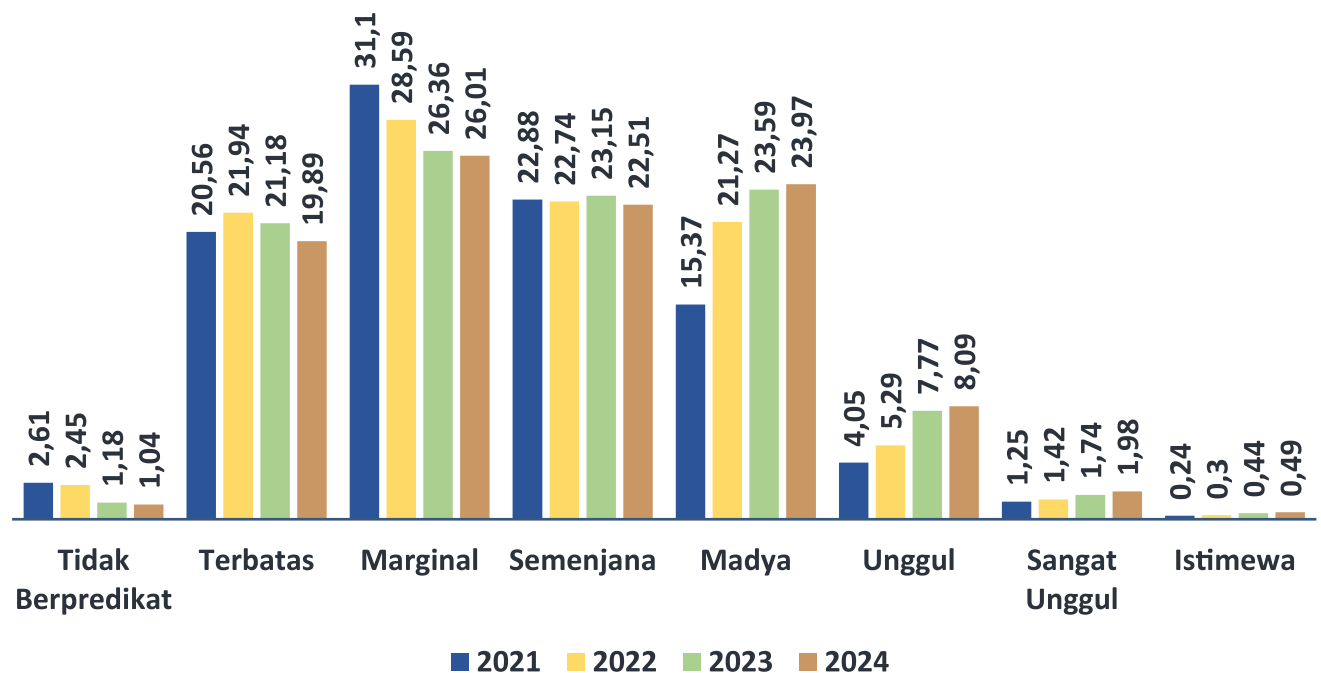
Sejak diluncurkan pada 29 Januari 2021, UKBI Adaptif Merdeka telah diujikan kepada 890.387 orang dari berbagai kalangan mulai dari pelajar, mahasiswa, tenaga profesional, dan WNA. Berdasarkan predikat hasil uji, terjadi peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021 predikat terbanyak yang diperoleh peserta uji

adalah Marginal yang berjumlah 52.389 orang atau sebesar 31.10% dari total peuji.

Pada tahun 2022 predikat terbanyak adalah predikat Marginal dengan jumlah 54.949 orang atau sebesar 24,31% dari total peuji. Pada tahun 2023 predikat terbanyak yang diperoleh peserta uji adalah

Semenjana dengan total peuji 64.915 orang atau sebesar 24.31%. Sementara itu, pada tahun 2024 predikat paling banyak adalah Madya dengan jumlah 55.087 orang atau sebesar 23,39% dari total peuji pada tahun 2024. Berikut grafik perolehan predikat hasil peserta UKBI pada tahun 2021—September 2024.

Sebaran Hasil UKBI Tahun 2021-2024



Berbagai program dilakukan demi mendukung kemajuan budaya Indonesia.

- Kemendikbudristek meluncurkan Program Pemanfaatan Dana Indonesiana 2023 sebagai bentuk pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Penerima manfaat Dana Indonesiana tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan total 293 proposal yang lulus seleksi.
- Gerakan Seniman Masuk Sekolah dari tahun 2017 telah menjangkau 33 Provinsi dan 86 kabupaten/kota di Indonesia. Program ini merupakan bentuk aktivitas mendukung proses penciptaan karya budaya oleh masyarakat.
- Program Pemajuan Kebudayaan Desa merupakan kanal kerja sama membangun desa mandiri melalui peningkatan ketahanan budaya dan kontribusi budaya desa di tengah peradaban dunia. Program ini telah menjangkau 230 kabupaten di 33 provinsi di Indonesia.
- Program Revitalisasi Bahasa Daerah melalui Merdeka Belajar

Program Revitalisasi Bahasa Daerah tahun 2023 (dalam angka)



751.426

Partisipan Festival
Tunas Bahasa Ibu



1.936

Pengawas dan Kepala
Sekolah



511

Komunitas



15.218

Pegiat Bahasa Sastra/
Budayawan/Seniman



22.934

Sekolah



1.696

Perwakilan Pemerintah
dan Lembaga



72

Bahasa Daerah/Dialek



4.158.656

Siswa



226

Kabupaten Kota



119.510

Guru dan Fasilitator



226

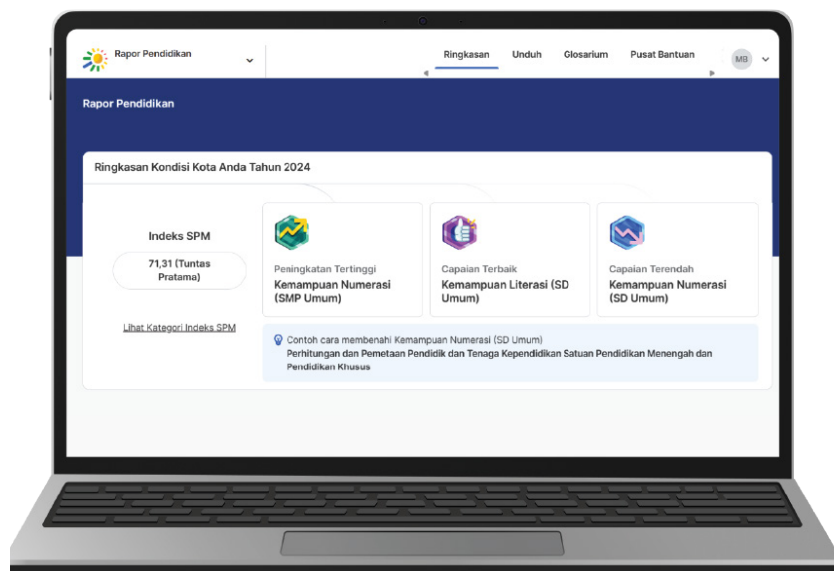
Provinsi

KEMENDIKBUDRISTEK MEMBANTU MENINGKATKAN SINERGI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Keberadaan Rapor Pendidikan membuat satuan pendidikan dan pemerintah daerah tidak lagi disibukkan dengan pengumpulan data evaluasi.

Rapor Pendidikan mengintegrasikan data Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan, sistem pendataan pendidikan yang dikelola Kemenag, aplikasi untuk guru dan tenaga kependidikan (PMM, ARKAS, SIM PKB), BAN, dan *Tracer Study* (khusus jenjang SMK). Rapor Pendidikan digunakan sebagai rujukan evaluasi internal oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam bentuk Perencanaan Berbasis Data (PBD) dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Adanya Rapor Pendidikan ini dapat mengurangi beban administratif pendataan, satuan pendidikan dan pemerintah daerah tidak perlu lagi disibukkan dengan berbagai aktivitas pengumpulan data evaluasi.

Pada tahun 2023, Rapor Pendidikan tersedia untuk **428.598** jumlah satuan pendidikan dan **552** pemerintah daerah dan telah diakses oleh **74,2%** satuan dan **100%** pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia telah memanfaatkan Rapor Pendidikan.



Pemanfaatan Rapor Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2023

Jenjang	Total	Satuan belum membuka	Satuan sudah membuka	% NSPN Login
PAUD	198.395	85.206	113.189	57,05%
SD	149.258	13.311	135.947	91,08%
SMP	42.305	3.806	38.499	91,00%
SMA	14.358	1.145	13.213	92,03%
SMK	14.377	1.536	12.841	89,32%
SLB	2.257	514	1.743	77,23%
Kesetaraan	7.648	5.070	2.578	33,71%

Pemanfaatan Rapor Pendidikan Tingkat Daerah Tahun 2023

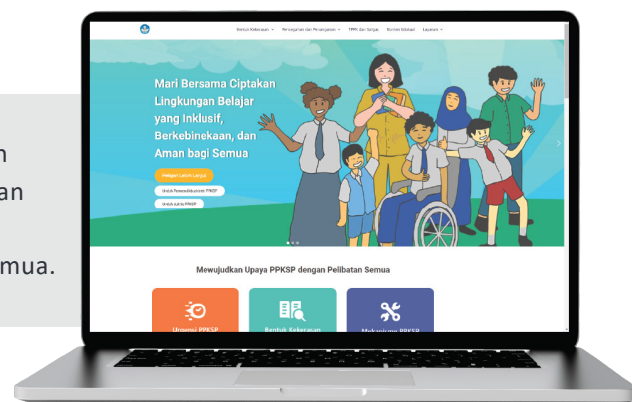
Jenis Daerah	Total Daerah	Daerah Login	% Daerah Login
Kab/Kota	514	514	100%
Provinsi	38	38	100%



Kemendikbudristek senantiasa bersinergi dan berkolaborasi dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah

Melalui implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Kemendikbudristek telah bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, lembaga negara terkait, pemerintah daerah, berbagai kelompok masyarakat sipil, serta warga satuan pendidikan. Kebijakan ini didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah dengan bersama-sama membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang mendukung Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah.

Demi mendukung sinergi tersebut, Kemendikbudristek meluncurkan kanal merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id yang dapat digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkebhinekaan, dan aman bagi semua.



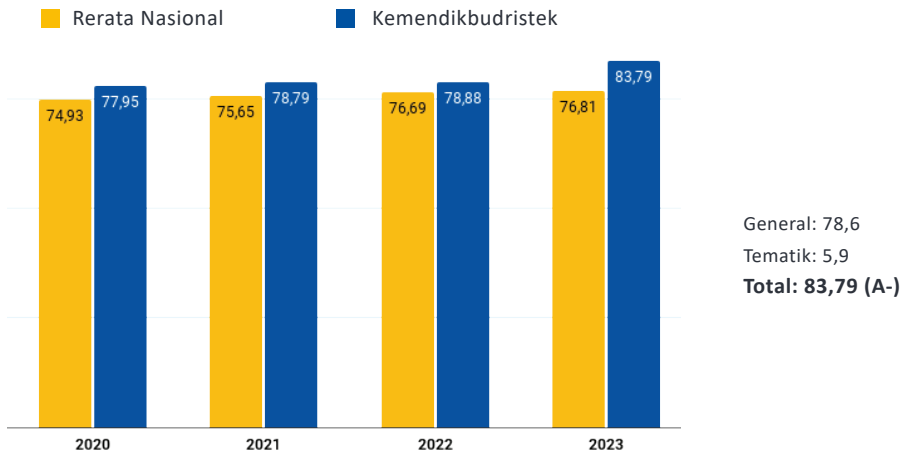
BAB V

TATA KELOLA DAN DUKUNGAN MANAJEMEN



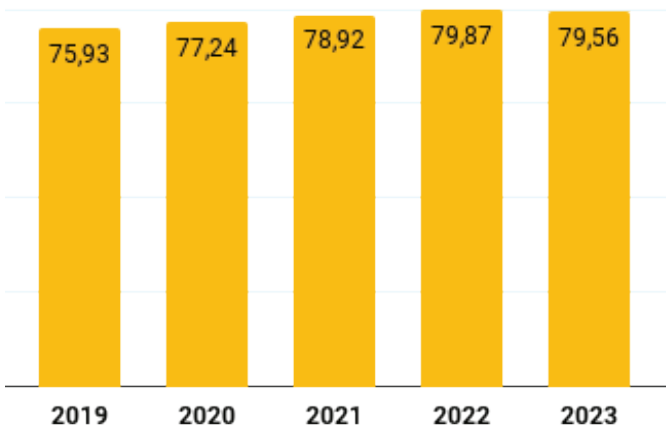
Indeks RB Kemendikbudristek konsisten meningkat selama 4 tahun, melampaui rerata indeks nasional.

Indeks Reformasi Birokrasi



Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemendikbudristek mengalami kenaikan selama 5 tahun terakhir.

Nilai SAKIP Kemendikbudristek



Penguatan akuntabilitas kinerja di Kemendikbudristek memperlihatkan hasil evaluasi yang cukup memuaskan. Kemendikbudristek akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas AKIP dengan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi pada Lembar Kerja Evaluasi tahun sebelumnya.

Skor progres pelaksanaan *quick wins mandatory* penyederhanaan struktur organisasi dalam laporan hasil evaluasi RB Kemendikbudristek tahun 2023 mencapai 100%

Kemendikbudristek telah berhasil melakukan penyederhanaan birokrasi dengan transformasi organisasi berbasis kinerja

Jumlah organisasi yang telah ditata:

Unit Kerja	Telah dilakukan (Satker)	Belum dilakukan (Satker)
Unit utama	56	-
UPT	133	-
LLDIKTI	17	-
PTN	99	3
Jumlah	305	3

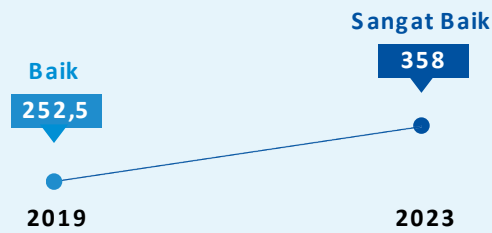
Unit Kerja	Sebelum Penyederhanaan Tahun 2019		Setelah Penyederhanaan Tahun 2021-2024	
	Eselon III	Eselon IV	Eselon III	Eselon IV
Unit utama	173	389	5	49
UPT	174	426	113	115
LLDIKTI	51	117	17	0
PTN	736	2.312	498	275
Jumlah	1.134	3.063	633	439

Jumlah jabatan struktural yang ditata:

Unit Kerja	Pejabat eselon III yang disetarakan menjadi Jafung (jabatan)	Belum dilakukan (Satker)
Unit utama	173	385
UPT	174	425
LLDIKTI	51	117
PTN	736	2.132
Jumlah	1.134	3.059

Nilai Indeks Sistem Merit Kemendikbudristek berhasil naik menjadi predikat Sangat Baik

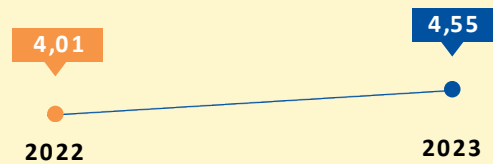
Data indeks sistem merit:



Kemendikbudristek telah menyusun peta jabatan berdasarkan perubahan struktur organisasi yang tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang OTK Kemendikbudristek dan OTK masing-masing UPT dan PTN.

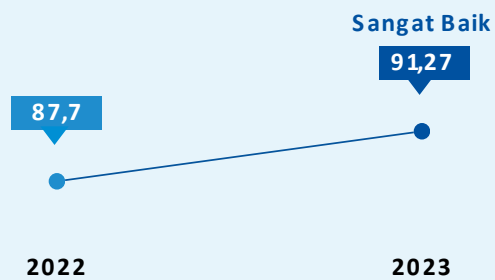
Indeks Pelayanan Publik Kemendikbudristek menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya

Data indeks pelayanan publik:



Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kemendikbudristek di tahun 2023 memperoleh nilai rata-rata Sangat Baik

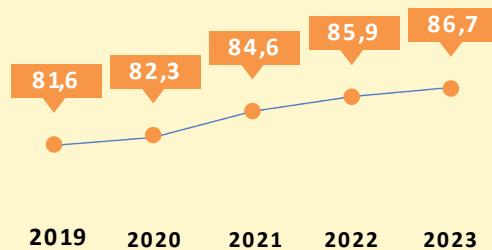
Data indeks kepuasan masyarakat:



Pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan Kemendikbudristek secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang sangat baik dengan nilai rata-rata 91,27 untuk survei kepuasan masyarakat. Hal ini menunjukkan keseriusan dan konsistensi Unit Pelayanan Publik (UPP) untuk memperhatikan masukan dari pengguna layanan demi menjaga kualitas layanan dari tahun ke tahun.

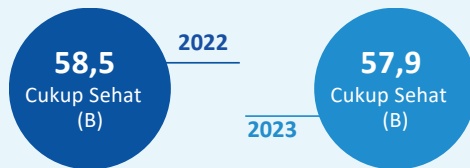
Hasil Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbudristek konsisten mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga sekarang

Data survei kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek:



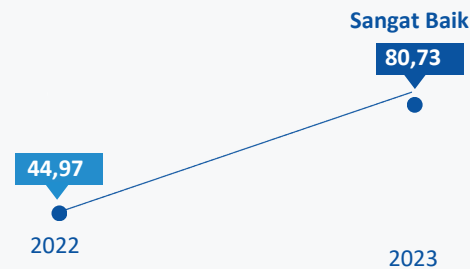
Kemendikbudristek melakukan penajaman peta jalan untuk mendukung Sasaran Strategis 2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional

Data indeks berAKHLAK:



Indeks Kualitas Kebijakan Kemendikbudristek 2023 mendapatkan predikat Sangat Baik dan menunjukkan kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya

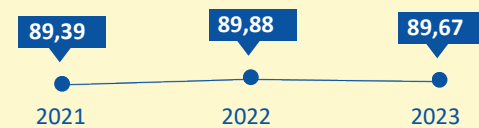
Data indeks kualitas kebijakan:



Kemendikbudristek telah melakukan optimalisasi tata kelola dan kapasitas manajemen kebijakan melalui kelengkapan data dukung dalam proses perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan.

Kemendikbudristek menduduki Kategori A (Kualitas Tertinggi) pada Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan dari Ombudsman RI

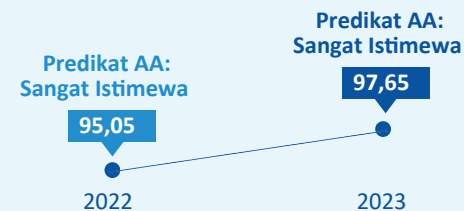
Data indeks kepatuhan standar pelayanan:



Nilai indeks pada 2023 masuk dalam Zona Hijau dan termasuk Kategori A (kualitas tertinggi). Kemendikbudristek menduduki peringkat ke-4 dari 27 kementerian berdasarkan penilaian Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) terhadap **Unit Layanan Terpadu di Lingkungan Kemendikbudristek**.

Indeks Reformasi Hukum Kemendikbudristek konsisten mendapatkan Predikat AA (Sangat Istimewa) selama dua tahun ke belakang

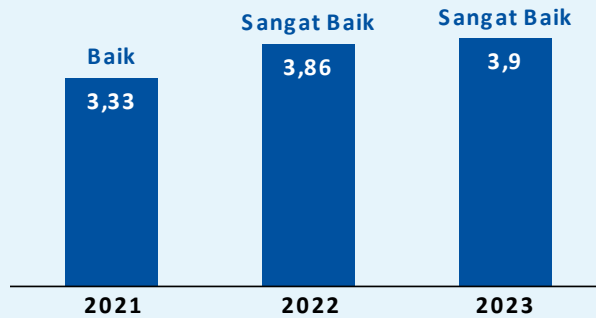
Data indeks reformasi hukum:



Kemendikbudristek telah melakukan penyesuaian data dukung kelengkapan permohonan harmonisasi rancangan peraturan undangan-undangan (RUU, RPP, RPerpres, Permen) sesuai dengan program penyusunan atau izin prakarsa. Peningkatan kompetensi SDM Kemendikbudristek juga terus dilakukan untuk mendukung reformasi hukum.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SP BE) Kemendikbudristek konsisten mengalami kenaikan

Data indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)



Kemendikbudristek menunjukkan komitmen dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal yang dilakukan adalah penguatan arsitektur, peta rencana, implementasi, dan manajemen SPBE.

Kemendikbudristek telah berhasil melakukan 1.261 simplifikasi aplikasi di lingkungan Kemendikbudristek untuk mendukung implementasi SPBE

Kemendikbudristek telah melaksanakan pemetaan terhadap aplikasi-aplikasi yang teridentifikasi di lingkungan Kemendikbudristek baik yang on premise, PDNS, Public Cloud, dan lain-lain sebanyak 1.216 aplikasi.

Simplifikasi aplikasi dilakukan hingga tersedia beberapa aplikasi mayor di lingkup Kemendikbudristek, yaitu: SINDE (Sistem Naskah Dinas Elektronik), DAPODIK (Data Pokok Pendidikan), PDdikti, e-Planning Kemdikbud, MOLK Kemdikbud (Monitoring Laporan Keuangan Kemdikbud), SPASIKITA, ARKAS, SIPLah, Platform Merdeka Mengajar (PMM), Platform Kampus Merdeka (PKM), Rapor Pendidikan, Akun Belajar.id, Wiyata Kinarya Merdeka Belajar (WKMB).

Kemendikbudristek memperoleh predikat “Baik” pada Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2023

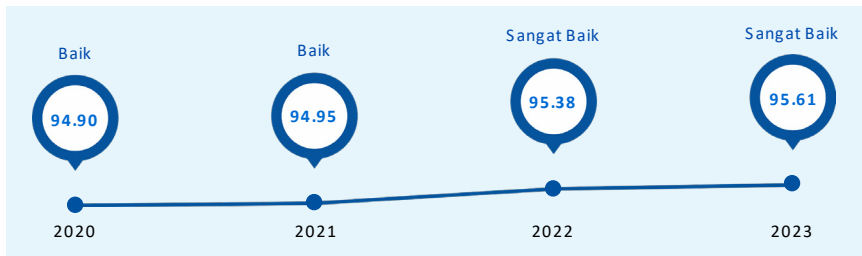
Kemendikbudristek telah meningkatkan upaya dalam menyelaraskan rencana kerja dan rencana strategis dengan Prioritas Nasional. Hal ini berdampak pada perolehan 90,55 untuk nilai IPPN Tahun 2023. Hal ini memungkinkan tersedianya kebijakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, kinerja, dan pelaporan berbasis teknologi informasi.

90,55 Predikat Baik

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemendikbudristek konsisten mendapatkan predikat Baik dari Kementerian Keuangan.

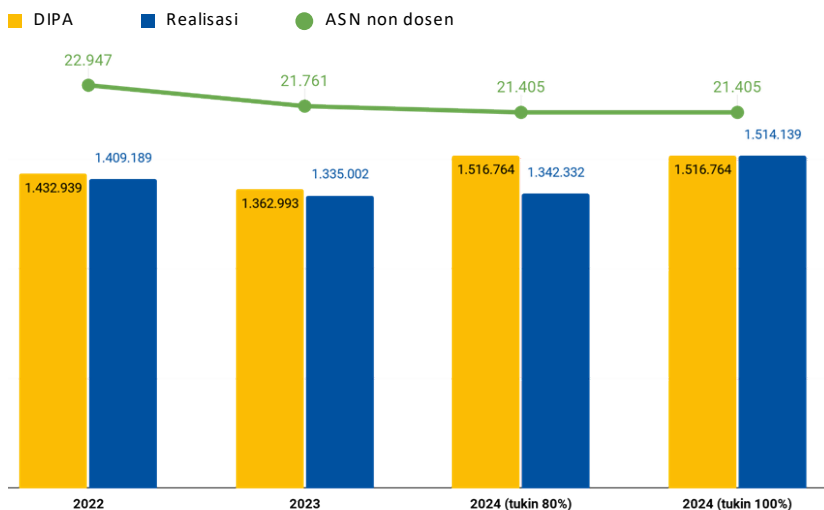
Kemendikbudristek menunjukkan hasil baik dalam implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran terus meningkat dari tahun ke tahun dan masuk pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan pengelolaan anggaran di Kemendikbudristek yang semakin baik, dari aspek perencanaan maupun implementasinya.



Berdasarkan tingkat realisasi anggaran selama 2 tahun terakhir, kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kemendikbudristek diproyeksikan tidak akan mengganggu anggaran.

Realisasi DIPA (dalam juta Rupiah) dan jumlah ASN non-dosen



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN KEMENDIKBUDRISTEK TAHUN 2025





RENCANA PROGRAM DAN PAGU ANGGARAN KEMENDIKBUDRISTEK TA 2025

1. Berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas Nomor S-612/MK.02/2024 dan B-480/D.8/PP.04.03/ 07/2024 tanggal 19 Juli 2024, Pagu Anggaran Kemendikbudristek ditetapkan sebesar **Rp83,19 triliun**.
2. Berdasarkan hasil Panja Belanja Pemerintah Pusat tanggal 10 September 2024, Kemendikbudristek mendapatkan tambahan anggaran sebesar **Rp10,41 triliun**. Dengan tambahan anggaran ini maka Pagu Kemendikbudristek diperkirakan sebesar **Rp93,60 triliun**.
3. Tambahan anggaran ini mencakup **pembiayaan program wajib dan prioritas** seperti tunjangan guru dan dosen, peningkatan kualitas guru, pendampingan kualitas pendidikan, revitalisasi PTN, pembinaan PTS, peningkatan kualitas SMK non Pusat Keunggulan dan pabrik pembelajaran, BOPTN, berbagai beasiswa yang semula pendanaan dari Program Kolaborasi Kemendikbudristek-LPDP, dan Sekolah Unggulan.

Memorandum Akhir Jabatan Mendikbudristek 2019-2024

(dalam ribu rupiah)

HASIL PANJA BPP		RINCIAN ALOKASI		
KEGIATAN	ALOKASI	KEGIATAN	TARGET	ALOKASI
Sekolah Unggulan	2.000.000.000	Sekolah Unggulan	4 sekolah	2.000.000.000
TPG Non PNS dan keberlanjutan PPG	3.792.700.000	TPG Non PNS	185.096 orang	3.042.705.582
		PPG (<i>on-going</i>), PPG baru (prajabatan, dalam jabatan)	503.171 orang	738.275.618
		Program non gelar GTK (<i>microcredential</i>)	400 orang	11.718.800
TPD, BOPTN dan Sarana dan Prasarana PTN	3.361.500.000	Tunjangan Profesi Dosen	39.079 orang	172.557.168
		BOPTN Dikti	76 lembaga	1.170.391.860
		Sarana dan prasarana PTN	76 lembaga	1.106.288.136
		Program pembinaan PTS	600 PTS	300.000.000
		Beasiswa KNB, Darmasiswa, ADIK, BPI, AMN, dan Non Gelar Dikti	15.513 orang	612.262.836
Sarana dan Pasarana Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dan SMK (<i>Teaching Factory</i>)	1.258.800.000	Sarana dan prasarana Perguruan Tinggi Vokasi (PTV)	49 lembaga	261.126.597
		SMK non PK	82 lembaga	41.000.000
		SMK (pabrik pembelajaran/ <i>teaching factory</i>)	1.045 lembaga	434.798.342
		BOPTN Vokasi	49 lembaga	216.420.967
		Non Gelar Vokasi	15.900 lembaga	55.454.094
		Peningkatan keterampilan dan penyegaran keterampilan pendidik dan tendik satdik vokasi	3880 orang/ 7 unit	250.000.000
TOTAL	10.413.000.000			10.413.000.000

URAIAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA 2025	PAGU ANGGARAN TA 2025	PAGU ANGGARAN TA 2025 (Hasil Panja BPP)
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	83.187.821.056	83.187.821.056	93.600.821.056
Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	10.228.260.216	10.228.260.216	12.228.260.216
Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.878.306.713	1.878.306.713	1.878.306.713
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	12.931.508.239	12.881.508.239	16.674.208.239
Program Pendidikan Tinggi	34.247.707.755	34.247.707.755	37.609.207.755
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.748.514.146	3.748.514.146	5.007.314.146
Program Dukungan Manajemen	20.153.523.987	20.203.523.987	20.203.523.987

Arah Kebijakan Kemendikbudristek Tahun 2025

Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan



- PIP, KIP Kuliah
- Layanan PAUD Holistik Integratif
- Afirmasi Pendidikan (3T, Inklusi, dll)
- Pendidikan Non-Formal
- PT Vokasi, PT
- Akademik, dan AKM
- Pendanaan Pendidikan

Kualitas dan Relevansi Pendidikan



- Sekolah Penggerak
- Kurikulum Merdeka
- Digitalisasi Pendidikan
- Siswa Berprestasi dan Manajemen Talenta
- Asesmen Nasional
- Guru Penggerak
- Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- SMK Pusat Keunggulan
- Pendidikan Non-Formal Vokasi
- Penguatan Mapel Perubahan Iklim, Kesehatan, Olahraga dan Bahasa Inggris

Pendidikan Tinggi, Riset dan Inovasi



- Kampus Merdeka
- Praktisi Mengajar
- Kerja sama Riset Internasional
- Sinergi Riset DUDI dan PT
- Infrastruktur Riset
- Hilirisasi Hasil Penelitian
- Pusat Keunggulan Riset
- Dana Pemadanan dan Dana Kompetitif

Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan



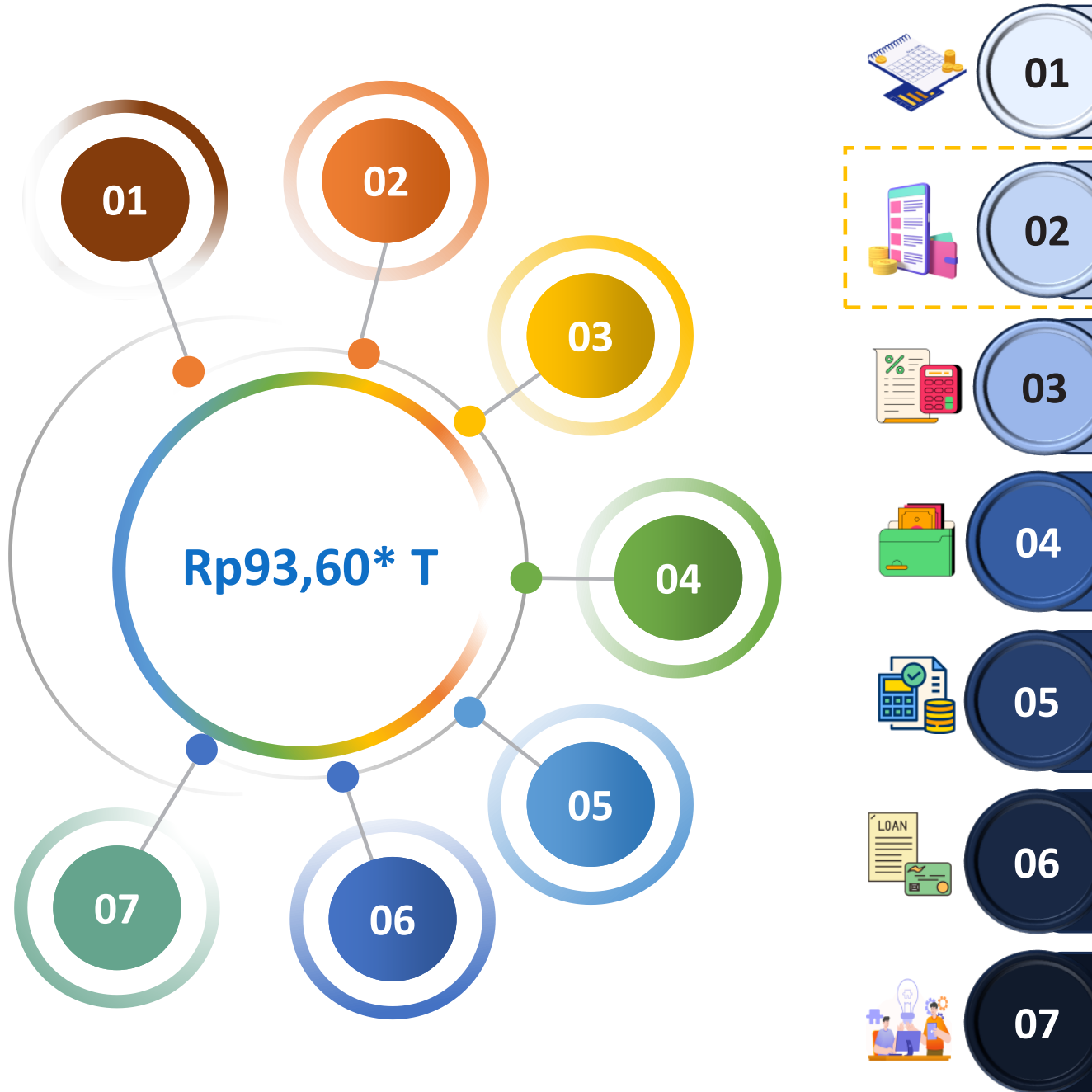
- Partisipasi Publik dalam BIPA
- Perhelatan Bidang Kebudayaan
- Pelindungan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra
- Revitalisasi Bahasa Daerah
- Penguatan Literasi
- Diplomasi Budaya
- Pelindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan



- Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
- Kolaborasi pendanaan dengan LPDP
- Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Pagu anggaran 2025 berdasarkan sumber dana



RM Operasional
Rp18.149.483.692

RM Non Operasional
Rp64.147.999.548

RMP
Rp11.610.000

PNBP
Rp1.220.693.747

BLU
Rp7.805.593.966

PHLN
Rp726.408.232

SBSN
Rp1.539.031.871

Pendanaan Wajib Rp46,14 T

Kegiatan	Sasaran	Satuan	Anggaran
Program Indonesia Pintar	17.93 juta	Siswa	Rp9,67T
KIP Kuliah	1.040.192	Mahasiswa	Rp14,70T
Aneka Tunjangan Guru Non PNS	518.701	Guru	Rp10,68T
Tunjangan Profesi Dosen dan GB Non PNS	63.082	Orang	Rp2,70T
BOPTN Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Vokasi	125	Lembaga	Rp8,39T

Program Prioritas Lainnya Rp18,00 T

- Sekolah Unggulan
- Platform Merdeka Belajar,
- Kurikulum Merdeka,
- Asesmen Nasional,
- Pendampingan Sekolah Penggerak,
- Guru Penggerak,
- SMK Pusat Keunggulan,
- Pendidikan Karakter,
- Program Literasi Bahasa dan Kesastraan,
- Tugas dan Fungsi, Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola.





MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENUTUP MEMORANDUM AKHIR JABATAN

Kehadiran gerakan Merdeka Belajar selama lima tahun terakhir telah memberikan kesempatan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Gerakan Merdeka Belajar terus berupaya meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memutus keterhubungan antara dunia pendidikan dan budaya dengan persoalan-persoalan nyata yang terjadi di dunia yang sesungguhnya.

Saat ini, para pelajar lebih dekat dengan kearifan lokal dan lingkungan sekitarnya; para guru memiliki komunitas belajar lintas sekolah dan daerah; para mahasiswa bisa memperkaya pengetahuan dan pengalamannya di luar bangku perkuliahan; sekolah vokasi semakin berkolaborasi erat dengan mitra industri; pelaku budaya memiliki kemerdekaan dalam mengolah kekayaan Nusantara menjadi produk budaya yang relevan dengan persoalan hari ini.

Oleh karena itu, keberhasilan gerakan Merdeka Belajar dalam mentransformasi aspek-aspek esensial dalam dunia pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang kita rasakan sekarang ini merupakan hasil kontribusi berbagai lapisan masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah berjuang dan mendukung gerakan Merdeka Belajar. Keterlibatan Anda semua telah menjadi babak baru dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai langkah nyata untuk menghidupkan kembali gagasan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara, bahwa setiap anak Indonesia memiliki bakat yang berbeda, saya yakin gerakan Merdeka Belajar akan terus hidup dan berkembang di kemudian hari. Kita semua tentu ingin para pelajar di seluruh Indonesia memperoleh pendidikan yang berkualitas dan memerdekakan, memberi mereka peluang seluas-luasnya untuk tumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya.

Melalui kehadiran Memorandum Akhir Jabatan ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk meneruskan perubahan yang telah kita lakukan. Mari kita terus bergerak melahirkan SDM unggul yang mampu membawa Indonesia melompat ke masa depan.

Jakarta, Oktober 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Nadiem Anwar Makarim

Tim Penyusun

Pelindung

Mendikbudristek

Pengarah

1. Suharti
2. Jurist Tan
3. M Heikal Ruslan

Penanggung Jawab

Anang Ristanto

Penyusun Naskah

1. Anandes Langguana
2. Anang Kusuma
3. Ratih Anbarini
4. Danasmoro Brahmantyo
5. Dhianita Kusuma Pertiwi
6. Ahmad Fariq Alfaruqi

Editor

1. Hendarman
2. Dian Wahyuni
3. Goldy Dharmawan

Layout

1. Heri Nana Kurnia
2. Hafid Suryadi

Grafis

1. Destya Ayu Lestari
2. Muhamad Ridwan

Sekretariat

1. Efrini
2. Nur Widiyanto
3. Yus Pajarudin

Penyusun Bahan

Unit Utama, Biro dan Pusat
Kemendikbudristek





**MERDEKA
BELAJAR**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270